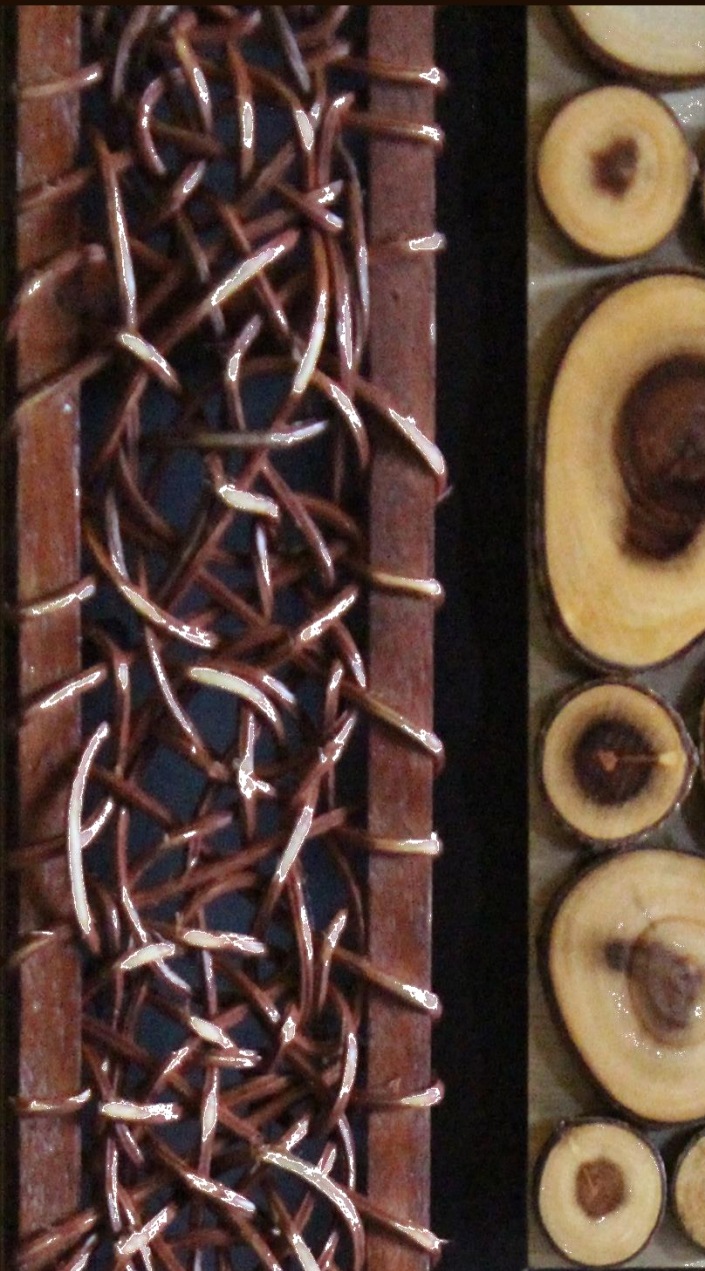


INDIKATOR MAKRO

KOTA BANJARBARU

2019



BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA BANJARBARU



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA BANJARBARU

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji syukur kehadiran Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa, atas terbitnya publikasi **“Indikator Makro Kota Banjarbaru Tahun 2019”** yang disusun sebagai hasil kerjasama oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Banjarbaru dengan BPS Kota Banjarbaru.

Publikasi Indikator Makro Kota Banjarbaru Tahun 2019 menggambarkan kondisi perekonomian Kota Banjarbaru selama tahun 2018. Kondisi ekonomi makro Kota Banjarbaru, seperti pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, perkembangan harga-harga, keuangan, moneter dan investasi Kota Banjarbaru tersaji dalam publikasi ini.

Harapan saya, terbitnya publikasi ini dapat dimanfaatkan dengan baik serta dapat dijadikan dasar dalam penyusunan kebijakan dan penentuan skala prioritas pembangunan khususnya di wilayah Kota Banjarbaru. Akhirnya, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberkati dan meridhoi segala usaha dan pengabdian kita semua.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Banjarbaru, Oktober 2019

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Banjarbaru



JOHAN ARIFIN, AP. MM

Pembina Tk. I

19750328 199501 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
I. PENDAHULUAN	2
1.1 Maksud dan Tujuan Penulisan	4
1.2 Metodologi	5
1.3 Sistematika Penulisan	5
II. GAMBARAN UMUM KOTA BANJARBARU	9
2.1 Sejarah Kota Banjarbaru	9
2.2 Lambang Daerah dan Motto	11
2.3 Visi dan Misi Kota Banjarbaru	13
2.4 Prioritas dan Tujuan Pembangunan Kota Banjarbaru	14
2.5 Kondisi Wilayah Kota Banjarbaru	15
2.6 Potensi Pengembangan Wilayah	17
III. PERKEMBANGAN PENDUDUK KOTA BANJARBARU	20
3.1 Jumlah, Perkembangan dan Laju Pertumbuhan Penduduk	21
3.2 Kepadatan Penduduk	23
3.3 Komposisi Penduduk	24
IV. PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN KOTA BANJARBARU	30
V. PERKEMBANGAN STATISTIK HARGA	38
5.1 Indeks Harga Konsumen (IHK)	38
5.2 Laju Inflasi	43
5.3 Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)	56
VI. TABUNGAN DAN INVESTASI	60
6.1 Penghimpunan Dana	63
6.2 Penyaluran Kredit	65
6.3 Penanaman Modal	69
VII. KETIMPANGAN PENDAPATAN	75

7.1 Teori Ketimpangan Pendapatan	78
7.2 Mengukur Ketimpangan Melalui Kurva Lorenz dan Gini Ratio.....	80
7.3 Menghitung Ketimpangan Pendapatan Kota Banjarbaru	82
7.4 Upaya Mengurangi Ketimpangan Pendapatan	87
VIII PERKEMBANGAN DATA KEMISKINAN	91
8.1 Kemiskinan	93
8.2 Garis Kemiskinan	102
8.3 Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan	102
8.4 Kemiskinan Relatif	105
8.5 Pengeluaran Per Kapita	107
IX PERKEMBANGAN KETENAGAKERJAAN	113
9.1 Gambaran Ketenagakerjaan di Kota Banjarbaru	115
9.2 Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Kesempatan Kerja	122
9.3 Daya Serap Tenaga Kerja	125
9.4 Produktivitas Tenaga Kerja	127
X INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA	131
10.1 Teori dan Konsep Pembangunan Manusia	133
10.2 Perkembangan IPM Kota Banjarbaru	140
10.3 Angka Harapan Hidup (AHH)	142
10.4 Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah	144
10.5 Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan	147
LAMPIRAN	151

BAB I

PENDAHULUAN



PENDAHULUAN



GAMBARAN UMUM



PERKEMBANGAN PENDUDUK



PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN



PERKEMBANGAN STATISTIK HARGA



TABUNGAN DAN INVESTASI



KETIMPANGAN PENDAPATAN



PERKEMBANGAN DATA KEMISKINAN



PERKEMBANGAN KETENAGAKERJAAN



INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA





PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi tidak hanya bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan yang setinggi-tingginya namun diharapkan juga mampu mengurangi tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi di wilayah tersebut.

Pembangunan ekonomi di suatu daerah merupakan proses pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan masyarakat, serta pembentukan pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan pihak swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang pertumbuhan ekonomi dalam suatu wilayah. Strategi pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah terus berkembang dari waktu ke waktu demi mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang lebih inklusif sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara merata dan adil. Untuk mencapai tujuan tersebut maka perlu dilakukan strategi pembangunan *triple track strategy*, yakni strategi pembangunan yang *pro-growth*, *pro-poor* dan *pro-job* melalui percepatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

Pembangunan daerah merupakan kunci utama dalam kerangka pembangunan suatu negara yang menerapkan sistem otonomi daerah. Artinya, pembangunan daerah merupakan satu langkah awal yang kemudian terakumulasi menjadi langkah besar pembangunan nasional suatu negara. Hal ini pula yang berlaku pada pembangunan ekonomi daerah.



Pertumbuhan ekonomi suatu daerah memberi indikasi terjadinya proses pembangunan ekonomi, sehingga menjadi kunci utama dalam kerangka pembangunan suatu negara yang menerapkan otonomi daerah. Artinya pembangunan daerah merupakan satu langkah yang kemudian terakumulasi menjadi langkah besar pembangunan nasional suatu negara.

Secara tradisional pembangunan ekonomi daerah merupakan pembangunan yang berorientasi kepada pertumbuhan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah memberi indikasi terjadinya proses pembangunan ekonomi, meski belakangan ini orientasi pembangunan ekonomi lebih menekankan kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat luas. Orientasi kesejahteraan inilah yang membuat pembangunan ekonomi menjadi lebih bermakna tidak sekedar pertumbuhan, tetapi lebih menekankan pertumbuhan yang berkualitas yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat.

Di sisi lain dampak dari pembangunan terhadap peningkatan kesejahteraan, biasanya ditandai dengan terpenuhinya beberapa kondisi, seperti pertumbuhan ekonomi yang positif, menurunnya tingkat kemiskinan, menurunnya ketimpangan pendapatan, menurunnya tingkat pengangguran, meningkatnya angka partisipasi kerja dan lain sebagainya. Namun demikian, dalam proses pembangunan daerah banyak masalah yang muncul baik dalam pelaksanaan maupun masalah yang mendasar. Masalah pokok dalam pembangunan daerah terletak pada penekanan kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan dan sumber daya fisik.

Melihat hal hal tersebut diatas, Kota Banjarbaru sebagai salah satu dari daerah otonom dengan segala kekhasan lokal dan potensinya memiliki sejarah tersendiri dalam proses perjalanan pembangunannya. Perkembangan pembangunan termasuk di dalamnya pembangunan ekonomi maupun sosial menjadi tanggung jawab pemerintah Kota Banjarbaru bersama masyarakat untuk mengoptimalkan segala daya dan upaya dalam menggali sekaligus mengembangkan



sumber daya dan potensi ekonomi. Oleh karena itu, sudah selayaknya apabila pembangunan daerah membutuhkan asupan data yang dapat menunjang terciptanya perencanaan yang komprehensif. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Banjarbaru bersama *stakeholder* terkait berusaha menyediakan data yang dapat digunakan sebagai bahan perencanaan dalam membuat berbagai kebijakan pembangunan.

Melihat betapa pentingnya ketersediaan data dalam melakukan berbagai perencanaan dan evaluasi pembangunan regional, maka Pemerintah Kota Banjarbaru bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik Kota Banjarbaru melakukan berbagai penyediaan data yang dapat digunakan dalam menunjang analisis terhadap proses pelaksanaan program pembangunan. Usaha ini diantaranya dengan menyusun publikasi **Indikator Makro Kota Banjarbaru Tahun 2019** sebagai bahan dan dokumentasi data yang bersifat series dalam menunjang proses perencanaan dan evaluasi pembangunan di wilayah Kota Banjarbaru.

1.1. Maksud dan Tujuan Penulisan

Publikasi ini akan memberikan potret hasil pembangunan ekonomi daerah Kota Banjarbaru dalam beberapa tahun terakhir sampai dengan kondisi data di tahun 2018. Bagi pemerintah daerah, tentunya publikasi ini dapat menjadi pertimbangan dalam perencanaan pembangunan ekonomi daerah. Dengan melihat PDRB misalnya, pemerintah daerah dapat mengetahui lapangan usaha yang menjadi penyokong utama ekonomi daerah. Selain itu juga dapat melihat lapangan usaha yang perlu mendapat perhatian lebih agar kinerjanya terus dapat ditingkatkan. Sementara itu indikator-indikator lain seperti kemiskinan, ketimpangan perkembangan harga dan ketenagakerjaan juga berperan penting dalam melihat kondisi makro ekonomi regional Kota Banjarbaru baik dari perkembangan maupun posisinya terhadap Provinsi Kalimantan Selatan. Sedangkan bagi masyarakat lainnya, publikasi ini dapat bermanfaat sebagai penunjang berbagai



kepentingan yang berkaitan dengan perekonomian dan pembangunan daerah Kota Banjarbaru.

1.2. Metodologi

Untuk mencapai maksud dan tujuan seperti disebutkan di atas, maka kegiatan penyusunan Indikator Makro Kota Banjarbaru Tahun 2019 ditempuh melalui pendekatan:

1. Studi kepustakaan, untuk memperoleh gambaran mengenai sistem ekonomi regional, perencanaan pembangunan regional, dan berbagai hal yang terkait dengan indikator makro.
2. Pengumpulan data-data dari berbagai sumber, untuk memperoleh data yang lebih rinci tentang produksi, harga, nilai tambah bruto, data inflasi, data pengangguran, kemiskinan dan kesenjangan pendapatan.
3. Melakukan analisis statistik deskriptif berdasarkan data-data kuantitatif, sehingga dapat dikaji secara lebih detail terhadap berbagai indikator Kota Banjarbaru.

1.3. Sistematika Penulisan

Indikator Makro Tahun 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I

Pendahuluan

Merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang, maksud dan tujuan serta kegunaan penulisan, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan.

BAB II

Gambaran Umum Kota Banjarbaru

Menguraikan tentang gambaran umum Kota Banjarbaru secara keseluruhan.

BAB III

Perkembangan Penduduk Kota Banjarbaru

Menguraikan tentang perkembangan penduduk Kota Banjarbaru.



BAB IV

Perkembangan Perekonomian Kota Banjarbaru

Menguraikan tentang perekonomian Kota Banjarbaru secara garis besar yang dilihat dari indikator perekonomian seperti Pertumbuhan Ekonomi, Struktur Ekonomi, PDRB Perkapita Penduduk.

BAB V

Perkembangan Statistik Harga

Menguraikan tentang keadaan perkembangan harga komoditi barang dan jasa yang termasuk dalam komoditi penghitungan inflasi yang dicerminkan oleh Indeks Harga Konsumen (IHK) dan Inflasi Kota Banjarmasin.

BAB VI

Tabungan dan Investasi

Menguraikan tentang tabungan dan investasi yang terjadi di wilayah Kota Banjarbaru.

BAB VII

Ketimpangan Pendapatan

Menguraikan tentang kesejahteraan rakyat dilihat dari beberapa indikator diantaranya tentang distribusi pendapatan yang dilihat dari angka *Gini Ratio*, Kriteria Bank Dunia dan Kurva Lorenz.

BAB VIII

Perkembangan Data Kemiskinan

Menguraikan tentang kesejahteraan rakyat dilihat dari beberapa indikator diantaranya tentang kemiskinan yang dilihat dari Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan.

BAB IX

Perkembangan Ketenagakerjaan

Menguraikan tentang angkatan kerja yang ada di Kota Banjarbaru dilihat dari indikator ketenagakerjaan seperti Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Daya Serap Tenaga Kerja, Produktivitas Tenaga Kerja dan Tingkat Pengangguran.



BAB X

Indeks Pembangunan Manusia

Menguraikan tentang Indeks Pembangunan Manusia (IPM) beserta komponen-komponennya dengan metode baru penghitungan IPM.

BAB II

GAMBARAN UMUM



KOTA BANJARBARU

"GAWI SABARATAAN (BEKERJA SEMUA)"

**DASAR HUKUM
BERDIRI KOTA BANJARBARU
UU NOMOR 9 TAHUN 1999**



LETAK GEOGRAFIS
3°25'40"LS - 3°28'37" LS
114°41'22"BT - 114°54'25" BT

**RATA-RATA CURAH
HUJAN TAHUN 2018
SEBESAR 209,7 mm**



**BERDASARKAN BMKG,
SUHU UDARA BERKISAR
20,2°C - 36,6°C**

**KELEMBAPAN UDARA
RELATIF TINGGI
RATA-RATA BERKISAR
76% SAMPAI 88%**



**TERDIRI DARI
5 KECAMATAN**



**MASING-MASING
KECAMATAN
4 KELURAHAN**



GAMBARAN UMUM KOTA BANJARBARU

2.1. Sejarah Kota Banjarbaru

Wilayah Banjarbaru sekarang, dulunya adalah perbukitan di pinggiran Kota Martapura yang dikenal dengan nama Gunung Apam. Daerah Gunung Apam dikenal sebagai daerah persitirahatan buruh-buruh penambang intan selepas menambang di Cempaka. Pada era tahun 1950-an, Gubernur dr. Murdani dibantu seorang perencana Van der Pijl merancang Banjarbaru sebagai Ibukota Provinsi Kalimantan. Namun pada perjalanan selanjutnya, perencanaan ini terhenti sampai pada perubahan status Kota Banjarbaru menjadi Kota Administratif.

Nama banjarbaru sedianya hanyalah nama sementara yang diberikan Gubernur dr. Murjani, untuk membedakan dengan Kota Banjarmasin, yaitu kota baru di Banjar. Namun akhirnya melekat nama Banjarbaru sampai sekarang. Sebagai kota administratif, Kota Banjarbaru berada dalam lingkungan Kabupaten Banjar, dengan ibukotanya Martapura. Jadi Kota Banjarbaru merupakan pemekaran dari Kabupaten Banjar.

Kota Banjarbaru berdiri berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 1999. Lahirnya UU tersebut menandai berpisahnya Kota Banjarbaru dari Kabupaten Banjar yang selama ini merupakan daerah administrasi induk. Kota Banjarbaru yang sebelumnya berstatus sebagai Kota Administratif, sempat berpredikat sebagai kota administratif tertua di Indonesia.

Kini, jumlah penduduk di Kota Banjarbaru terus berkembang dengan adanya perpindahan penduduk dari luar Kota Banjarbaru, baik dari Kalimantan sendiri



maupun dari luar Kalimantan. Perkembangan penduduk ini beriringan dengan semakin terbukanya wilayah Kota Banjarbaru, baik untuk kawasan permukiman serta Bandar Udara Syamsudin Noor maupun peruntukan yang lain.

Cikal bakal lahirnya Kota Banjarbaru merupakan gagasan dari Gubernur dr. Murdjani pada tahun 1951. Pada waktu itu, ketika dr. Murdjani memimpin apel di halaman gubernuran Banjarmasin, hujan turun dengan derasnya sehingga membuat halaman gubernuran “calap”. Oleh karenanya, dr. Murdjani memerintahkan untuk merancang Banjarbaru sebagai alternatif ibukota Kalimantan Selatan. Sebelum berdiri sebagai sebuah kota tersendiri, sejak tahun 1966 sampai dengan tahun 1999, Banjarbaru merupakan kota administratif yang tergabung ke dalam Kabupaten Banjar. Pada 17 Agustus 1968, penetapan status Banjarbaru sebagai Kota Administratif.

Pada tanggal 27 April 1999 dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999, Kota Banjarbaru resmi menjadi sebuah kota dalam wilayah administrasi Provinsi Kalimantan Selatan. Berdasarkan SK Gubernur KDH Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 29 Mei No 10/Pem-570-3-3 pada saat itu wilayah Banjarbaru hanya meliputi 7 desa. Dalam perjalanannya, wilayah Kota Banjarbaru mengalami perkembangan yaitu terdiri atas 3 kecamatan dengan 12 kelurahan. Kemudian pada tahun 2004 berdasarkan Perda No 2 Tahun 2004 tanggal 26 Februari 2004 terbentuklah 5 kelurahan baru dan dengan Perda No 3 Tahun 2007 kembali dibentuk 3 kelurahan baru sehingga secara keseluruhan terdapat 20 kelurahan. Berikutnya dengan Perda No 4 Tahun 2007 wilayah Kota Banjarbaru terbagi menjadi 5 kecamatan. Banjarbaru bukan merupakan ibukota provinsi, namun sebagian impian dr. Murdjani menjadi kenyataan seiring dengan pemindahan pusat pemerintahan dari Kota Banjarmasin ke Kota Banjarbaru.

2.2. Lambang Daerah dan Motto



❖ **Bentuk bingkai** seperti perisai menggambarkan sebagai alat pelindung dalam mencapai cita-cita luhur Bangsa Indonesia (Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia) dan Pembangunan Nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

- ❖ **Bintang bersudut lima** adalah Pancasila sebagai Dasar Falsafah dan Pandangan Hidup Bangsa Indonesia.
- ❖ **Tulisan BANJARBARU** adalah nama Kota Administratif Banjarbaru (kini Kota Banjarbaru).
- ❖ **Petak/Kotak yang terdapat pada pilar kiri dan kanan masing-masing berjumlah 11 buah.** Pilar dan petak menggambarkan tanggal dan bulan serta tahun berdirinya Kota Administratif Banjarbaru, yaitu tanggal 11 dan bulan November. Sedangkan jumlah petak pada pilar kiri dan kanan adalah 22 menggambarkan tahun berdirinya Kota Administratif Banjarbaru, yaitu 1975 ($1+9+7+5=22$).
- ❖ **Pilar kiri dan kanan** juga menggambarkan Banjarbaru sebagai jalur masuk (transportasi) ke Kalimantan Selatan. Sebagaimana terdapatnya Bandar Udara Syamsuddin Noor di Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru.
- ❖ **Alat Linggangan** adalah menggambarkan pendulangan Intan Tradisional Cempaka yang terdapat di Kecamatan Cempaka dan merupakan obyek wisata budaya, dan sejarah di Kota Administratif Banjarbaru.
- ❖ **Museum Negeri Provinsi Kalimantan Selatan Lambung Mangkurat (sebagai obyek wisata, sejarah, dan budaya) yang diapit rumah** menggambarkan Kota Administratif Banjarbaru sebagai Pusat Pemerintahan dan Pusat Pemukiman.

- 
- ❖ **Buku** adalah menggambarkan Banjarbaru sebagai Kota Pelajar dan Pusat Pendidikan, karena terdapatnya prasarana dan sarana penunjang pendidikan yang memadai dari berbagai disiplin ilmu.
 - ❖ **Roda (gir)** menggambarkan roda industri dan perdagangan, karena di Kota Administratif Banjarbaru sangat potensial menjadi Daerah Industri dan Perdagangan.
 - ❖ **Pita berwarna hijau yang bertuliskan motto Kota Administratif Banjarbaru** sebagai Pusat Pemerintahan, Pusat Pendidikan, Pusat Industri, dan Pusat Pemukiman, merupakan daerah/wilayah yang Indah, Aman, dan Nyaman untuk mencapai kesejahteraan.

Warna yang digunakan, terdiri dari 5 (lima) warna utama:

- ❖ Warna kuning : Keluhuran, keagungan
- ❖ Warna putih : Kesucian
- ❖ Warna coklat : Keilmuan, keulamaan, keteguhan dan ketangguhan
- ❖ Warna hijau : Kesuburan, kehijauan, kerezekian
- ❖ Warna hitam : Kerohanian, keimanan, keteguhan hati.

Motto Gawi Sabarataan yang menjadi tulisan sarat makna pada lambang Kota Banjarbaru berarti:

- ❖ Ditinjau dari aspek kerukunan dan persatuan, gawi Sabarataan menggambarkan suatu kegiatan yang dilaksanakan secara bersama-sama (Pemerintah dan masyarakat) dimana setiap unsur menyadari tugas dan tanggung jawab masing-masing.
- ❖ Ditinjau dari aspek masa depan, Gawi Sabarataan secara operasional dapat memacu motivasi mencapai masa depan yang lebih baik.
- ❖ Ditinjau dari etos kerja, Gawi Sabarataan menjadi inspirasi masyarakat Banjarbaru untuk bekerja/berkarya sesuai dengan tugas pokok dan peran masing-masing.

- 
- ❖ Pernyataan tekad dan semangat seluruh lapisan masyarakat beserta pemerintah untuk membangun dengan potensi yang ada dalam rangka mewujudkan kehidupan adil, makmur, dan sejahtera di bawah lindungan dan ridho Tuhan Yang Maha Esa.
 - ❖ Ditinjau dari segi ajaran agama manusia adalah pemegang amanat Tuhan sebagai penguasa yang harus memakmurkan bumi dan menjaga kelestariannya sesuai dengan fungsi dan peran masing-masing.

2.3. Visi dan Misi Kota Banjarbaru

Pada hakikatnya, visi kota mengadopsi dari visi walikota/wakil walikota terpilih, komitmen bersama merepresentasikan semua komponen masyarakat. Visi juga menjadi milik bersama dan diyakini oleh seluruh aparatur pemerintah kota dan masyarakat di Kota Banjarbaru. Visi Kota Banjarbaru 2016-2021 adalah :

“TERWUJUDNYA BANJARBARU SEBAGAI KOTA PELAYANAN YANG BERKARAKTER”

KOTA PELAYANAN adalah Kota yang memberikan pelayanan secara optimal kepada warga masyarakat dan yang berkunjung di Kota Banjarbaru.

BERKARAKTER Terdiri Atas Dua Aspek Penting yaitu :

1. Sumber daya manusia yang berkarakter, yaitu terciptanya sumber daya manusia yang sehat, mempunyai etos kerja tinggi dan berakhlak mulia berdasarkan nilai-nilai religius.
2. Kota yang berkarakter, yaitu sebuah kota yang mempunyai ciri khas sebagai kota yang tertata/direncanakan (*urban design*) sehingga menjadi tempat hunian yang indah, aman dan nyaman yang berwawasan lingkungan.



Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi. Dalam merumuskan Misi Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021 mengacu kepada RPJPD Kota Banjarbaru dan Misi Kepala Daerah terpilih. Misi Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang terdidik, sehat, berdaya saing dan berakhlak mulia.
2. Meningkatkan penyediaan infrastruktur perkotaan yang merata, cerdas dan berwawasan lingkungan
3. Memperkuat kemandirian, peningkatan kerjasama investasi, penyediaan prasarana dan sarana perekonomian, peningkatan kelembagaan dan peluang kewirausahaan.
4. Melaksanakan reformasi birokrasi yang berorientasi kepada pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis teknologi informasi.
5. Memperkuat cipta kondisi masyarakat yang aman, nyaman dan tertib.

2.4.Prioritas dan Tujuan Pembangunan Kota Banjarbaru

Ada 5 (lima) prioritas pembangunan daerah yang tertuang pada RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021 agar Pembangunan Kota Banjarbaru dalam 5 tahun kedepan dapat lebih terarah dan lebih fokus yaitu:

1. Banjarbaru dengan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas
2. Banjarbaru dengan infrastruktur kota yang cerdas
3. Banjarbaru daerah tujuan investasi
4. Banjarbaru sebagai kota pelayanan yang berkarakter
5. Banjarbaru aman, tertib dan nyaman



Berdasarkan visi, misi dan isu-isu strategis yang ada, maka ditetapkan tujuan yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 tahun adalah, sebagai berikut:

Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan

1. Meningkatkan derajat kesehatan
2. Meningkatkan Pelestarian Seni, Budaya dan Prestasi di Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan
3. Meningkatkan kualitas jalan, jembatan dan drainase
4. Meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman yang layak huni
5. Meningkatkan sarana prasarana dan sistem transportasi yang aman dan nyaman
6. Meningkatkan sarana prasarana Teknologi Informasi
7. Meningkatkan Kualitas Sanitasi, Air dan Udara
8. Meningkatkan kemandirian kota
9. Meningkatkan investasi
10. Meningkatkan sarana prasarana perekonomian
11. Meningkatkan kewirausahaan
12. Meningkatkan pelaksanaan agenda reformasi birokrasi
13. Meningkatkan pelayanan publik
14. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang berbasis teknologi informasi
15. Meningkatkan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat
16. Meningkatkan budaya tertib
17. Meningkatkan perlindungan Sosial masyarakat
18. Mewujudkan sistem penanggulangan bencana yang efektif

2.5. Kondisi Wilayah Kota Banjarbaru

Secara astronomis, Kota Banjarbaru terletak antara 3°25'40" sampai dengan 3°28'37" Lintang Selatan dan 114°41'22" sampai dengan 114°54'25" Bujur Timur. Kota Banjarbaru berada pada ketinggian 66 feet dpl, dengan wilayah relatif



datar. Dari sisi ketinggian Kota Banjarbaru berada pada ketinggian 0 - 500 m dari permukaan laut, dengan ketinggian 0-7 m (33,49%), 7-25 m (48,46%), 25-100 m (15,15%), 100-250 m (2,55%) dan 250-500 m (0,35%).

Berdasarkan posisi geografisnya, Kota Banjarbaru memiliki batas-batas: sebelah utara dengan Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, sebelah selatan dengan Kabupaten Tanah Laut, sebelah timur Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar, dan sebelah barat Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar.

Wilayah Kota Banjarbaru berada pada ketinggian 0–500 m dari permukaan laut, dengan ketinggian 0–7 m (36,96%), 7-25 m (33,23%), 25-100 m (26,30%), dan 100-500 m (3,51%). Adapun kondisi fisik tanah yang dipergunakan untuk menggambarkan kondisi efektif per tumbuhan tanaman adalah kelerengan, kedalaman efektif tanah, drainase, keadaan erosi tanah, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Klasifikasi kelerengan Kota Banjarbaru adalah kelerengan 0-2% mencakup 88,04% luas wilayah, kelerengan 2-8 % mencakup 8,10 % wilayah, kelerengan 8-15% mencakup 0,35% luas wilayah, sedangkan sisanya kelerengan >15% mencakup 3,51% luas wilayah.
- Klasifikasi kedalaman efektif tanah terbagi dalam empat kelas yaitu kedalaman <30 cm, 30-60 cm, 60-90 cm dan >90 cm. Kota Banjarbaru secara umum mempunyai kedalaman efektif lebih dari 90 cm dimana jenis-jenis tanaman tahunan akan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.
- Drainase di Kota Banjarbaru tergolong baik, secara umum tidak terjadi penggenangan. Namun ada daerah yang tergenang periodik yaitu tergenang kurang dari 6 (enam) bulan, terdapat di Kecamatan Landasan Ulin yang merupakan peralihan daerah rawa (persawahan) di Kecamatan Gambut dan Aluh-Aluh.
- Berdasarkan Peta Kemampuan Tanah Skala 1 : 25.000, erosi tidak terjadi di wilayah Kota Banjarbaru.



Seperti halnya daerah lain dalam wilayah Indonesia, Kota Banjarbaru juga mengenal dua musim yaitu musim kemarau dan penghujan. Keadaan ini berkaitan erat dengan arus angin yang bertiup di Indonesia. Pada bulan Juni sampai dengan September arus angin berasal dari Australia dan tidak banyak mengandung uap air sehingga mengakibatkan musim kemarau di Indonesia. Sebaliknya pada bulan Desember sampai dengan Maret arus angin banyak mengandung uap air yang berasal dari Asia dan Samudera Pasifik setelah melewati beberapa lautan, dan pada bulan-bulan tersebut biasanya terjadi musim hujan. Keadaan seperti ini berganti pada bulan April-Mei dan Oktober-November.

Berdasarkan pemantauan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Banjarbaru pada tahun 2018, suhu udara di Kota Banjarbaru berkisar antara 20,2°C sampai dengan 36,6°C. Suhu udara maksimum tertinggi terjadi pada bulan Oktober (36,6°C) dan suhu minimum terendah terjadi pada September (20,2°C). Selain itu sebagai daerah tropis maka kelembaban udara relatif tinggi dengan rata-rata berkisar antara 76% sampai 88%.

Selama 5 tahun terakhir, curah hujan pada tahun 2018 merupakan curah hujan tertinggi. Rata-rata curah hujan pada tahun 2018 sebesar 209,7 mm dengan jumlah yang terendah terjadi pada bulan Mei (76,0 mm) dan tertinggi terjadi pada bulan Desember (434,3 mm). Rata-rata jumlah hari hujan sebanyak 17,7 dengan jumlah hari hujan terbanyak pada bulan Desember (26 hari), sebaliknya jumlah hari hujan terendah pada bulan September (9 hari). Rata-rata tekanan udara di Kota Banjarbaru tahun 2018 berkisar antara 1.004 mb sampai dengan 1.006,6 mb. Sedangkan rata-rata kecepatan angin sekitar 3,3 knot.

2.6. Potensi Pengembangan Wilayah

Kota Banjarbaru sebagai pusat pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan, sesuai dengan Perda Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Banjarbaru, telah membagi rencana struktur ruang Kota Banjarbaru menjadi :

- 
1. Pusat Pelayanan Kota meliputi :
 - PPK I : pusat pelayanan pemerintahan di Kelurahan Komet dan Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara.
 - PPK II : pusat pelayanan ekonomi di Kelurahan Landasan Ulin Barat dan Kelurahan Landasan Ulin Kecamatan Liang Anggang.
 2. Sub Pusat Pelayanan Kota (Sub PPK) adalah :
 - Sub PPK I : Sub Pusat pelayanan pemerintahan di Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka.
 - Sub PPK II : Sub Pusat Pelayanan Ekonomi di Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin.
 - Sub PPK III : Sub Pusat Pelayanan Pemerintahan di Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin.
 3. Pusat Lingkungan (PL) terdiri atas kawasan dengan fungsi perkantoran pemerintah, perdagangan dan jasa, serta pelayanan sosial dan budaya yang tersebar di 5 kecamatan.

BAB III PERKEMBANGAN PENDUDUK



JUMLAH PENDUDUK

KOTA BANJARBARU TAHUN 2018

SEBANYAK **255.597** JIWA

KEPADATAN PENDUDUK

KOTA BANJARBARU



TAHUN 2018 MENCAPAI

668 JIWA PER KM2

ANGKA KETERGANTUNGAN



TAHUN 2018 SEBESAR

44,42 PERSEN

STRUKTUR UMUR



POPULASI PENDUDUK
TAHUN 2018 DIDOMINASI OLEH
PENDUDUK USIA PRODUKTIF
SEBANYAK **69,24 PERSEN**



PERKEMBANGAN PENDUDUK KOTA BANJARBARU

Keberhasilan suatu pembangunan sangat tergantung pada penduduknya, terlebih jika didukung oleh jumlah penduduk yang besar, berkualitas dan produktif yang dapat menjadi sumber potensi dalam pembangunan itu sendiri. Akan tetapi, jumlah penduduk yang besar tersebut tidak dapat sepenuhnya menjamin keberhasilan pembangunan jika tidak didukung oleh perencanaan program-program dan kebijakan yang dapat meningkatkan kualitas penduduknya, tidak hanya yang bersifat mengendalikannya saja.

Perkembangan jumlah penduduk dapat terjadi karena disebabkan oleh penambahan dan pengurangan jumlah penduduk akibat dari adanya kelahiran (natalitas), kematian (mortalitas) dan perpindahan penduduk (migrasi). Kelahiran dan kematian adalah faktor pertumbuhan alami, sedangkan perpindahan penduduk merupakan faktor pertumbuhan yang non alami.

Sejalan dengan itu diperlukan data-data kependudukan yang akurat dan tepat waktu untuk mendukung setiap program peningkatan kualitas agar jumlah penduduk yang besar tersebut tidak hanya menjadi beban dalam pembangunan. Pemerintah sangat membutuhkan data jumlah penduduk dan karakteristiknya, misal untuk merencanakan penyediaan sarana umum, perumahan, tempat ibadah, fasilitas kesehatan dan tempat rekreasi. Sementara para pelaku bisnis memerlukan data kependudukan untuk keperluan rencana produksi, pemasaran dan rekrutmen karyawan.

3.1 Jumlah, Perkembangan dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Penduduk Kota Banjarbaru pada tahun 2018 berjumlah 255.597 jiwa yang terdiri dari 131.317 jiwa laki-laki dan 124.280 perempuan. Pertumbuhan penduduk Kota Banjarbaru dari tahun 2014 sampai 2018 berkisar 2,89-3,08 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2014 yang mencapai 3,08 persen. Fenomena ini didasari oleh mobilitas penduduk Kota Banjarbaru untuk berbagai alasan seperti bekerja atau sekolah di wilayah Kota Banjarbaru.

Salah satu indikator kependudukan yang dapat menggambarkan komposisi penduduk menurut jenis kelamin yaitu rasio jenis kelamin. Rasio jenis kelamin merupakan perbandingan jumlah penduduk laki-laki per 100 orang penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin Kota Banjarbaru pada tahun 2018 sebesar 105,66 artinya pada tahun 2018 dari 100 orang penduduk perempuan yang ada di Kota Banjarbaru terdapat 105 sampai 106 orang penduduk laki-laki.

Tabel 3.1 Indikator Kependudukan Kota banjarbaru Tahun 2014-2018

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jumlah Penduduk	227.500	234.371	241.369	248.423	255.597
Laki-laki	116.730	120.171	123.889	127.479	131.317
Perempuan	110.770	114.199	117.480	120.944	124.280
Laju Pertumbuhan Penduduk	3,08	3,02	2,99	2,92	2,89
Rasio Jenis Kelamin	105,38	105,23	105,46	105,40	105,66
Jumlah Rumah Tangga	63.681	66.744	69.956	73.323	76.852
Rata-rata Anggota Rumah Tangga	4	4	3	3	3

Sumber: BPS Kota Banjarbaru

Berdasarkan data hasil sensus penduduk dan penghitungan angka proyeksi dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Kota Banjarbaru selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010 penduduk Kota Banjarbaru mencapai 201.222 jiwa, meningkat sebanyak 76.847 jiwa atau 61,78 persen dibanding tahun 2000 yang hanya 124.375 jiwa. Sedangkan berdasarkan penghitungan angka proyeksi periode tahun 2010-2020, jumlah penduduk Kota Banjarbaru pada tahun 2018 sebesar 255.597 jiwa.

Pada tahun 2018, jika dilihat menurut kecamatan, penduduk yang paling banyak berada di Kecamatan Landasan Ulin, yaitu sebanyak 65.784 jiwa, disusul Banjarbaru Utara 54.555 jiwa dan Banjarbaru Selatan 54.346 jiwa, sedangkan yang paling sedikit adalah di Kecamatan Cempaka dan Liang Anggang masing-masing hanya mencapai 35.814 jiwa dan 45.098 jiwa.

Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Kota Banjarbaru Tahun 2014-2018
Menurut Kecamatan

No.	Kecamatan	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(7)
1	Landasan Ulin	58.749	60.488	62.247	64.006	65.784
2	Liang Anggang	39.691	40.992	42.330	43.695	45.098
3	Cempaka	32.075	32.990	33.921	34.859	35.814
4	Banjarbaru Utara	48.664	50.108	51.577	53.056	54.555
5	Banjarbaru Selatan	48.321	49.793	51.294	52.807	54.346
Jumlah		227.500	234.371	341.369	248.423	255.597

Sumber: BPS Kota Banjarbaru



3.2 Kepadatan Penduduk

Kota Banjarbaru memiliki luas sebesar 371,38 Km² atau 0,88 persen dari luas Provinsi Kalimantan Selatan, Kota Banjarbaru berjarak 38 Km ke arah Utara dari ibukota Propinsi Kalimantan Selatan dan mempunyai 5 kecamatan yang terdiri dari 20 kelurahan.

Sebesar 39,50 persen porsi luas Kota Banjarbaru berada di kecamatan Cempaka dengan memberikan porsi terluas luas sebesar 146,70 Km² atau meliputi 39,50 persen dari total luas Kota Banjarbaru, diikuti Landasan Ulin dan Liang Anggang, masing-masing mencapai 92,42 Km² dan 85,86 Km². Sedangkan kecamatan yang luas wilayahnya terkecil adalah Kecamatan Banjarbaru Selatan yaitu 21,96 Km² atau hanya meliputi 5,91 persen dari total luas Kota Banjarbaru.

Hubungan antara luas wilayah di suatu kota dengan jumlah penduduk dapat dilihat melalui kepadatan penduduk. Secara matematis kepadatan penduduk didapatkan melalui jumlah penduduk di suatu wilayah dibagi dengan luas wilayah tersebut. Kepadatan penduduk menggambarkan banyaknya penduduk (jiwa) yang berada pada suatu wilayah tiap satu km². Semakin tinggi kepadatan penduduk menunjukkan semakin padat/banyak jiwa yang ada di wilayah tersebut, sebaliknya semakin rendah kepadatan penduduknya menunjukkan semakin jarang penduduknya.

Adapun tingkat kepadatan penduduk di Kota Banjarbaru, sebagaimana yang nampak pada Tabel 3.3, pada tahun 2018 rata-rata mencapai 668 jiwa per Km², sedangkan di tingkat kecamatan yang paling tinggi ada di Kecamatan Banjarbaru Selatan sebesar 2.475 jiwa per Km², disusul Banjarbaru Utara 2.232 jiwa. Adapun wilayah kecamatan yang paling jarang penduduknya adalah Kecamatan Cempaka yang mencapai 244 jiwa per Km².

Tabel 3.3 Luas Wilayah, Jumlah Rumah Tangga, Jumlah Penduduk, dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Banjarbaru Tahun 2018

No.	Kecamatan	Luas (Km ²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk per Km ²
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Landasan Ulin	92,42	65.784	712
2	Liang Anggang	85,86	45.098	525
3	Cempaka	146,7	35.814	244
4	Banjarbaru Utara	24,44	54.555	2.232
5	Banjarbaru Selatan	21,96	54.346	2.475
Banjarbaru		371,38	255.597	688

Sumber: BPS Kota Banjarbaru

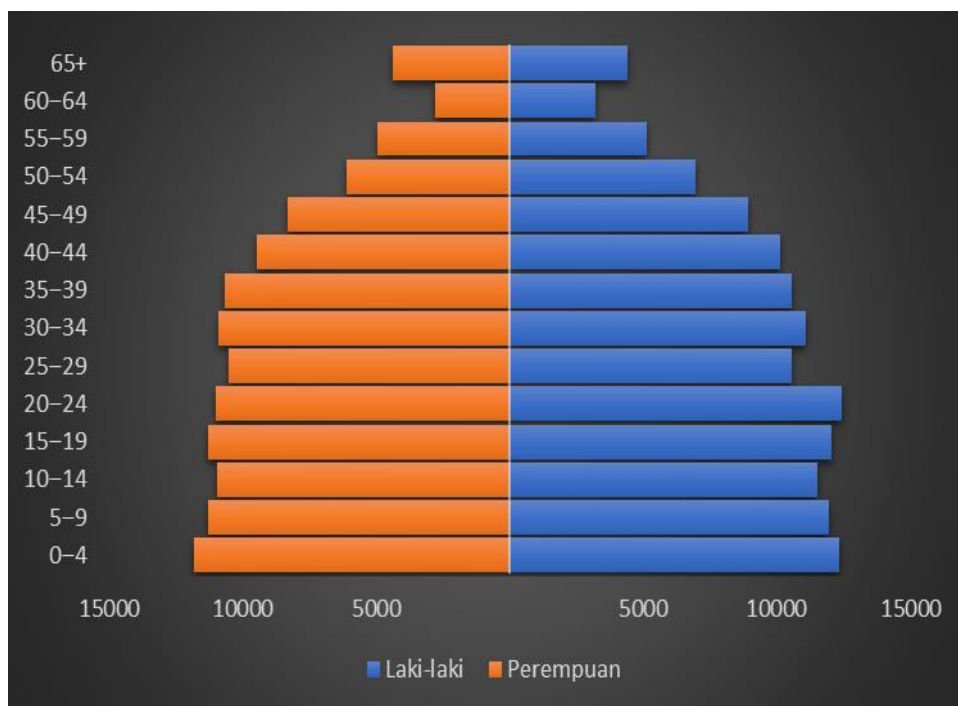
3.3 Komposisi Penduduk

Piramida penduduk sering dipandang sebagai cara yang paling efektif untuk ilustrasi grafis yang menggambarkan usia dan distribusi jenis kelamin penduduk. Dengan melihat gambar piramida penduduk, secara sekilas kita mengetahui struktur umur penduduk dan implikasinya terhadap tuntutan pelayanan kebutuhan dasar penduduk (baik balita, remaja, dewasa, laki-laki dan perempuan dan lansia) sekaligus melihat potensi tenaga kerja serta membayangkan kebutuhan akan tambahan kesempatan kerja yang harus diciptakan.

Indikator kependudukan yang juga sangat penting untuk dicermati adalah komposisi atau struktur penduduk. Komposisi penduduk dalam arti demografi adalah komposisi penduduk menurut jenis kelamin dan umur. Komposisi atau struktur penduduk dapat dilihat dari jenis kelamin dan dapat pula dilihat dari struktur umur serta kombinasi antara keduanya. Keduanya memiliki arti strategis dalam hubungannya dengan berbagai aspek kependudukan lainnya seperti fertilitas, mortalitas, migrasi dan masalah-

masalah ketenagakerjaan. Indikator ini dapat digunakan untuk memprioritaskan kebijakan yang perlu diambil dalam suatu wilayah tertentu.

Grafik 3.1 Piramida Penduduk Kota Banjarbaru Tahun 2018



Sumber: BPS Kota Banjarbaru

Komposisi penduduk Kota Banjarbaru didominasi oleh penduduk muda/dewasa. Kelompok usia produktif (Kelompok usia 25-39 tahun) terlihat sangat mendominasi, dimana kelompok usia ini adalah mereka yang terlibat aktif dalam lapangan pekerjaan. Mereka pada umumnya telah menyelesaikan pendidikan tinggi maupun sudah berumah tangga. Kondisi seperti ini tentunya harus menjadi perhatian pemerintah dalam mengambil langkah-langkah kebijakan dibidang kependudukan utamanya ketersediaan lapangan pekerjaan sehingga diharapkan bisa menjadi penggerak roda perekonomian, bukan malah sebaliknya menjadi beban pembangunan.

**Tabel 3.4 Angka Ketergantungan (*Dependency Ratio*)
Di Kota Banjarbaru Tahun 2014-2018**

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Angka Ketergantungan	45,04	44,88	41,61	44,58	44,42
Angka Ketergantungan Muda	40,69	40,33	37,02	39,76	39,45
Angka Ketergantungan Tua	4,35	4,55	4,58	4,82	4,98

Sumber: BPS Kota Banjarbaru

Rasio ketergantungan (*Dependency Ratio*) merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tinggi persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Para ahli demografi menyatakan bahwa suatu wilayah yang angka ketergantungannya dibawah 50 maka wilayah tersebut masuk dalam fase Bonus Demografi. Bonus Demografi dapat memberikan berkah bagi Kota Banjarbaru oleh karenanya harus ada strategi dalam menghadapi bonus demografi tersebut. Strategi tersebut meliputi empat aspek utama yaitu peningkatan kualitas pendidikan, kualitas kesehatan, penyediaan lapangan kerja yang cukup, dan konsistensi pemerintah dalam menekan angka fertilitas.

Bonus Demografi yang dimaksud yaitu ketika suatu wilayah memiliki jumlah penduduk usia produktif dengan jumlah melimpah, yaitu sekitar 2/3 dari jumlah penduduk keseluruhan. Bonus demografi dapat dilihat dengan parameter *Dependency Ratio* (angka beban ketergantungan) yang cukup rendah, yaitu mencapai 44.



Angka ketergantungan penduduk Kota Banjarbaru pada tahun 2018 sebesar 44,42 persen. Artinya setiap 100 orang penduduk usia produktif harus menanggung sekitar 44 orang penduduk usia tidak produktif. Populasi penduduk produktif yang besar akan bermanfaat sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Dengan tersedianya penduduk produktif yang siap kerja dengan jumlah yang besar menjadi modal awal dalam pembangunan ekonomi. Selanjutnya tinggal bagaimana pemerintah Kota Banjarbaru mampu menyiapkan angkatan kerja yang berkualitas dan lapangan kerja yang cukup untuk menampung mereka.

Pemerintah perlu mempersiapkan angkatan kerja yang mampu merespon permintaan pasar tenaga kerja. Dengan angkatan kerja yang terdidik dan terampil maka berapapun jumlah angkatan kerja yang tersedia akan bisa terserap dalam pasar tenaga kerja. Namun yang tak bisa dilupakan adalah bagaimana pemerintah menambah lapangan kerja untuk menampung mereka. Dengan tersedianya lapangan kerja yang cukup dan sesuai dengan keahlian pencari kerja, maka populasi anak muda yang besar akan benar-benar produktif dan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi Kota Banjarbaru.

Jaminan tersedianya lapangan kerja yang sesuai dengan keahlian pencari kerja, akan memungkinkan anak-anak muda Kota Banjarbaru mampu mengembangkan segala potensi yang dimiliki. Dengan memperluas kesempatan kerja, akan memperluas usaha dan produksi yang dihasilkan. Sehingga hal tersebut dapat mengerakkan ekonomi dan meningkatkan pendapatan.

Berdasarkan hasil proyeksi SP2010, dapat dilihat bahwa struktur umur penduduk Kota Banjarbaru pada tahun 2018 berbentuk piramida yang mengecil ke atas seperti yang terlihat pada Gambar 3.1. Bila kita cermati lebih jauh antara penduduk laki-laki dan perempuan terjadi perbedaan jumlah penduduk pada semua jenjang usia, dimana semua jenjang usia didominasi oleh penduduk berjenis kelamin laki-laki. Meskipun perbedaannya tidak terlalu jauh, namun dapat memberikan gambaran bahwa pada kelompok usia ini laki-laki lebih mampu mempertahankan kehidupannya.

Penduduk menurut kelompok usia diatas dapat disederhanakan lagi menjadi tiga kelompok yaitu usia muda (0 – 14 tahun), usia produktif (15 – 64 tahun) dan usia tua (65+ lebih) dapat diketahui bahwa populasi Kota Banjarbaru pada tahun 2018 didominasi oleh penduduk usia produktif sebanyak 69,24 persen. Jika dilihat menurut jenis kelamin, persentase penduduk usia produktif laki-laki (69,38 persen) sedikit lebih tinggi dibandingkan perempuan (69,09 persen). Sedangkan yang tergolong usia muda tahun 2018 mencapai 27,31 persen dan usia tua sekitar 3,45 persen.

Tabel 3.5 Persentase Penduduk Menurut Kelompok Usia Di Kota Banjarbaru Tahun 2018

Kelompok Usia (tahun)	Laki-laki		Perempuan		Total	
	Jumlah	(%)	Jumlah	(%)	Jumlah	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Usia Muda (0 – 14)	35.777	27,24	34.035	27,39	69.812	27,31
Usia Produktif (15-64)	91.107	69,38	85.870	69,09	176.977	69,24
Usia Tua (65 +)	4.433	3,38	4.375	3,52	8.808	3,45
Jumlah	131.317	100	124.280	100	255.597	100

Sumber: BPS Kota Banjarbaru

BAB IV

PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN

PDRB PERKAPITA
TAHUN 2018 SEBESAR

34,19 JUTA RUPIAH



PERTUMBUHAN
PDRB PERKAPITA RATA-RATA

8,84 PERSEN SETIAP TAHUNNYA

PERTUMBUHAN PDRB
KOTA BANJARBARU



STRUKTUR EKONOMI

SEKTOR PRIMER

5,81%

SEKTOR TERSIER

71,01%

SEKTOR SEKUNDER

23,18%





PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN KOTA BANJARBARU

Pembangunan ekonomi mempunyai tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, pemeratakan pendapatan, dan memperluas kesempatan kerja, serta mencapai target-target yang telah ditetapkan baik dalam lingkup regional maupun nasional. Pemerintah daerah dituntut untuk siap menjalankan tugas pemerintahan dan pembangunan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Pemerintah daerah harus mampu bersikap kreatif dan inovatif dalam menggali potensi ekonomi yang terdapat di daerah, sehingga dapat membuka ekonomi yang baru. Pembangunan kota Banjarbaru dalam kurun waktu lima tahun terakhir dilihat dari sisi ekonomi menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan dengan rata-rata pertumbuhan diatas 6 persen dan selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Kondisi dan arah ekonomi Kota Banjarbaru adalah salah satu motivasi yang menggerakkan pelaku ekonomi dan *stakeholders* di Kota Banjarbaru. Meskipun tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi masa depan, *stakeholders*, dalam hal ini pemerintah, dan pelaku ekonomi selalu mencari tanda-tanda perubahan yang mungkin mempengaruhi perekonomian di masa depan melalui indikator-indikator ekonomi yang diantaranya dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Ketika indikator-indikator ekonomi yang rilis melebihi atau gagal dari ekspektasi, mereka bereaksi berdasarkan indikator-indikator ekonomi yang dirilis tersebut.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nenek moyang indikator ekonomi. Sebagai pengukuran agregat dari total produksi ekonomi untuk suatu daerah atau regional, PDRB mencerminkan nilai pasar dari semua barang dan

layanan yang dihasilkan oleh seluruh pelaku ekonomi selama periode tertentu. PDRB menyajikan banyak indikator dengan sangat komprehensif dan rinci yang yang ditunggu-tunggu oleh para pelaku ekonomi dan pemerintah.

Tabel 4.1. Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan dan Berlaku dan Pertumbuhan Ekonomi Kota Banjarbaru Tahun 2014 - 2018 (Miliar Rupiah)

(1)	(2)	(3)	(4)
2014	5.641,96	4.462,83	6,68
2015	6.501,43	4.771,07	6,91
2016	7.171,82	5.101,95	6,94
2017*	7.933,47	5.456,87	6,96
2018**	8.737,66	5.833,51	6,90

Sumber: PDRB Kota Banjarbaru Menurut Lapangan Usaha 2014 - 2018

**)Angka Sementara*

***) Angka Sangat Sementara*

Nilai PDRB Kota Banjarbaru atas dasar harga berlaku pada tahun 2018 mencapai 8.737,66 miliar rupiah, meningkat sebesar 804,19 miliar rupiah dibandingkan dengan tahun 2017 yang sebesar 7.933,47 miliar rupiah. Peningkatan pada nominal PDRB ini dipengaruhi oleh inflasi serta peningkatan produksi seluruh lapangan usaha.

Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami kenaikan, dari 5.456,87 miliar rupiah pada tahun 2017 menjadi 5.833,51 miliar rupiah pada tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa selama tahun 2018 Kota Banjarbaru mengalami pertumbuhan ekonomi sekitar 6,90 persen, sedikit melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 6,96 persen. Kenaikan ini murni disebabkan oleh meningkatnya produksi pada seluruh lapangan usaha, tanpa adanya pengaruh inflasi.

Selain dari angka pertumbuhan, kondisi perekonomian daerah juga tercermin dari struktur ekonominya. Adapun struktur perekonomian tersebut



dapat dilihat dari distribusi persentase PDRB lapangan usaha. Besaran angka persentase distribusi masing-masing lapangan usaha akan menunjukkan sektor-sektor apa saja yang berperan penting dalam pembentukan perekonomian.

PDRB tahun 2018 dilakukan berdasarkan penghitungan PDRB tahun dasar 2010, dimana pembagian ekonomi tidak lagi didasarkan pada 9 kategori lapangan usaha perekonomian melainkan 17 kategori seperti yang ditampilkan pada Tabel 4.2. Dari 17 kategori tersebut, ada 4 kategori yang dominan dan berperan besar dalam pembentukan perekonomian Kota Banjarbaru, yaitu Kategori Transportasi dan Pergudangan, Kategori Konstruksi, Kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib, serta Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Keempat kategori ini memberikan kontribusi di atas 10 persen, sedangkan kategori lainnya hanya memberikan kontribusi berkisar antara 0,23 sampai dengan 9,01 persen.

Lapangan usaha perekonomian diklasifikasikan lagi dalam 3 kelompok sektor, yaitu Sektor Primer, Sektor Sekunder, dan Sektor Tersier. Pembagian ini didasarkan pada tingkat pemanfaatan sumber daya alam dalam memproduksi barang/jasa yang dihasilkan. **Sektor primer** mencakup lapangan usaha yang utamanya mengandalkan sumber daya alam dalam proses produksinya, mencakup lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, serta Pertambangan dan Penggalian. Sementara **sektor sekunder** memang masih menggunakan sumber daya alam, namun lebih banyak mengandalkan kemajuan teknologi dan peran sumber daya manusia. Sektor sekunder mencakup lapangan usaha Industri Pengolahan, Pengadaan Listrik dan Gas, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang, serta Konstruksi. Terakhir **sektor tersier** dapat dikatakan sudah tidak menggunakan sumber daya alam dalam proses produksinya, mencakup lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Informasi dan Komunikasi, Jasa Keuangan dan Asuransi, Real Estat, Jasa



Perusahaan, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib, Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, serta Jasa Lainnya.

Kelompok sektor penyumbang terbesar adalah sektor tersier dengan kontribusi 71,01 persen terhadap perekonomian Kota Banjarbaru pada tahun 2018. Hal ini berarti bahwa sebagian besar lapangan usaha di Kota Banjarbaru sudah mengandalkan kemajuan teknologi dan sumber daya manusia dalam proses produksinya, dan tidak lagi menggunakan sumber daya alam sebagai pendukung. Produk yang dihasilkan dominan tidak berwujud seperti jasa-jasa.

Sektor sekunder merupakan penyumbang terbesar kedua dengan kontribusi sebesar 23,18 persen pada tahun 2018. Sedangkan sektor primer merupakan kontributor terkecil yaitu hanya sebesar 5,81 persen di tahun 2018. Hal ini wajar mengingat potensi sumber daya alam di Kota Banjarbaru memang tidak sebesar kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kalimantan Selatan. Sebagai contoh dalam hal sektor pertanian, Kota Banjarbaru hanya memiliki luas lahan sawah sebesar 14,75 persen dibandingkan total luas wilayahnya. Besaran tersebut cukup kecil dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kalimantan Selatan seperti Kabupaten Barito Kuala yang berkarakteristik agraris, dimana persentase lahan sawah dibandingkan total luas wilayahnya mencapai 47,97 persen.

Jika dilihat perkembangannya, peran sektor primer tersebut dari tahun ke tahun selama periode 2014 – 2018 menunjukkan tren menurun, begitu juga halnya dengan sektor sekunder. Sebaliknya sektor tersier terus menunjukkan peningkatan setiap tahunnya seiring dengan peningkatan produktivitas lapangan usaha yang tercakup didalamnya.

**Tabel 4.2. Distribusi PDRB Kota Banjarbaru Atas Dasar Harga Berlaku Tahun
2014 - 2018 (Persen)**

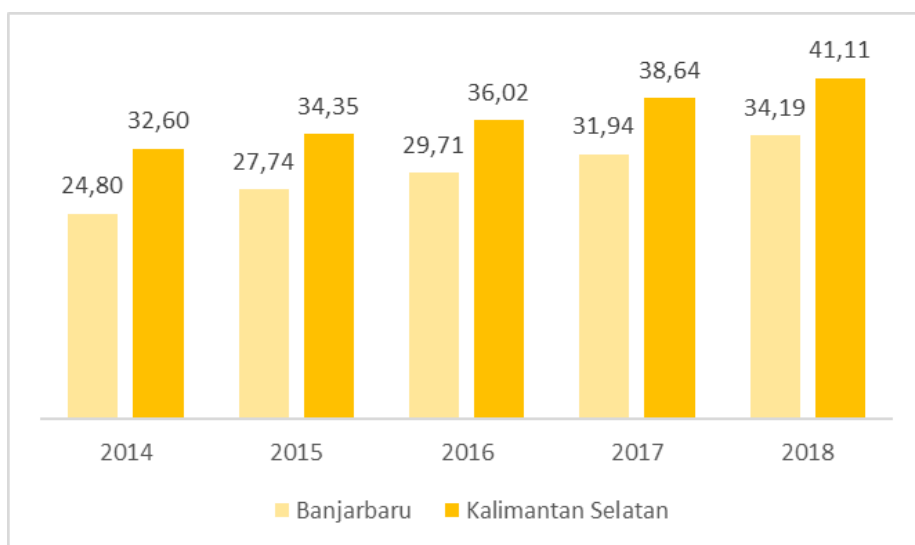
Kat	Uraian	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
SEKTOR PRIMER		6,35	6,19	5,98	5,89	5,81
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,22	2,13	2,11	2,05	2,00
B	Pertambangan dan Penggalian	4,13	4,06	3,87	3,83	3,81
SEKTOR SEKUNDER		23,22	23,31	23,39	23,30	23,18
C	Industri Pengolahan	7,98	7,82	7,88	7,87	7,62
D	Pengadaan Listrik, Gas	0,14	0,19	0,21	0,22	0,23
E	Pengadaan Air	0,60	0,59	0,58	0,58	0,58
F	Konstruksi	14,51	14,72	14,72	14,63	14,74
SEKTOR TERSIER		70,43	70,49	70,63	70,81	71,01
G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,44	10,42	10,69	10,90	11,10
H	Transportasi dan Pergudangan	21,76	21,93	22,08	22,40	22,60
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,69	2,60	2,59	2,60	2,64
J	Informasi dan Komunikasi	4,83	4,63	4,64	4,76	4,70
K	Jasa Keuangan	1,81	1,73	1,73	1,73	1,79
L	Real Estate	2,26	2,18	2,18	2,14	2,09
M,N	Jasa Perusahaan	0,43	0,43	0,43	0,44	0,44
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	12,96	13,32	12,62	11,94	11,69
P	Jasa Pendidikan	8,54	8,49	8,79	8,96	9,01
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,01	3,08	3,14	3,17	3,19
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,68	1,69	1,74	1,76	1,77
PDRB		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Berkaca dari struktur tersebut, dapat dikatakan bahwa Kota Banjarbaru memang memiliki karakteristik ekonomi yang berbeda dari kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kalimantan Selatan. Perekonomian Kota Banjarbaru secara umum didominasi oleh sektor tersier, sesuai dengan karakteristiknya yang merupakan wilayah perkotaan dengan banyak kawasan pemukiman dan perkantoran. Berbeda halnya dengan kabupaten/kota lainnya yang sebagian besar didominasi oleh sektor primer karena sumber daya alam yang melimpah di daerahnya.

Gambar 4.1. PDRB Per Kapita Provinsi Kalimantan Selatan dan Kota Banjarbaru Tahun 2014 – 2018 (Juta Rupiah)



Sumber: PDRB Kota Banjarbaru Menurut Lapangan Usaha 2014 - 2018

Besaran PDRB atas dasar harga berlaku yang dihasilkan oleh suatu daerah jika dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun akan menghasilkan nilai PDRB perkapita. Nilai PDRB perkapita ini dapat menjadi gambaran awal bagi tingkat kesejahteraan penduduk di wilayah tersebut. Menurut klasifikasi Bank Dunia, negara yang berpendapatan perkapita kurang dari \$1.045 dikategorikan sebagai negara berpendapatan rendah. sementara negara yang berpendapatan



perkapita antara \$1.045 - \$4.125 termasuk negara berpendapatan menengah bawah (*lower middle income*), negara yang memiliki pendapatan perkapita antara \$4.125-\$12.746 dikategorikan sebagai negara yang berpendapatan menengah tinggi (*upper middle income*). Sedangkan negara yang memiliki pendapatan perkapita lebih dari \$12.746 termasuk negara berpendapatan perkapita tinggi.

Selama kurun waktu 2014 – 2018, PDRB perkapita Kota Banjarbaru menunjukkan tren meningkat, dari 24,80 juta rupiah pada tahun 2014 menjadi 34,19 juta rupiah pada tahun 2018, atau tumbuh rata-rata 8,84 persen setiap tahunnya. Apabila diukur dalam USD, nilai PDRB perkapita tersebut masih termasuk dalam jajaran wilayah berpendapatan menengah bawah (*lower middle income*).

Meskipun PDRB perkapita penduduk semakin meningkat, bukan berarti bahwa tingkat kesejahteraan penduduk juga meningkat. Hal ini karena dalam penghitungan PDRB perkapita atas dasar harga berlaku masih terdapat pengaruh inflasi, sehingga untuk melihat peningkatan kesejahteraan penduduk secara riil maka kemampuan daya beli juga perlu dilihat atau dibandingkan perkembangannya.

Perkembangan kemampuan daya beli secara kasar dapat digambarkan dengan perkembangan angka pertumbuhan PDRB perkapita atas dasar harga konstan. Angka ini walaupun tumbuh meningkat selama periode 2014 – 2018, dari 3,49 persen pada tahun 2014 menjadi 3,90 persen pada tahun 2018, tetapi perkembangannya masih dibawah pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku. Ini berarti bahwa tingkat kesejahteraan penduduk Kota Banjarbaru masih berada pada posisi yang belum cukup untuk dikatakan sebagai penduduk dengan tingkat kesejahteraan tinggi. Hal ini sesuai dengan kriteria Bank Dunia yang hanya menempatkan Kota Banjarbaru sebagai kelompok daerah berpendapatan menengah bawah.

BAB V

PERKEMBANGAN STATISTIK HARGA

INFLASI BULANAN KOTA BANJARMASIN TAHUN 2018 (PERSEN)



**INFLASI TERTINGGI TERJADI PADA
BULAN JUNI SEBESAR 0,98%, YANG
BERTEPATAN DENGAN MOMEN
PERAYAAN IDUL FITRI**

LIMA KOMODITAS UTAMA PENDORONG INFLASI SELAMA TAHUN 2018



INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI SEBESAR 109,18





PERKEMBANGAN STATISTIK HARGA

Harga merupakan faktor yang berperan penting dalam keberhasilan pembangunan perekonomian. Kestabilan harga kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier menjadi dambaan bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Akan tetapi kestabilan harga tersebut sangat dipengaruhi oleh tingkat persediaan suatu komoditas dan faktor permintaan. Jika persediaan komoditas melimpah, misalnya pada musim panen, maka harga komoditas tersebut cenderung akan menurun. Sebaliknya, jika permintaan terhadap suatu komoditas menjadi sangat tinggi maka harga akan cenderung naik dan bisa jadi tidak terkontrol. Biasanya keadaan ini akan berlangsung bersamaan dengan momen-momen tertentu berkaitan dengan perayaan hari besar agama dan tahun baru. Kondisi politik dan keamanan global maupun regional secara langsung juga berpengaruh terhadap perubahan harga yang berdampak pada perekonomian secara umum.

5.1 Indeks Harga Konsumen (IHK)

Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan salah satu indikator yang mengukur tingkat perubahan harga dari berbagai komoditas (barang dan jasa) yang dibayar oleh konsumen. IHK merupakan indeks yang digunakan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menghitung laju inflasi Indonesia dan dianggap sebagai alat ukur yang paling tepat dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat yang reliabel dan tepat waktu.

BPS mengelompokkan barang konsumsi dan jasa untuk penghitungan IHK menjadi 7 (tujuh) kelompok (berdasarkan *the Classification of Individual Consumption by Purpose* - COICOP), yakni : kelompok bahan makanan; kelompok



makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau; kelompok perumahan; kelompok sandang; kelompok kesehatan; kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga; serta kelompok transportasi dan komunikasi.

Perubahan harga dalam penghitungan IHK tersebut adalah perubahan harga komoditas pada tahun berlaku dibandingkan dengan harga pada tahun dasar. Sejak tahun 2014, tahun dasar yang digunakan adalah 2012 = 100. Jika dibandingkan dengan IHK lama (2007 = 100), terdapat banyak sekali perubahan khususnya mengenai cakupan kota, paket komoditas, dan diagram timbang. Perubahan tersebut didasarkan pada Survei Biaya Hidup (SBH) 2012 yang dilaksanakan oleh BPS sebagai dasar utama dalam penghitungan IHK.

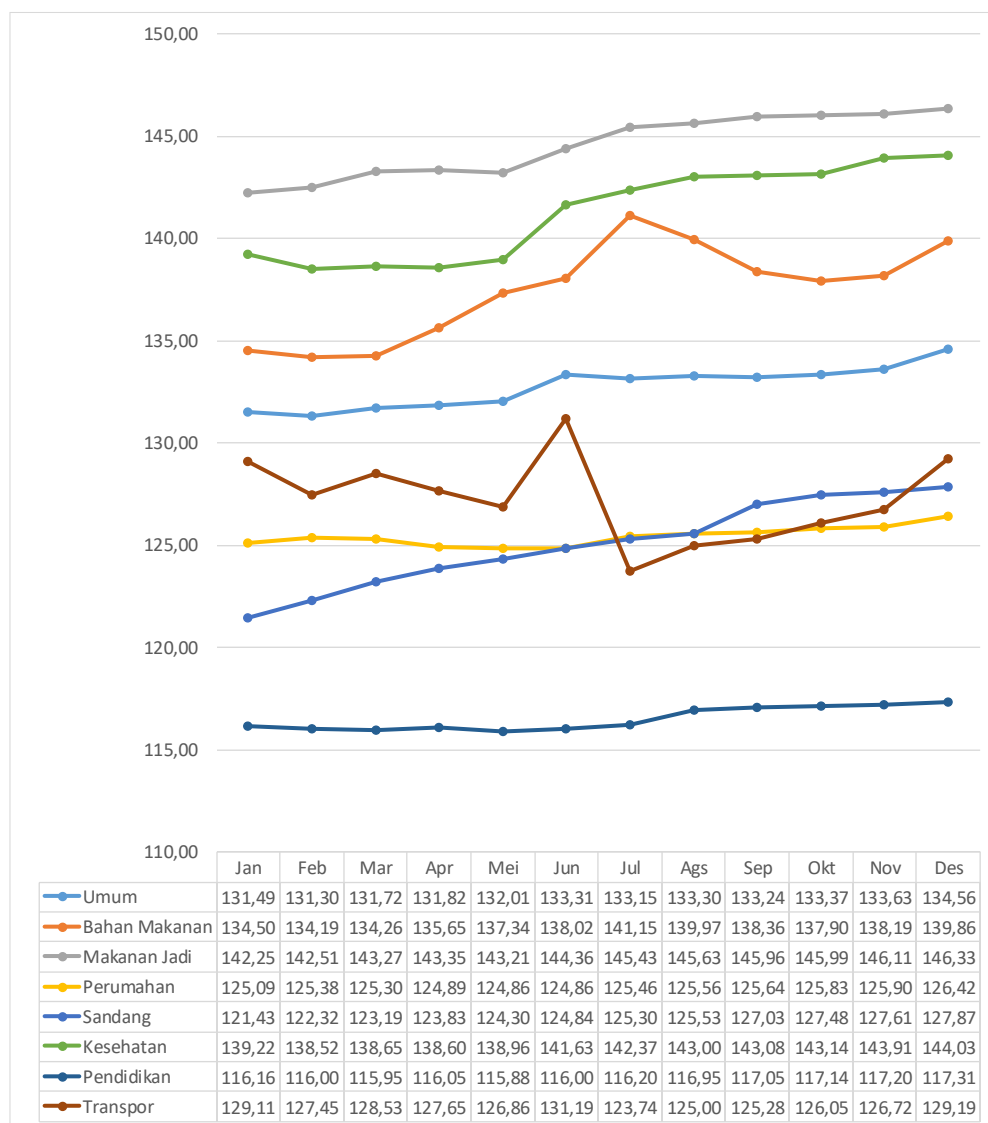
SBH 2012 dilaksanakan di 82 kota, yang terdiri dari 33 ibukota provinsi dan 49 kota besar lainnya. Dari 82 kota tersebut, 66 kota merupakan cakupan kota SBH lama dan 16 merupakan kota baru. Mencakup antara 225 sampai dengan 462 barang dan jasa yang dikelompokkan ke dalam tujuh kelompok pengeluaran yaitu: bahan makanan; makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau; perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar; sandang; kesehatan; pendidikan, rekreasi dan olahraga; serta transpor, komunikasi dan jasa keuangan. Setiap kelompok terdiri dari beberapa sub kelompok, dan dalam setiap sub kelompok terdapat beberapa komoditas. Lebih jauh, komoditas-komoditas tersebut memiliki beberapa kualitas atau spesifikasi tertentu.

Nilai IHK yang sama dengan 100 memiliki arti bahwa harga-harga komoditas pada tahun berlaku sama dengan harga tahun dasar. Sementara nilai IHK kurang dari 100 berarti bahwa harga komoditas pada tahun berlaku lebih rendah dibandingkan harga komoditas yang sama pada tahun dasar, begitu pula sebaliknya.

Sejak tahun 2014 angka IHK yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan diwakili oleh IHK Kota Banjarmasin dan Kabupaten Tabalong. Karena keterbatasan biaya penghitungan, maka kabupaten/kota disekitarnya dapat mengacu pada salah satu dari kedua wilayah tersebut dengan

mempertimbangkan jarak dan kesamaan karakteristik. Kota Banjarbaru memiliki jarak yang dekat dengan Kota Banjarmasin, disamping itu kedua kota ini juga memiliki kesamaan karakteristik, sehingga dalam hal inflasi Kota Banjarbaru dapat mengacu pada inflasi di Kota Banjarmasin dengan asumsi distribusi harga di kota Banjarbaru cenderung sama dengan kondisi di Kota Banjarmasin.

Gambar 5.1. Perkembangan IHK Kota Banjarmasin Tahun 2018



Sumber: Indeks Harga Konsumen Kota Banjarmasin Tahun 2018

Pada Gambar 5.1. dapat dilihat bahwa selama tahun 2018 pola perkembangan harga untuk semua kelompok komoditas berfluktuasi, namun hampir semua memiliki tren yang meningkat.

Perubahan IHK yang cukup drastis selama tahun 2018 terjadi pada komoditas Transpor, Komunikasi, dan Jasa Keuangan di bulan Juni sebesar 3,41 persen, yakni dari 126,86 menjadi 131,19. Hal ini berarti bahwa pada bulan Juni terjadi kenaikan harga pada komoditas tersebut sebesar 3,41 persen dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yang disebabkan antara lain oleh adanya perayaan hari raya Idul Fitri.

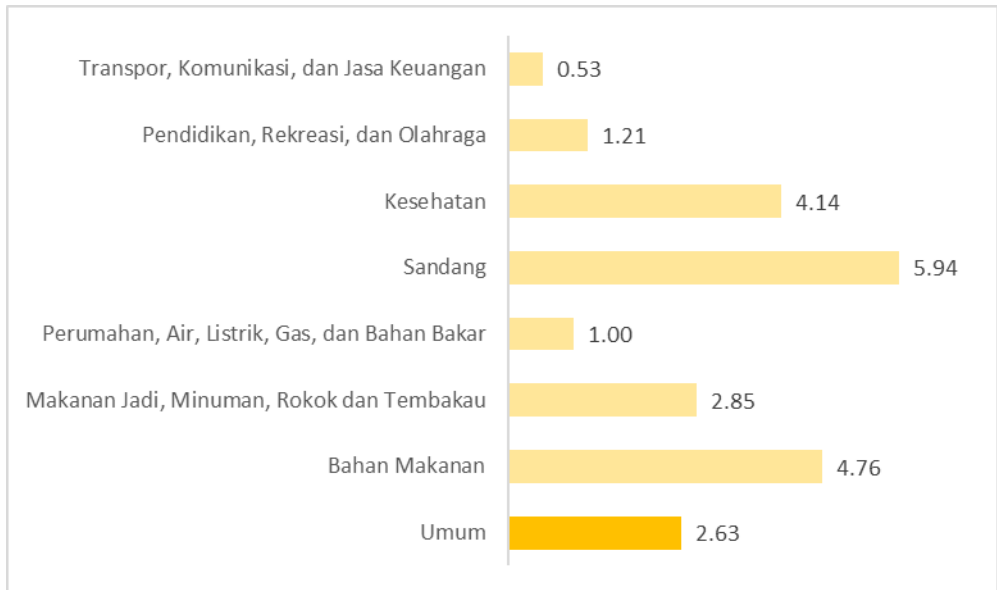
Tabel 5.1. Indeks Harga Konsumen (2012 = 100) Kota Banjarmasin Menurut Kelompok Komoditas Tahun 2014 - 2018

Kelompok Pengeluaran		2014	2015	2016	2017	2018
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Umum		115,97	121,80	126,28	131,11	134,56
1	Bahan Makanan	124,25	129,36	132,04	133,50	139,86
2	Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau	118,59	128,58	137,87	142,27	146,33
3	Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar	110,83	115,85	116,72	125,17	126,42
4	Sandang	101,21	107,58	112,41	120,70	127,87
5	Kesehatan	115,22	129,80	134,52	138,30	144,03
6	Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga	107,86	111,28	115,62	115,91	117,31
7	Transpor, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	119,26	119,08	123,60	128,51	129,19

Sumber: Indeks Harga Konsumen Kota Banjarmasin Tahun 2018

Pada Tabel 5.1. diatas dapat disimpulkan bahwa secara umum harga barang dan jasa pada tahun 2018 lebih tinggi dibandingkan dengan harga barang dan jasa pada tahun 2017, terlihat dari meningkatnya IHK umum Desember 2017 yang sebesar 131,11 menjadi 134,56 pada Desember 2018. Peningkatan tersebut menghasilkan inflasi tahunan (*year-on-year*) sebesar 2,63 persen.

Gambar 5.2. Inflasi Tahunan Kota Banjarmasin Menurut Kelompok Komoditas Tahun 2018



Jika ditelaah secara lebih mendalam, inflasi tahunan (*year-on-year*) pada tahun 2018 disebabkan oleh meningkatnya harga komoditas pada seluruh kelompok komoditas. Adapun kelompok yang mengalami perubahan harga paling besar adalah kelompok Sandang dengan inflasi 5,94 persen, kelompok Bahan Makanan dengan inflasi 4,76 persen, dan kelompok Kesehatan dengan inflasi 4,14 persen. Sebaliknya inflasi terkecil dialami oleh kelompok Transpor, Komunikasi, dan Jasa Keuangan yaitu hanya sebesar 0,53 persen.

Harga-harga barang kebutuhan masyarakat yang tercermin dari IHK tidak selamanya berdampak buruk. Kenaikan harga barang dalam batas yang bisa ditoleransi oleh sistem dan institusi ekonomi justru dapat berdampak positif bagi perekonomian. Karena kenaikan harga yang wajar akan menaikkan produktivitas dari para produsen barang dan jasa yang pada gilirannya akan menaikkan pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, kalau kenaikan harga dirasa terlalu tinggi akan menyebabkan permintaan barang dan jasa yang turun dan menyebabkan turunnya perolehan barang dan jasa tersebut.



Pada Tabel 5.1 dapat terlihat bahwa pergerakan IHK setiap kelompok komoditas selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun selama periode 2014 - 2018. Hal ini berarti bahwa dalam kurun waktu tersebut setiap tahunnya Kota Banjarmasin selalu mengalami inflasi.

5.2 Laju Inflasi

Inflasi merupakan persentase kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga. Ada barang yang harganya naik dan ada yang tetap. Namun, tidak jarang ada barang dan jasa yang harganya justru turun. Hitungan perubahan harga tersebut tercakup dalam Indeks Harga Konsumen (IHK) atau *Consumer Price Index* (CPI). Persentase kenaikan IHK dikenal dengan inflasi, sedangkan penurunannya disebut deflasi.

Angka inflasi merupakan salah satu indikator penting yang dapat memberikan informasi tentang dinamika perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Perkembangan harga barang dan jasa ini berdampak langsung terhadap tingkat daya beli dan biaya hidup masyarakat, perubahan nilai aset dan kewajiban, serta nilai kontrak/transaksi bisnis. Inflasi yang merupakan indikator pergerakan antara permintaan dan penawaran di pasar riil juga terkait erat dengan perubahan tingkat suku bunga, produktivitas ekonomi, nilai tukar rupiah dengan valuta asing, indeksasi anggaran, dan parameter ekonomi makro lainnya. Oleh karena itu, masyarakat, pelaku bisnis, kalangan perbankan, dan pemerintah sangat berkepentingan terhadap perkembangan inflasi.

Pada tingkat korporasi angka inflasi dapat dipakai untuk perencanaan pembelanjaan dan kontrak bisnis. Dalam lingkup yang lebih luas (makro) angka inflasi menggambarkan kondisi atau stabilitas moneter dan perekonomian. Secara spesifik kegunaan angka inflasi antara lain untuk :

- a. Indeksasi upah dan tunjangan gaji pegawai (*wage-indexation*)
- b. Penyesuaian nilai kontrak (*contractual payment*)

- c. Eskalasi nilai proyek (*project escalation*)
- d. Penentuan target inflasi (*inflation targeting*)
- e. Indeksasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (*budget indexation*)
- f. Sebagai pembagi PDB, PDRB (*GDP inflation*)
- g. Sebagai proksi perubahan biaya hidup (*proxy of cost of living*)
- h. Indikator dini tingkat bunga valas dan indeks, harga saham

Saat ini BPS menggunakan metode *point to point* untuk menghitung laju inflasi tahunan. Sedangkan laju inflasi bulanan diperoleh dengan membandingkan IHK bulan sekarang terhadap IHK bulan sebelumnya yang dinyatakan dalam persen. Secara sederhana, penghitungan inflasi tahunan dan bulanan oleh BPS (2012) adalah sebagai berikut:

- a. Inflasi Tahunan (*year on year*)

$$\pi_{it} = \frac{IHK_{it} - IHK_{i(t-1)}}{IHK_{i(t-1)}} \times 100$$

Di mana :

π_{it} = inflasi bulan i tahun t

IHK_{it} = Indeks Harga Konsumen bulan i tahun t

$IHK_{i(t-1)}$ = Indeks Harga Konsumen bulan i tahun t-1

- b. Inflasi Bulanan (*month to month*)

$$\pi_i = \frac{IHK_i - IHK_{i-1}}{IHK_{i-1}} \times 100$$

Di mana :

π_{it} = inflasi bulan i

IHK_i = Indeks Harga Konsumen bulan i

IHK_{i-1} = Indeks Harga Konsumen bulan i-1 (bulan sebelumnya)

Jika hasil perhitungan di atas adalah bernilai positif, maka disebut sebagai inflasi, dan jika negatif disebut deflasi.



Tingkat inflasi yang berfluktuasi tinggi menggambarkan besarnya ketidakpastian nilai uang, tingkat produksi, distribusi dan arah perkembangan ekonomi sehingga dapat menimbulkan ekspektasi keliru dan manipulasi yang dapat membahayakan perekonomian secara keseluruhan. Sebaliknya, inflasi yang rendah juga tidak menguntungkan perekonomian karena menggambarkan rendahnya daya beli dan permintaan masyarakat akan barang dan jasa yang pada gilirannya memperlambat pertumbuhan ekonomi.

Jenis – Jenis Inflasi

Berdasarkan tingkat keparahannya, inflasi dibedakan menjadi :

1. Inflasi Ringan, yaitu tingkat inflasi kurang dari 10 % setahun;
2. Inflasi Sedang, yaitu tingkat inflasi 10 % s/d 30 % setahun;
3. Inflasi Berat, yaitu tingkat inflasi 30 % s/d 100 % setahun;
4. Hiper Inflasi, yaitu tingkat inflasi di atas 100% setahun.

Inflasi juga dapat diklasifikasikan berdasarkan karakteristik pergerakan harga komoditas. Pengelompokan ini berdasarkan faktor-faktor penyebab inflasi yaitu faktor fundamental ekonomi yang berdampak pada munculnya tekanan inflasi yang bersifat permanen atau faktor non fundamental yang berdampak pada munculnya tekanan inflasi yang bersifat sementara. Menurut BPS (2006) inflasi dikategorikan menjadi tiga, yaitu:

1. Inflasi inti (*core inflation*) adalah inflasi komoditas yang perkembangan harganya dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi secara umum (faktor-faktor fundamental seperti ekspektasi inflasi, nilai tukar, dan keseimbangan permintaan dan penawaran agregat) yang akan berdampak pada perubahan harga-harga secara umum dan lebih bersifat permanen/menetap.
2. *Inflasi volatile food* adalah inflasi kelompok komoditas bahan makanan yang perkembangan harganya sangat bergejolak karena faktor-faktor tertentu.



Sebagai contoh, inflasi yang terjadi pada beberapa komoditas bahan makanan seperti beras, cabai, dan beberapa jenis sayuran lainnya seringkali berfluktuasi secara tajam karena dipengaruhi oleh kondisi kecukupan pasokan komoditas yang bersangkutan (faktor musim panen, gangguan distribusi, bencana alam, dan hama).

3. *Inflasi administered price* adalah inflasi kelompok komoditas yang perkembangan harganya diatur oleh pemerintah. Sebagai contoh, perubahan harga yang terjadi pada BBM, tarif listrik, telepon, angkutan dalam kota, dan air minum yang selama ini dipengaruhi oleh pemerintah atau instansi pemerintah. Termasuk perkembangan harga rokok juga mengikuti perubahan harga jual eceran rokok yang ditetapkan oleh pemerintah.

Adapun berdasarkan sebab terjadinya, inflasi dapat dibedakan menjadi dua (Samuelson dan Nordhaus, 1998:587) yaitu:

1. *Demand Inflation*, yaitu inflasi yang timbul karena desakan permintaan masyarakat akan barang dan jasa begitu kuat. Inflasi ini muncul karena naiknya tingkat pendapatan masyarakat, sehingga masyarakat cenderung membeli barang dan jasa lebih banyak dari yang biasa mereka gunakan. Misalnya seseorang yang biasa mengkonsumsi susu satu gelas sehari, karena pendapatnya meningkat, maka konsumsi susunya juga meningkat menjadi 3 gelas sehari. Dengan meningkatnya konsumsi atau pembelian, akan mendorong naiknya harga barang-barang.
2. *Cost* atau *Cost-push Inflation*, yaitu inflasi yang disebabkan karena naiknya biaya produksi. Misalnya terjadi kenaikan bahan bakar atau tuntutan buruh akan kenaikan upah, dimana kedua hal itu merupakan bagian dari biaya produksi, maka perusahaan pun akan menaikkan harga jual barang dan jasanya.



Sedangkan berdasarkan asal-usul terjadinya, inflasi dibedakan menjadi:

1. *Domestic inflation*, yaitu inflasi yang berasal atau bersumber dari dalam negeri. Misalnya pemerintah mengalami defisit anggaran belanja kemudian pemerintah mencetak uang baru, sehingga jumlah uang beredar bertambah. Keadaan ini akan mendorong tingkat konsumsi masyarakat, bila penawaran barang tetap, maka hal ini akan mendorong kenaikan harga barang-barang.
2. *Imported inflation*, yaitu inflasi yang berasal dari luar negeri. Sebagai contoh adalah negara kita, dimana negara kita masih banyak mengimpor bahan baku dan barang modal lainnya. Apabila harga barang-barang yang diimpor itu naik, maka biaya produksi juga meningkat, yang akhirnya akan menaikkan harga jual barang dan jasa.

Faktor – Faktor Penyebab Inflasi

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya inflasi di suatu daerah. Dari sudut pandang ekonomi, pada prinsipnya inflasi terjadi karena tidak adanya keserasian antara laju pertumbuhan uang dan tingkat pertumbuhan barang dan jasa. Apabila jumlah uang beredar meningkat, sedangkan produksi barang dan jasa tetap, maka hal ini cenderung akan mendorong terjadinya inflasi. Namun demikian, dari uraian tentang jenis-jenis inflasi dapat diidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya inflasi, yaitu antara lain:

1. Naiknya permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa

Ketika pemerintah menaikkan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS), biasanya diikuti dengan kenaikan permintaan barang dan jasa. Bila kenaikan besarnya permintaan ini tidak diimbangi dengan penambahan volume barang dan jasa di pasar, maka hal ini akan berakibat pada naiknya harga barang dan jasa. Kenaikan gaji PNS ini pada dasarnya mengindikasikan adanya kenaikan jumlah uang yang beredar. Jenis inflasi ini disebut *demand-pull inflation*.



2. Kenaikan biaya produksi

Pada waktu pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), maka harga barang-barang di pasar juga akan meningkat. Hal tersebut disebabkan oleh kenaikan harga BBM berdampak pada kenaikan biaya produksi, akibatnya perusahaan juga menaikkan harga jual barang dan jasanya. Disini terjadi *cost-push inflation*.

3. Defisit anggaran belanja (APBN)

Defisit APBN yang ditutup dengan percetakan uang baru oleh Bank Indonesia, akan berakibat pada bertambahnya jumlah uang beredar, hal ini akan berdampak pada kenaikan harga barang dan jasa.

4. Menurunnya nilai tukar rupiah

Menurunnya nilai tukar terhadap valuta asing, seperti US dollar, Yen, Deutsche Mark, akan berdampak pada semakin mahalnya barang-barang produksi impor. Hal ini berakibat pada kenaikan biaya produksi.

Faktor uang dan barang/jasa seperti diuraikan diatas memang berdampak langsung terhadap inflasi. Bila ditelusuri, maka sumber penyebab inflasi dapat juga berasal faktor-faktor sosial dan politik. Sebagai contoh, adanya berbagai kerusuhan sosial seperti yang terjadi akhir-akhir ini, juga memberikan dorongan terhadap laju inflasi. Berbagai kerusuhan sosial yang terjadi menyebabkan rasa tidak aman pada penduduk, sehingga mendorong mereka untuk membeli barang-barang dalam jumlah besar dari kebutuhan.

Untuk mengetahui sumber pemicu inflasi perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran barang dan jasa seperti tingkat produksi, distribusi dan *stock*. Produksi yang berlebihan dan distribusi barang yang lancar seperti terjadi pada musim panen raya akan menyebabkan kelebihan penawaran barang di pasar (*excess supply*) dan harga turun atau inflasi rendah.

- 
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan barang dan jasa yang berkaitan dengan daya beli masyarakat, perilaku, selera dan jumlah konsumen. Perilaku permintaan konsumen akan barang dan jasa juga dipengaruhi oleh faktor musim, hari-hari raya/lebaran dan tahun ajaran baru.
 3. Kebijakan fiskal pemerintah, kebijakan moneter dan kondisi perekonomian secara keseluruhan yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan harga barang dan jasa.

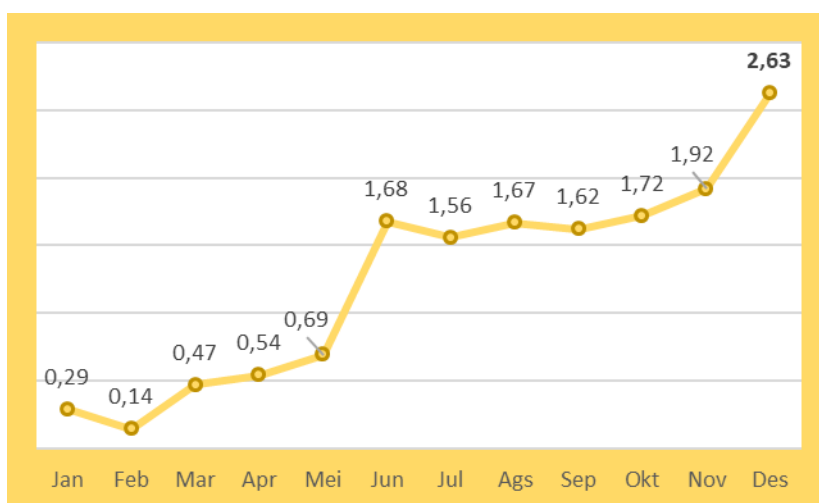
Untuk mencapai dan menjaga tingkat inflasi yang rendah dan stabil, diperlukan adanya kerjasama dan komitmen dari seluruh pelaku ekonomi, baik pemerintah maupun swasta. Tanpa dukungan dan komitmen tersebut niscaya tingkat inflasi yang sangat tinggi selama ini akan sulit dikendalikan. Agar inflasi tidak semakin buruk, perlu adanya upaya untuk menekan inflasi tersebut, diantaranya:

1. Menjaga keserasian antara laju penambahan uang beredar dengan laju pertumbuhan barang dan jasa. Penambahan jumlah uang beredar harus dilakukan secara proporsional dengan tingkat pertumbuhan penawaran barang dan jasa. Di samping itu, jumlah uang beredar senantiasa harus dipantau dan dikendalikan. Beberapa instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah (Bank Indonesia) guna mengendalikan jumlah uang beredar adalah politik operasi pasar terbuka (*Open Market Operation*);
2. Politik diskonto dan bunga pinjaman; serta politik mengubah cadangan minimal bank-bank umum pada Bank Indonesia. Selain itu perlu dilakukan pengawasan pinjaman secara selektif maupun pembujukan moral (*moral suasion*).
3. Menjaga kestabilan nilai tukar mata uang. Nilai tukar rupiah yang cenderung merosot terhadap mata uang asing, akan mendorong laju inflasi, sebab negara kita masih banyak mengimpor barang-barang modal dan juga bahan baku produksi. Jika mata uang rupiah merosot, maka harga barang-barang impor untuk kebutuhan produksi menjadi lebih mahal. Hal ini berarti akan menaikkan

biaya produksi, yang selanjutnya akan menaikkan harga barang dan jasa di pasar.

4. Melakukan intervensi pasar. Pada masa-masa tertentu dapat terjadi lonjakan terhadap permintaan barang-barang dipasar, seperti menjelang hari raya Idul Fitri dan Natal. Keadaan ini tidak dapat dibiarkan terus, karena dapat menyulut kenaikan harga barang-barang pada umumnya. Kenaikan harga barang-barang secara temporer memang tidak dapat disebut inflasi.

Gambar 5.3. Kumulatif Inflasi Kota Banjarmasin Tahun 2018 (Persen)

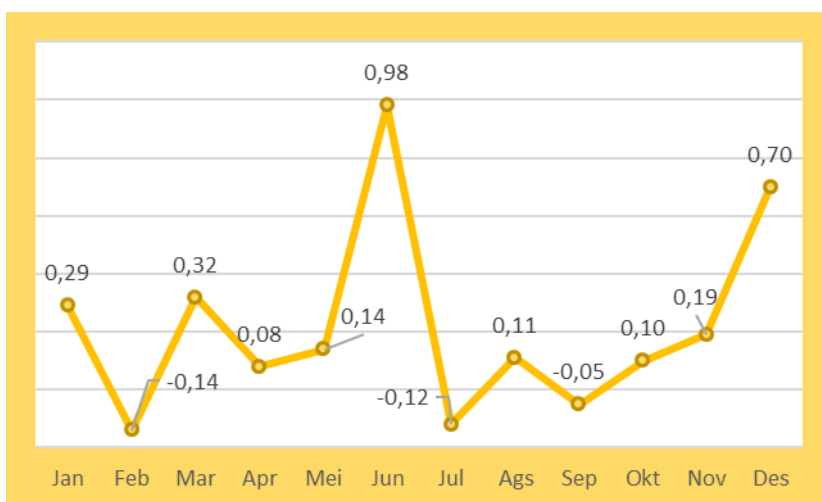


Sumber: Indeks Harga Konsumen Kota Banjarmasin Tahun 2018

Selama periode Januari sampai dengan Desember 2018, secara umum di Banjarmasin terjadi inflasi sebesar 2,63 persen. Dengan kata lain secara umum telah terjadi kenaikan harga barang dan jasa di tingkat konsumen sebesar 2,63 persen pada Desember 2018 dibandingkan harga konsumen pada akhir tahun 2017. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan laju inflasi tahun sebelumnya yaitu sebesar 3,82 persen.

Gerakan inflasi bulanan, banyak dipengaruhi oleh momen perayaan hari besar agama, kondisi transportasi, serta musim. Momen perayaan hari besar agama dan tahun baru merupakan momen yang merubah komposisi permintaan dan penawaran barang dan jasa di pasaran. Umumnya pada momen tersebut permintaan terhadap makanan baik bahan makanan maupun makanan jadi, sandang, serta transportasi, bertambah tinggi.

Gambar 5.4. Inflasi Bulanan Kota Banjarmasin Tahun 2018 (Persen)



Sumber: Indeks Harga Konsumen Kota Banjarmasin Tahun 2018

Jika ditinjau inflasi bulanan tahun 2018 pada gambar 5.4, inflasi tertinggi terjadi pada bulan Juni yaitu mencapai 0,98 persen. Kenaikan harga komoditas pada bulan tersebut bertepatan dengan momen perayaan Idul Fitri. Sedangkan deflasi tertinggi terjadi pada bulan Februari yaitu mencapai 0,14 persen.

**Tabel 5.2. Laju Inflasi Kota Banjarmasin Menurut Kelompok Komoditas
Tahun 2014 - 2018 (Persen)**

Tahun / Bulan	Kelompok Komoditas							Umum
	Bahan Maka nan	Maka nan Jadi	Peru mahan	San dang	Kese hatan	Pendi dikan, Rekrea si, dan Olah raga	Trans portasi dan Komuni kasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2014	10,13	8,65	5,15	-0,42	9,76	4,09	7,52	7,16
2015	4,11	8,42	4,53	6,29	12,65	3,17	-0,15	5,03
2016	2,07	7,23	0,75	4,49	3,64	3,9	3,8	3,68
2017	1,11	3,19	7,24	7,37	2,81	0,25	3,97	3,82
2018	4,76	2,85	1,00	5,94	4,14	1,21	0,53	2,63
Jan	0,75	-0,01	-0,06	0,60	0,67	0,22	0,47	0,29
Feb	-0,23	0,18	0,23	0,73	-0,50	-0,14	-1,29	-0,14
Mar	0,05	0,53	-0,06	0,71	0,09	-0,04	0,85	0,32
Apr	1,04	0,06	-0,33	0,52	-0,04	0,09	-0,68	0,08
Mei	1,25	-0,10	-0,02	0,38	0,26	-0,15	-0,62	0,14
Jun	0,50	0,80	0,00	0,43	1,92	0,10	3,41	0,98
Jul	2,27	0,74	0,48	0,37	0,52	0,17	-5,68	-0,12
Ags	-0,84	0,14	0,08	0,18	0,44	0,65	1,02	0,11
Sep	-1,15	0,23	0,06	1,19	0,06	0,09	0,22	-0,05
Okt	-0,33	0,02	0,15	0,35	0,04	0,08	0,61	0,10
Nov	0,21	0,08	0,06	0,10	0,54	0,05	0,53	0,19
Des	1,21	0,15	0,41	0,20	0,08	0,09	1,95	0,70

Sumber : Indeks Harga Konsumen Kota Banjarmasin Tahun 2018

Jika dilihat menurut kelompok pengeluaran, inflasi terbesar pada tahun 2018 terjadi pada kelompok Sandang yang mencapai 5,94 persen. Artinya komoditas Sandang mengalami kenaikan harga paling tinggi di antara komoditas lainnya yaitu sebesar 5,94 persen dibanding tahun sebelumnya. Sedangkan inflasi terkecil terjadi pada kelompok Transportasi dan Komunikasi yakni sebesar 0,53 persen, yang berarti kelompok ini mengalami kenaikan harga paling rendah yaitu 0,53 persen dibandingkan dengan tahun 2017.

**Tabel 5.3. Sumbangan Kelompok Pengeluaran Terhadap Inflasi Kota Banjarmasin
Bulan Januari – Desember 2017**

No.	Kelompok	Andil Bulan Desember	Andil Bulan Januari - Desember
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Umum	0,70	2,63
2	Bahan Makanan	0,24	0,93
3	Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau	0,04	0,73
4	Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar	0,09	0,22
5	Sandang	0,01	0,39
6	Kesehatan	0,00	0,22
7	Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga	0,01	0,07
8	Transpor, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	0,32	0,09

Sumber: Indeks Harga Konsumen Kota Banjarmasin Tahun 2018

Perbedaan yang terjadi antara andil inflasi bulan Desember dan tahunan 2018 ini menunjukkan bahwa pada saat-saat tertentu harga suatu kelompok komoditas mungkin saja akan naik atau turun. Hal ini karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi pasar, dimana untuk bulan Desember adalah bulan vakansi atau liburan serta adanya perayaan Natal dan Tahun Baru, sehingga banyak penduduk yang melakukan perjalanan menuju kampung halaman, yang mengakibatkan harga tiket angkutan, baik darat, laut, maupun udara bergerak naik sesuai permintaan bahkan kadang mencapai limit tertinggi batas atas harga yang ditetapkan.

Tabel 5.4. Lima Komoditas Utama Pendorong Inflasi Kota Banjarmasin Selama Tahun 2018 (Persen)

No	Komoditas	Andil dalam Inflasi
(1)	(2)	(3)
1	Bensin	0,32
2	Tarif Parkir	0,23
3	Daging Ayam Ras	0,22
4	Tarif Pulsa Ponsel	0,14
5	Nasi Dengan Lauk	0,12

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan

Ditinjau secara lebih mendalam, lima komoditas yang menjadi pendorong utama inflasi pada tahun 2018 adalah bensin dengan andil 0,32 persen, tarif parkir 0,23 persen, daging ayam ras 0,22 persen, tarif pulsa ponsel 0,14 persen, dan nasi dengan lauk 0,12 persen.

Sebaliknya lima komoditas utama penahan inflasi tahun 2018 adalah angkutan udara dengan andil -0,70 persen, bahan bakar rumah tangga -0,15 persen, minyak goreng -0,04 persen, telepon seluler -0,03 persen, dan televisi berwarna -0,03 persen.

Tabel 5.5. Lima Komoditas Utama Penahan Inflasi Kota Banjarmasin Selama Tahun 2018 (Persen)

No	Komoditas	Andil dalam Inflasi
(1)	(2)	(3)
1	Angkutan Udara	-0,70
2	Bahan Bakar Rumah Tangga	-0,15
3	Minyak Goreng	-0,04
4	Telepon Seluler	-0,03
5	Televisi Berwarna	-0,03

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan

Kelompok yang paling begejolak umumnya adalah kelompok Bahan Makanan. Oleh karena itu, pengelompokan terhadap barang dan jasa ini selain dikelompokkan dalam 7 kelompok komoditas ada pula pengelompokan berdasarkan disagregasi inflasi. Disagregasi inflasi tersebut dilakukan untuk menghasilkan suatu indikator inflasi yang lebih menggambarkan pengaruh dari faktor yang bersifat fundamental seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 5.6. Laju inflasi Kota Banjarmasin Menurut Komponen Tahun 2018 (Persen)

Komponen	IHK Desember 2018	Inflasi Bulan Desember 2018	Inflasi Tahun ke Tahun	Andil Inflasi Desember 2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Umum	134,56	0,70	2,63	0,70
Diatur Pemerintah	156,37	1,77	-1,30	0,32
Bergejolak (<i>Volatile</i>)	138,70	1,51	5,01	0,26
Inti (<i>Core</i>)	128,83	0,21	3,11	0,12

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan

Komponen Bergejolak (*volatile*) terdiri dari 58 komoditas yang dominan dipengaruhi oleh *shocks* (kejutan) dalam kelompok bahan makanan seperti panen, gangguan alam, atau faktor perkembangan harga komoditas pangan domestik maupun perkembangan harga komoditas pangan internasional. Inflasi pada kelompok ini selama tahun 2018 di Kota Banjarmasin merupakan yang tertinggi yaitu 5,01 persen dengan andil inflasi sebesar 0,26 persen.

Komponen lain yaitu Inti (*core*) merupakan yang terbanyak yaitu 286 komoditas, dimana pergerakan inflasinya dipengaruhi oleh faktor fundamental seperti permintaan dan penawaran, ekspektasi inflasi dari pedagang dan konsumen, serta lingkungan eksternal lainnya. Inflasi pada kelompok ini pada tahun 2018 di Kota Banjarmasin adalah sebesar 3,11 persen dengan andil 0,12 persen.



Komponen terakhir mencakup 18 komoditas yang termasuk dalam komponen barang dan jasa yang diatur pemerintah, atau disebut juga *administrative prices* yaitu: Rokok kretek, rokok filter, rokok putih, tarif air minum (PDAM), tarif listrik, bahan bakar rumahtangga, tarip puskesmas, angkutan antar kota dan dalam kota, angkutan laut, angkutan udara, bensin, solar, tarif taxi, tarif telepon, tarif pembuatan SIM, tarif parkir, dan biaya perpanjangan STNK, dimana komponen ini dipengaruhi oleh *shocks* (kejutan) berupa kebijakan harga Pemerintah, seperti harga BBM bersubsidi, tarif listrik, tarif angkutan, dll. Komponen ini mengalami deflasi sebesar 1,30 persen dengan andil terhadap inflasi umum sebesar 0,32 persen.

5.3 Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)

Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) digunakan sebagai pendekatan untuk mengukur tingkat kesulitan geografis suatu daerah, semakin sulit letak geografis suatu daerah maka semakin tinggi pula tingkat harga di daerah tersebut. Tidak ada dua gedung kantor yang identik atau jembatan yang sama persis karena masing-masing memiliki karakter dan desain yang dibuat khusus untuk ditempatkan pada lokasi masing-masing. Penghitungan IKK karenanya didasarkan atas suatu pendekatan atau kompromi tertentu. Misalnya yang menjadi objek adalah bangunan tempat tinggal, maka bangunan tempat tinggal tersebut harus mengakomodir berbagai macam rancangan dan model.

Terdapat dua metode penghitungan untuk membandingkan harga konstruksi antar wilayah/daerah, yakni pendekatan harga input dan pendekatan harga output. Pendekatan harga input yaitu dengan mencatat semua material penting yang digunakan digabung dengan upah dan sewa peralatan sesuai dengan bobotnya masing-masing. Kelemahan metode ini adalah bahwa kegiatan konstruksi dianggap mempunyai produktivitas yang sama dan tidak mempertimbangkan *overhead cost*.

Pendekatan output dilakukan dengan cara menanyakan harga konstruksi yang sudah jadi. Pada harga output kelemahannya adalah bahwa dalam harga bangunan sudah termasuk biaya manajemen dan keuntungan kontraktor yang bervariasi antar daerah dan antar proyek sehingga tidak memadai untuk tujuan membandingkan kemahalan konstruksi antar wilayah. Alternatifnya adalah mengumpulkan harga konstruksi yang bisa mencakup *overhead cost* dan produktivitas pekerja tanpa memasukan biaya manajemen dan keuntungan kontraktor. Caranya ialah dengan mengumpulkan harga komponen bangunan seperti harga dinding, atap, dan sebagainya. Apabila harga-harga komponen tersebut digabungkan maka akan didapatkan harga total proyek yang besarnya berada diatas harga input tetapi di bawah harga output karena sudah memasukkan *overhead cost* dan upah tetapi mengeluarkan biaya manajemen dan keuntungan kontraktor.

Data seperti ini bisa didapatkan dari dokumen *Bill of Quantity* (BoQ) satu proyek yang sudah selesai. Dengan digunakannya realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pembentukan modal tetap sebagai salah satu penimbang IKK, maka IKK suatu kabupaten/kota relatif terhadap kabupaten/kota acuan dapat berubah-ubah tergantung dari realisasi APBD masing-masing kabupaten/kota.

Tabel 5.7. Perkembangan IKK Kota Banjarbaru dan Kalimantan Selatan Tahun 2014 - 2018 (Persen)

Tahun	Banjarbaru	Kalimantan Selatan
(1)	(2)	(3)
2014	99,85	99,18
2015	98,76	102,92
2016	99,63	103,55
2017	105,59	101,67
2018	109,18	105,09

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Selatan



Indeks Kemahalan Konstruksi Kota Banjarbaru dari tahun 2014 hingga tahun 2018 secara keseluruhan mengalami kenaikan terkecuali pada tahun 2015. Pada tahun 2018, IKK Kota Banjarbaru adalah sebesar 109,18 yang berarti bahwa secara geografis harga pembangunan konstruksi di Kota Banjarbaru 9,18 persen lebih mahal dibandingkan harga pada kota acuan IKK Tahun 2018, yaitu Kota Surabaya.

BAB VI

TABUNGAN DAN INVESTASI

JENIS PENGHIMPUNAN DANA PERBANKAN TAHUN 2018



JENIS PENGUNAAN KREDIT TAHUN 2018



PROYEK PMDN YANG TELAH DISETUJUI PEMKOT BANJARBARU

JUMLAH PROYEK

287



RENCANA INVESTASI

2,5 TRILLIUN



RENCANA TENAGA KERJA

5.781





TABUNGAN DAN INVESTASI

Salah satu teori ekonomi pembangunan yang sampai sekarang masih digunakan adalah Teori Tabungan dan Investasi oleh Harrod-Domar. Dalam teori ini mencapai kesimpulan bahwa pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh tingginya tabungan dan investasi. Jika tabungan dan investasi rendah maka pertumbuhan ekonomi suatu negara juga akan rendah, karena sesungguhnya masalah pembangunan yang krusial adalah tersedia atau tidaknya investasi modal. Modal yang diinvestasikan akan menghasilkan pembangunan ekonomi.

Dewasa ini hampir di semua negara, khususnya negara berkembang, membutuhkan modal asing. Modal asing itu merupakan suatu hal yang semakin penting bagi pembangunan suatu negara, sehingga kehadiran investor asing nampaknya tidak mungkin dihindari. Namun yang menjadi permasalahan adalah bahwa kehadiran investor asing ini sangat dipengaruhi oleh kondisi internal suatu negara, seperti stabilitas ekonomi, politik negara, dan penegakan hukum. Penanaman modal memberikan keuntungan kepada semua pihak, tidak hanya bagi investor saja, tetapi juga bagi perekonomian negara tempat modal itu ditanamkan serta bagi negara asal para investor. Pemerintah menetapkan bidang-bidang usaha yang memerlukan penanaman modal dengan berbagai peraturan. Selain itu, pemerintah juga menentukan besarnya modal dan perbandingan antara modal nasional dan modal asing.



Banyak negara yang melakukan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan investasi baik domestik maupun asing. Hal ini dilakukan oleh pemerintah sebab kegiatan investasi akan mendorong kegiatan ekonomi suatu negara, penyerapan tenaga kerja, peningkatan output yang dihasilkan, penghematan devisa atau bahkan penambahan devisa. Menurut Husnan (1996), proyek investasi merupakan suatu rencana untuk menginvestasikan sumber-sumber daya, baik proyek raksasa ataupun proyek kecil untuk memperoleh manfaat pada masa yang akan datang. Pada umumnya manfaat ini dalam bentuk nilai uang. Sedang modal, bisa saja berbentuk bukan uang, misalnya tanah, mesin, bangunan, dan lain-lain. Namun baik sisi pengeluaran investasi ataupun manfaat yang diperoleh, semua harus dikonversikan dalam nilai uang.

Analisis rencana investasi pada dasarnya merupakan penelitian tentang dapat tidaknya suatu proyek (baik besar atau kecil) dapat dilaksanakan dengan berhasil, atau suatu metode penjajakan dari suatu gagasan usaha atau bisnis tentang kemungkinan layak atau tidaknya gagasan usaha atau bisnis tersebut dilaksanakan. Suatu proyek investasi umumnya memerlukan dana yang besar dan akan mempengaruhi perekonomian dalam jangka panjang.

Pertumbuhan ekonomi disebuah negara adalah masalah perekonomian jangka panjang. Selain itu pertumbuhan ekonomi disuatu negara, juga bisa dijadikan alat ukur untuk melihat, mengukur, atau menganalisa tingkat perkembangan perekonomian di negara tersebut. Pertumbuhan ekonomi disuatu negara bisa disebabkan oleh banyak faktor. Bagi negara – negara maju, mereka bisa mengandalkan hasil produksi barang dan jasa mereka, tapi tidak menutup kemungkinan pula adanya pinjaman yang mereka lakukan serta adanya investasi. Tapi bagi negara – negara yang sedang berkembang tentu saja akan sulit atau bisa dikatakan tidak mudah jika harus mengandalkan faktor produksi barang dan jasa, maka dari itu faktor – faktor lain sangat menentukan, seperti halnya pinjaman dan investasi.



Menurut Boediono, Investasi adalah pengeluaran oleh sektor produsen untuk pembelian barang dan jasa untuk menambah stok yang digunakan atau untuk perluasan pabrik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa investasi itu adalah sebuah keputusan untuk menunda konsumsi sumber daya atau bagian penghasilan demi meningkatkan kemampuan menambah atau menciptakan nilai hidup (penghasilan dan atau kekayaan) dimasa mendatang.

Perlu diperhatikan bahwa menurut Sadono Sukirno (2000) kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus – menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional, dan meningkatkan taraf kehidupan rakyat. Peranan ini bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan investasi yaitu investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat, pendapatan nasional, dan kesempatan kerja.

Ada tiga jenis pengeluaran investasi yaitu investasi tetap bisnis, mencakup peralatan dan struktur yang dibeli perusahaan untuk proses produksi, investasi residential yaitu investasi yang mencakup rumah baru yang dibeli untuk tempat tinggal atau disewakan, dan investasi persediaan yaitu mencakup barang-barang perusahaan yang disimpan digudang. Bentuk investasi bermacam-macam seperti berbentuk tabungan, emas, saham dan obligasi serta lainnya.

Mengikuti kerangka berpikir dari model Harrod – Domar, didalam suatu ekonomi tertutup (tanpa sektor luar negeri) dalam kondisi *full employment*, dan tanpa mobilitas *capital*, tabungan (S) menjadi sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi, mekanismenya melalui pertumbuhan investasi (I). Oleh karena itu investasi dapat dikatakan sebagai fungsi dari tabungan $I = f(S)$. Semakin tinggi tingkat tabungan yang dapat diciptakan maka semakin besar kemampuan negara untuk melakukan investasi. Selanjutnya, peningkatan investasi menambah lebih banyak lagi *capital* dan lewat proses *multiplier* menghasilkan laju pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan perkapita yang lebih tinggi. Dengan rasio S/Y tetap tidak berubah.



Itulah sebabnya, agar pertumbuhan ekonomi dapat didorong lebih tinggi, sehingga akan lebih banyak lapangan kerja yang tercipta, khususnya di sektor formal, maka investasi yang besar sangat dibutuhkan, khususnya investasi global, mengingat terbatasnya kapasitas tabungan domestik untuk membiayai investasi. Dalam kaitannya dengan tabungan dan investasi, lembaga-lembaga keuangan seperti perbankan mempunyai peran yang besar dalam menunjang kegiatan ekonomi tersebut. Peranan ini tidak lepas dari sistem ekonomi yang menempatkan perbankan dan lembaga keuangan sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dana dari pihak ketiga.

Penghimpunan dana dari masyarakat digunakan sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan khususnya yang berasal dari dalam negeri dan menjadi stimulus pergerakan ekonomi masyarakat. Disamping menghimpun dana, perbankan juga harus menyalurkan dana yang berupa kredit baik kredit konsumsi, modal kerja maupun kredit investasi. Pemberian kredit ini selain mendorong berkembangnya kegiatan usaha juga meningkatkan permintaan produk barang dan jasa di masyarakat. Penyaluran kredit juga merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan kinerja perbankan.

6.1. Penghimpunan Dana

Seiring dengan membaiknya kinerja perbankan, meningkatnya pendapatan masyarakat, dan semakin banyaknya produk perbankan yang ditawarkan, mendorong peningkatan penghimpunan dana khususnya yang berasal dari dalam negeri. Dalam menjalankan operasional kegiatan perbankan, Bank memiliki tiga sumber dana yaitu: (1) dana yang bersumber dari masyarakat, (2) dana yang bersumber dari bank itu sendiri, (3) dana yang bersumber dari lembaga lain. Penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) yang berasal dari masyarakat berupa giro, deposito, dan tabungan.

**Tabel 6.1. Penghimpunan Dana Perbankan Menurut Jenisnya
di Kota Banjarbaru Tahun 2018 (Juta Rupiah)**

Tahun *) dan Bulan	Jenis Penghimpunan			
	Giro	Deposito	Tabungan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2018	790.294	758.310	2.663.208	4.211.813
Januari	652.389	667.895	2.386.077	3.706.361
Februari	582.296	745.444	2.290.641	3.618.381
Maret	638.766	752.980	2.433.934	3.825.680
April	667.098	649.547	2.372.078	3.688.724
Mei	695.056	813.811	2.467.924	3.976.792
Juni	559.098	809.733	2.499.838	3.868.668
Juli	802.311	691.266	2.395.790	3.889.367
Agustus	813.457	783.159	2.483.878	4.080.494
September	741.611	783.503	2.421.958	3.947.071
Oktober	812.643	660.010	2.497.721	3.970.374
Nopember	1.014.034	704.326	2.391.040	4.109.400
Desember	790.294	758.310	2.663.208	4.211.813

Sumber : Statistik Ekonomi-Kuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Bank Indonesia

*) Posisi Bulan Desember

**Tabel 6.2. Penghimpunan Dana Perbankan di Kota Banjarbaru
Tahun 2014 – 2018 (Juta Rupiah)**

Tahun	Jenis Penghimpunan			
	Giro	Deposito	Tabungan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2014	495.410	358.827	1.659.922	2.514.159
2015	628.416	398.249	1.951.349	2.978.014
2016	421.955	668.486	2.056.056	3.146.497
2017	593.433	667.586	2.324.103	3.585.121
2018	790.294	758.310	2.663.208	4.211.813

Sumber : Statistik Ekonomi-Kuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Bank Indonesia



Pada tahun 2018 dana perbankan yang terhimpun di Kota Banjarbaru sejumlah 4,21 triliun rupiah. Penghimpunan dana tersebut meningkat sebesar 17,48 persen dibandingkan tahun 2017 yang sebesar 3,59 triliun rupiah. Adapun sumber dana terbesar berasal dari tabungan yaitu sejumlah 2,66 triliun rupiah atau 63,23 persen dari total dana. Sisanya merupakan giro sejumlah 0,79 triliun rupiah atau 18,76 persen, dan deposito sejumlah 0,76 triliun rupiah atau 18 persen.

6.2. Penyaluran Kredit

Selain sebagai penghimpun dana, bank juga berfungsi sebagai penyalur kredit terhadap masyarakat. Fungsi intermediasi bank akan berjalan dengan baik jika kemampuan menghimpun dana dan penyaluran kredit berjalan seirama. Oleh karena itu, bank berusaha untuk menawarkan berbagai macam kredit dan beragam keuntungan. Kebutuhan dana oleh masyarakat akan lebih mudah diberikan oleh bank apabila masyarakat yang membutuhkan dana dapat memenuhi semua persyaratan yang diberikan oleh bank.

Penyaluran dana merupakan aktivitas yang sangat penting bagi bank, karena bank akan memperoleh pendapatan atas dana yang disalurkan, dan ini merupakan pendapatan terbesar dari setiap bank. Pendapatan tersebut dapat berupa pendapatan bunga untuk bank konvensional, dan bagi hasil atau lainnya untuk bank syariah. Namun demikian, pelaku perbankan juga tetap memegang prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit tersebut untuk menghindari kredit macet (*non performing loan*). Hal ini disebabkan pemberian kredit disamping dapat meningkatkan kinerja perbankan, juga dapat meningkatkan resiko yang harus ditanggung oleh perbankan.

**Tabel 6.3. Penyaluran Kredit Menurut Jenis Penggunaan di Kota Banjarbaru
Tahun 2018 (Jutaan Rupiah)**

Tahun ^{*)}	Jenis Penggunaan Kredit			
	Modal Kerja	Investasi	Konsumsi	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2018	1.226.437	641.787	3.256.610	5.124.834
Januari	968.135	846.516	3.087.929	4.902.579
Februari	1.002.787	854.678	3.079.064	4.936.529
Maret	1.093.389	912.111	3.120.638	5.126.137
April	1.124.533	909.879	3.115.162	5.149.575
Mei	1.135.836	921.162	3.141.833	5.198.831
Juni	1.151.520	927.651	3.155.754	5.234.925
Juli	1.129.830	655.555	3.136.395	4.921.780
Agustus	1.135.247	856.991	3.150.335	5.142.573
September	1.137.763	692.156	3.174.517	5.004.435
Oktober	1.169.277	673.729	3.194.336	5.037.341
Nopember	1.214.383	641.981	3.214.556	5.070.920
Desember	1.226.437	641.787	3.256.610	5.124.834

Sumber : Statistik Ekonomi-Kuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Bank Indonesia

**) Posisi Bulan Desember*

Secara umum jumlah penyaluran kredit pada posisi bulan Desember tahun 2018 di Kota Banjarbaru adalah sebesar 5,12 triliun rupiah atau meningkat sebesar 3,73 persen dibandingkan tahun 2017 yang sebesar 4,94 triliun rupiah. Dari total penyaluran kredit tahun 2018 tersebut sekitar 63,55 persen atau 3,26 triliun rupiah digunakan untuk konsumsi. Sisanya yaitu 23,93 persen atau 1,23 triliun rupiah untuk modal kerja, dan 12,52 persen atau 0,64 triliun rupiah untuk investasi. Besarnya proporsi kredit untuk keperluan konsumsi sebenarnya kurang menggembirakan bagi dunia usaha. Hal ini mengindikasikan masyarakat lebih cenderung menggunakan uangnya untuk hal-hal yang kurang produktif dan bukan untuk hal-hal yang dapat meningkatkan penghasilan keluarga. Dengan kata lain dapat dikatakan adanya kecenderungan masyarakat Kota Banjarbaru untuk berlaku konsumtif.

**Tabel 6.4. Penyaluran Kredit Menurut Sektor di Kota Banjarbaru
Tahun 2014 - 2018 (Juta Rupiah)**

Tahun	Jenis Penggunaan Kredit			
	Modal Kerja	Investasi	Konsumsi	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2014	908.858	679.347	2.201.113	3.789.318
2015	874.585	649.075	2.533.742	4.057.402
2016	864.373	834.153	2.751.613	4.450.138
2017	979.598	848.362	3.112.450	4.940.410
2018	1.226.437	641.787	3.256.610	5.124.834

Sumber : Statistik Ekonomi-Kuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Bank Indonesia

Jika dilihat penyaluran kredit menurut sektor ekonomi seperti pada tabel 6.5, sebagian besar sektor mengalami kenaikan dalam hal penyerapan kredit, kecuali sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang, konstruksi, jasa keuangan dan asuransi, serta jasa lainnya.

Secara total penyaluran kredit ke lapangan usaha tersebut berjumlah 1,90 triliun rupiah pada tahun 2018, meningkat sebesar 2,27 persen dibandingkan tahun 2017 yang berjumlah 1,86 triliun rupiah. Sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor merupakan penyerap kredit terbesar di tahun 2018 yakni sejumlah 0,72 triliun rupiah atau sebesar 37,74 persen.

**Tabel 6.5. Penyaluran Kredit Menurut Sektor
di Kota Banjarbaru Tahun 2016 - 2018 (Jutaan Rupiah)**

Sektor	Penyaluran Kredit		
	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	201.299	232.667	41.297
Pertambangan dan Penggalian	26.718	26.644	38.512
Industri Pengolahan	125.420	153.330	276.854
Pengadaan Listrik dan Gas	1.318	1.242	885
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	339	497	259
Konstruksi	270.019	312.915	284.581
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor	543.772	570.106	717.895
Transportasi dan Pergudangan	85.119	84.866	260.133
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	54.287	40.174	40.372
Informasi dan Komunikasi	1.223	268	221
Jasa Keuangan dan Asuransi	14.166	10.274	6.923
Real Estate	49.400	33.541	37.124
Jasa Perusahaan	37.133	46.429	65.607
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-	3	28.048
Jasa Pendidikan	7.458	5.821	5.878
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Lainnya	4.520	5.049	6.088
Jasa Lainnya	307.997	336.019	91.341
Jumlah	1.730.186	1.859.844	1.902.017

Sumber : Statistik Ekonomi-Kuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Bank Indonesia

**) Posisi Bulan Desember*

6.3. Penanaman Modal

Dinas Penanaman dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan terus memacu arus masuk investasi untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi dengan mengaplikasikan sejumlah terobosan perizinan agar menarik minat investor. Terobosan yang diterapkan antara lain memangkas dokumen perizinan lewat sistem online untuk mempersingkat proses, penggabungan instansi perizinan, dan mempercepat pelimpahan wewenang penerbitan izin secara menyeluruh, dan meningkatkan strategi promosi investasi lewat pameran.

Tabel 6.6. Proyek-proyek Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Yang Telah Disetujui Pemerintah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018

Kabupaten/Kota	Jumlah Proyek	Rencana Investasi (Juta Rupiah)	Rencana Tenaga Kerja
(1)	(2)	(3)	(4)
Tanah Laut	9	7.430.342,08	1.580
Kotabaru	81	1.782.509,28	1.787
Banjar	143	388.273,01	4.066
Barito Kuala	111	493.214.373,96	2.794
Tapin	13	9.930.415,97	2.628
HSS	38	511.199,91	942
HST	120	19.095,22	114
HSU	0	0	0
Tabalong	53	485.483,83	1.552
Tanah Bumbu	163	17.722.508,42	3.118
Balangan	54	31.440,00	1.703
Banjarmasin	273	2.073.348,90	1.684
Banjarbaru	287	2.494.168,05	5.781
Kalimantan Selatan	1.345	536.083.158,68	27.749

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Investasi atau penanaman modal merupakan variabel ekonomi yang mampu menggerakkan perekonomian. Beberapa teori ekonomi menyebutkan betapa pentingnya peranan investasi dalam meningkatkan output. Investasi akan menumbuhkan kegiatan ekonomi baik kegiatan baru maupun kegiatan ekonomi yang telah ada. Investasi merupakan langkah awal kegiatan produksi. Dengan posisi tersebut, investasi pada hakikatnya juga merupakan langkah awal kegiatan pembangunan ekonomi. Dinamika penanaman modal mempengaruhi tinggi rendahnya pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karenanya, dalam upaya menumbuhkan perekonomian, setiap negara senantiasa berusaha menciptakan iklim yang dapat menggairahkan investasi.

Tabel 6.7. Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 (Juta Rupiah)

Kabupaten/Kota	Jumlah LKPM	Realisasi Investasi (Juta Rp)	Rencana Tenaga Kerja
(1)	(2)	(3)	(4)
Tanah Laut	24	590.734	6.552
Kotabaru	23	1.799.829	2.301
Banjar	47	202.579	364
Barito Kuala	2	13.210	169
Tapin	7	326.189	1.149
HSS	0	0	0
HST	1	NA	NA
HSU	0	0	0
Tabalong	8	3.177.789	467
Tanah Bumbu	15	2.706.521	3.709
Balangan	4	349.261	234
Banjarmasin	29	734.195	1.082
Banjarbaru	10	74.934	228
Kalimantan Selatan	170	9.975.240	16.255

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

**) LKPM : Data realisasi investasi dan tenaga kerja berdasarkan laporan kegiatan penanaman modal*

Pengaturan tentang kegiatan penanaman modal di Indonesia diatur dalam UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagai revisi UU 11/1970 tentang PMA dan UU No 12/1970 tentang PMDN. Dalam UU tersebut dijabarkan bahwa penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing. Dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, disebutkan bahwa kegiatan penanaman modal diselenggarakan berdasarkan “asas kepastian hukum” yaitu asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal. Pengaturan berinvestasi sesuai UU ini sebagai salah satu bentuk upaya dalam memberikan rasa aman berinvestasi di negara kita.

Tabel 6.8. Proyek-Proyek Penanaman Modal Asing (PMA) Yang Telah Disetujui Pemerintah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018

Kabupaten/Kota	Jumlah Proyek	Rencana Investasi (Ribu US\$)	Rencana Tenaga Kerja
(1)	(2)	(3)	(4)
Tanah Laut	1	790.359,36	1.169
Kotabaru	1	52.000,00	120
Banjar	1	10,00	8
Barito Kuala	1	70.468,72	406
Tapin	1	1.153.868,05	319
HSS	0	0	0
HST	0	0	0
HSU	0	0	0
Tabalong	0	0	0
Tanah Bumbu	2	3.844.084,86	83
Balangan	0	0	0
Banjarmasin	0	0	0
Banjarbaru	0	0	0
Kalimantan Selatan	7	5.910.790,99	2.105

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Sebagai penyangga pertumbuhan ekonomi, perkembangan investasi di Provinsi Kalimantan Selatan baik PMA maupun PMDN menunjukkan keadaan yang menggembirakan. Menurut data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2018 investasi PMDN yang sudah terealisasi di Kalimantan Selatan sebesar 9,98 triliun rupiah sedangkan realisasi investasi PMA mencapai 129.147 ribu US\$. Untuk investasi PMDN rencananya mampu memperkerjakan TKI sebanyak 16.255 orang, sedangkan investasi PMA mampu memperkerjakan TKI sebanyak 6.741 orang.

Tabel 6.9. Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) yang Telah Disetujui Pemerintah Menurut Kab/Kota Di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018

Kabupaten/Kota	Jumlah LKPM	Rencana Investasi (Ribu US\$)	Rencana Tenaga Kerja
(1)	(2)	(3)	(4)
Tanah Laut	15	3.211	808
Kotabaru	15	10.932	2.027
Banjar	5	0	15
Barito Kuala	12	1.516	236
Tapin	2	1.604	3
HSS	0	0	0
HST	1	NA	2
HSU	0	0	0
Tabalong	5	81.108	2.721
Tanah Bumbu	11	2.317	202
Balangan	6	26.017	320
Banjarmasin	15	2.073	395
Banjarbaru	12	369	12
KALIMANTAN SELATAN	99	129.147	6.741

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

*) LKPM : data realisasi investasi dan tenaga kerja berdasarkan laporan kegiatan penanaman modal



Mengingat era pasar bebas ASEAN sudah di depan mata, di mana produk-produk yang diperdagangkan harus berdaya saing dan memiliki nilai lebih, maka investasi di bidang pengolahan lanjutan sumber daya alam seyogyanya menjadi skala prioritas. Karena jika hanya berkuat pada industri pengolahan barang setengah jadi, di samping nilai tambahnya rendah, tenaga kerja yang diserap pun sedikit, dan yang pasti daya kompetitif maupun komparatif di kancah regional secara otomatis juga rendah.

Sebagai wilayah yang strategis dan memiliki Sumber Daya Manusia yang berkualitas, Kota Banjarbaru memiliki potensi yang besar menjadi salah satu daerah tujuan investasi di Kalimantan Selatan. Tahun 2018, rencana proyek PMDN yang terealisasi di Kota Banjarbaru sebesar 74,93 miliar rupiah sedangkan proyek PMA yang terealisasi sebesar 369 ribu US dolar. Nilai realisasi proyek PMDN tersebut memang cukup mengecewakan karena tidak memenuhi target perencanaan sebelumnya yang sebesar 2,49 triliun rupiah. Untuk meningkatkan minat investor asing dalam berinvestasi di Kota Banjarbaru salah satu upaya yang dapat ditempuh adalah dengan memangkas rantai birokrasi dalam pemberian perizinan. Selain itu pemberian insentif bagi investor yang mau menanamkan modal juga dapat dilakukan.

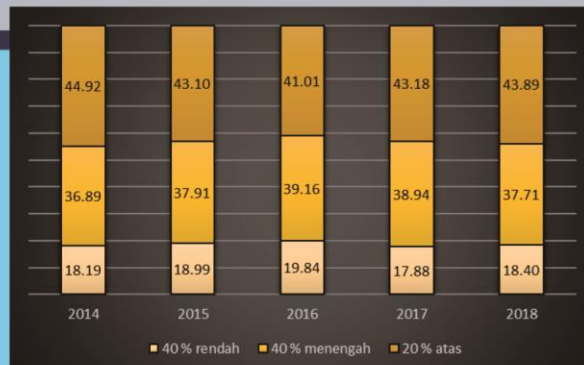
BAB VII

KETIMPANGAN PENDAPATAN

RASIO GINI



DISTRIBUSI PENDAPATAN PERKAPITA (%)



SECARA UMUM,
TINGKAT KESENJANGAN
DISTRIBUSI PENDAPATAN
PENDUDUK KOTA BANJARBARU
RELATIF RENDAH



**HAL INI DITUNJUKKAN DENGAN 40% PENDUDUK BERPENDAPATAN RENDAH
DAPAT MENIKMATI PENDAPATAN DIATAS 17% DARI TOTAL PENDAPATAN
REGIONAL PENDUDUK KOTA BANJARBARU**



KETIMPANGAN PENDAPATAN

Masalah yang umumnya sering dihadapi oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia adalah kesenjangan ekonomi dan kemiskinan. Kesenjangan ekonomi sering dikenal sebagai ketimpangan dalam distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Perhatian pembangunan di negara-negara berkembang sebagian terfokus pada dilema kompleks antara pertumbuhan dan distribusi pendapatan. Keduanya sama-sama penting, namun hampir selalu sulit diwujudkan bersamaan. Di awal-awal masa orde baru, strategi pembangunan ekonomi yang dianut oleh pemerintah orde baru lebih berorientasi kepada pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan terus berharap adanya *trickle down effect* pertumbuhan ke masyarakat kelas bawah.

Kondisi ini merupakan tantangan pembangunan yang harus dihadapi mengingat masalah kesenjangan itu dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa serta dapat menyulitkan dalam melaksanakan pembangunan ekonomi nasional yang berlandaskan pemerataan. Ketimpangan merupakan permasalahan klasik yang dapat ditemukan dimana saja. Oleh karena itu ketimpangan tidak dapat dimusnahkan, melainkan hanya bisa dikurangi sampai pada tingkat yang dapat diterima oleh suatu sistem sosial tertentu agar keselarasan dalam sistem tersebut tetap terpelihara dalam proses pertumbuhannya. Ketimpangan yang tidak segera diatasi akan berakibat lebih parahnya kondisi tersebut hingga pameo klasik “yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin” semakin terbukti. Ungkapan pameo itu adalah wujud dari potret nyata ketimpangan yang terjadi dewasa ini bahwa semakin lebar jurang pendapatan antara kaya dan miskin.



Secara harfiah, **ketimpangan pendapatan** didefinisikan sebagai gambaran dari sebuah pendistribusian pendapatan masyarakat di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu yang diperoleh dengan menghitung persentase jumlah pendapatan penduduk dari kelompok yang berpendapatan rendah 40% pada penduduk lapisan bawah/terendah dibandingkan dengan total pendapatan seluruh penduduk. *World Bank* (Bank Dunia) membagi pendapatan masyarakat yang diurutkan dari paling rendah sampai ke paling tinggi yang dibagi kedalam tiga kriteria, yaitu:

1. Jumlah proporsi pendapatan yang diterima oleh 40 persen penduduk berpendapatan rendah.
2. Jumlah proporsi pendapatan yang diterima oleh 40 persen penduduk berpendapatan sedang/menengah.
3. Jumlah proporsi pendapatan yang diterima oleh 20 persen penduduk berpendapatan tinggi.

Berdasarkan kategori diatas, *World Bank* kemudian membagi ketimpangan pendapatan menjadi tiga tingkatan yaitu:

1. Ketimpangan Pendapatan Tinggi (*highly inequality*)
2. Ketimpangan Pendapatan Rendah (*low inequality*)
3. Ketimpangan Pendapatan Sedang (*moderate inequality*)

Ketimpangan pembangunan selama ini berlangsung dalam berbagai bentuk, aspek, dan dimensi. Seperti ketimpangan hasil pembangunan misalnya dalam hal pendapatan perkapita atau pendapatan daerah, dan ketimpangan kegiatan atau proses pembangunan itu sendiri. Munculnya kawasan-kawasan kumuh di tengah beberapa kota besar, serta sebaliknya hadirnya kawasan-kawasan pemukiman mewah di tepian kota atau bahkan di pedesaan adalah suatu bukti nyata dari adanya suatu ketimpangan yang terjadi. Hal yang mungkin akan memperparah kondisi ketimpangan adalah ketika ketimpangan itu sendiri membuat terjadinya perbedaan aksesibilitas faktor produksi. Perbedaan ini akan menambah ketimpangan, karena adanya kekurangan akses faktor produksi semisal



modal, SDA akan semakin memperkecil peluang adanya persamaan pendapatan antara golongan ekonomi penduduk.

Menurut para pakar, ketimpangan yang terjadi disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu faktor pasar (*market forces*) dan faktor institusi (*institutional forces*). Keduanya bekerja secara terpisah tetapi berakhir pada titik yang sama. **Faktor pasar** muncul akibat adanya proses globalisasi yang meningkatkan kebutuhan akan tenaga kerja dengan *skill* tertentu, sehingga mereka yang memiliki *skill* tersebut akan mengalami peningkatan pendapatan terutama di kalangan yang melek teknologi dan hal sebaliknya terjadi pada mereka yang mengalami ketertinggalan *skill* tersebut yang akan tergerus oleh arus globalisasi. Sementara itu **faktor institusi** terlihat dari keberpihakan institusi dalam mendesain struktur perekonomian suatu daerah. Faktor institusi ini terefleksi dalam berbagai kebijakan pemerintah dimana akan terlihat apakah kebijakan yang dihasilkan akan *bias* pada kelompok tertentu atau mampu menjaga integritas dengan memomorsatukan kebersamaan, yang ditandai dengan adanya kesempatan bagi seluruh rakyat untuk terlibat dalam aktifitas ekonomi dan politik, tanpa ada perbedaan perlakuan. Di sisi lain, adanya keragaman karakteristik di suatu wilayah mempunyai pengaruh kuat pada terciptanya pola kebijakan pembangunan ekonomi di wilayah tersebut yang akan berpengaruh pada kemampuan untuk tumbuh dan pada gilirannya akan mengakibatkan beberapa wilayah mampu tumbuh cepat sementara wilayah lainnya tumbuh lambat. Selanjutnya kemampuan tumbuh yang berbeda ini akan mengakibatkan terjadinya ketimpangan pendapatan antar wilayah.



7.1 Teori Ketimpangan Pendapatan

Dalam beberapa studi empiris terdapat dua jenis ketimpangan yang menjadi pusat perhatian. Pertama, ketimpangan distribusi pendapatan antar golongan pendapatan yang diukur dengan indeks Gini dan ketimpangan antar daerah. Ketimpangan antar daerah juga penting untuk diteliti karena gravitasi aktivitas ekonomi Indonesia masih cenderung terkonsentrasi di beberapa pusat pertumbuhan seperti pada level nasional berada di kawasan barat Indonesia (KBI). Struktur perekonomian Indonesia secara spasial masih didominasi kelompok provinsi di Pulau Jawa yang memberikan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) lebih dari separuh, kemudian Pulau Sumatera dan sisanya di Kawasan Timur Indonesia (KTI).

Ketimpangan antardaerah di Indonesia dapat diukur dengan indeks *entropi Theil*. Indeks entropi menawarkan beberapa kelebihan dibandingkan dengan indeks konsentrasi spasial lain. Keunggulan utama indeks ini adalah pada suatu titik waktu, indeks ini menyediakan ukuran derajat konsentrasi (ataupun dispersi) distribusi spasial pada sejumlah daerah dan subdaerah dalam suatu negara. Indeks ini digunakan untuk mengukur kesenjangan ekonomi dan konsentrasi Industri. Dalam indeks Entropi ini merupakan indeks konsentrasi spasial yang menyediakan ukuran derajat konsentrasi distribusi spasial pada sejumlah daerah dan sub daerah dalam suatu negara dan antar sub unit daerah dalam suatu kawasan pada suatu titik waktu. Nilai indeks entropi yang lebih rendah berarti menunjukkan adanya kesenjangan yang rendah, dan sebaliknya (Mudrajad Kuncoro, 2004).

Myrdal (1957) mengemukakan teori ketimpangan yang menerangkan ketimpangan antar daerah dengan membangun teori keterbelakangan dan pembangunan ekonominya disekitar ide ketimpangan regional pada taraf nasional dan internasional. Untuk menjelaskan hal itu, Myrdal menggunakan ide *spread effect* dan *backwash effect* sebagai bentuk pengaruh penjarangan dari pusat pertumbuhan ke daerah sekitar. *Spread effect* didefinisikan sebagai suatu



pengaruh yang menguntungkan (*favorable effect*), yang mencakup aliran kegiatan-kegiatan investasi dari pusat pertumbuhan ke wilayah sekitar. *Backwash effect* didefinisikan sebagai pengaruh yang merugikan (*infavorable effect*) yang mencakup aliran manusia dari wilayah sekitar termasuk aliran modal ke wilayah inti, sehingga mengakibatkan berkurangnya modal pembangunan bagi wilayah pinggiran yang sebenarnya diperlukan untuk dapat mengimbangi perkembangan wilayah inti. Myrdal mengemukakan ketimpangan regional terjadi akibat besarnya pengaruh *backwash effect* dibandingkan dengan *spread effect* di negara-negara terbelakang.

Teori Gunnar Myrdal menekankan proses divergen yang menyebabkan ketimpangan makin melebar. Fenomena ini dijelaskan Myrdal sebagai akibat dari proses penyebab akumulatif (*cumulative causation/CC*). Myrdal (1957) menyebut adanya dampak kurang menguntungkan untuk menjelaskan fenomena meningkatnya ketimpangan antara negara maju dan negara berkembang. Ia berpendapat, *backwash effect* lebih besar daripada dampak penyebaran. Dampak penyebaran adalah dampak dari ekspansi di pusat kegiatan ekonomi ke daerah yang relatif tertinggal melalui kenaikan permintaan produk pertanian (misalnya bahan pangan), bahan baku, serta barang konsumsi yang dihasilkan industri kecil. Inilah yang minim terjadi di Indonesia karena: (1) produk pertanian dan industri masih banyak yang diimpor dari luar; (2) lemahnya keterkaitan antara usaha besar dan kecil.

Teori Myrdal tentang CC tak menyangkal adanya kemungkinan proses konvergen akibat dampak penyebaran. Penyebabnya adalah faktor-faktor "non-ekonomi" atau kelembagaan. Karena itu, analisis proses pembangunan yang hanya menekankan faktor ekonomi menjadi kurang relevan karena faktor kelembagaan, historis, sosial, dan kultural juga berperan. Meski kinerja ekonomi pascakrisis cenderung membaik, indikator ketimpangan dan kemiskinan menunjukkan bukti adanya eksklusi sosial-ekonomi bagi kebanyakan manusia Indonesia.



Teori lain dikemukakan oleh **Kuznets** (1955) yang menjelaskan suatu hipotesis yang terkenal dengan sebutan “Hipotesis U terbalik”. Hipotesis ini dihasilkan melalui suatu kajian empiris terhadap pola pertumbuhan sejumlah negara didunia, pada tahap awal pertumbuhan ekonomi terdapat *trade-off* antara pertumbuhan dan pemerataan. Pola ini disebabkan karena pertumbuhan pada tahap awal pembangunan cenderung dipusatkan pada sektor modern perekonomian yang pada saat itu kecil dalam penyerapan tenaga kerja. Ketimpangan membesar karena kesenjangan antar sektor modern dan tradisional meningkat. Peningkatan tersebut terjadi karena perkembangan disektor modern lebih cepat dibandingkan dengan sektor tradisional. Akan tetapi dalam jangka panjang pada saat kondisi ekonomi mencapai tingkat kedewasaan (*maturity*) dan dengan asumsi mekanisme pasar bebas serta mobilitas semua faktor-faktor produksi antar negara tanpa sedikitpun rintangan atau distorsi, maka perbedaan dalam laju pertumbuhan *output* antar negara akan cenderung mengecil bersamaan dengan tingkat pendapatan perkapita dan laju pertumbuhan rata-ratanya yang semakin tinggi di setiap negara, yang akhirnya menghilangkan kesenjangan.

7.2 Mengukur Ketimpangan Melalui Kurva Lorenz dan Gini Ratio

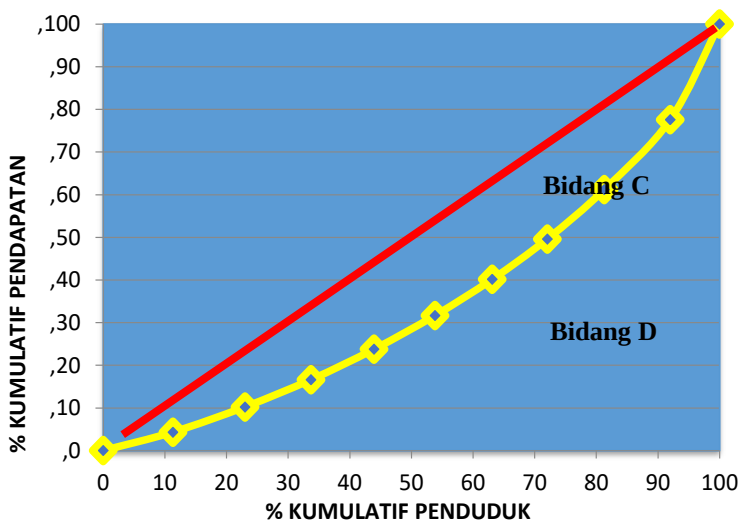
Hubungan antara distribusi jumlah penduduk dan distribusi pendapatan sering digambarkan secara grafis dengan Kurva Lorenz, sementara ukuran umum yang biasa digunakan untuk melihat distribusi pendapatan atau kekayaan yang menunjukkan seberapa merata pendapatan dan kekayaan didistribusikan diantara populasi disebut Koefisien Gini (*Gini Ratio*). Secara grafis, hubungan dan perpaduan antara Kurva Lorenz dan Koefisien Gini dapat dilihat pada Gambar 6.1.

Pada gambar tersebut dapat dilihat sumbu vertikal menunjukkan persentase jumlah pendapatan dan sumbu horisontal menunjukkan persentase jumlah penduduk, sedangkan garis diagonal adalah garis yang menggambarkan

pemerataan pendapatan sempurna. Kurva Lorenz ditunjukkan oleh garis yang melengkung di bawah garis diagonal. Semakin dekat posisi garis lorenz ke garis diagonal, berarti semakin merata pendapatan. Sebaliknya bila garis lorenz semakin menjauhi garis diagonal, berarti semakin tidak merata pendapatan yang berarti juga semakin banyak kecenderungan orang miskin di wilayah tersebut.

Koefisien Gini pada gambar di bawah didefinisikan sebagai luas bidang A dibagi luas bidang A+B. Secara ekstrim, jika $A=0$ maka koefisien gini menunjukkan nilai 0 yang berarti terjadi distribusi pendapatan yang sangat merata yaitu setiap orang memiliki jumlah penghasilan atau kekayaan yang sama persis, sedangkan jika $B=0$ maka koefisien gini menunjukkan nilai 1 yang berarti terjadi ketimpangan sempurna yaitu hanya terdapat satu orang yang memiliki segalanya sedangkan yang lain tidak memiliki apa-apa. Indeks Gini memiliki kisaran 0 sampai 1. Semakin kecil nilai koefisien gini mengindikasikan semakin meratanya distribusi pendapatan dan sebaliknya.

Gambar 7.1 Distribusi Pendapatan Penduduk Kota Banjarbaru Tahun 2018



Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Selatan



Kurva lorenz untuk Kota Banjarbaru pada tahun 2018 dapat dilihat dari gambar 7.1 garis diagonal (warna merah) adalah merupakan garis pemerataan sempurna. Jika jarak kurva lorenz jauh dari garis diagonal, maka distribusi pendapatan kurang merata atau terjadi ketimpangan, akan tetapi jika kurva lorenz jaraknya dekat dengan garis diagonal maka distribusi pendapatan cenderung lebih merata.

Pada hakekatnya kesenjangan ekonomi atau ketimpangan dalam distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok berpendapatan rendah adalah hal yang tidak dapat terhindarkan baik itu di daerah yang miskin, daerah sedang berkembang, bahkan daerah yang tergolong maju sekalipun. Hanya saja yang membedakan dari semua itu adalah seberapa besar tingkat ketimpangan yang terjadi pada masing-masing daerah.

7.3 Menghitung Ketimpangan Pendapatan Kota Banjarbaru

Selama beberapa tahun ini, ekonomi Kota Banjarbaru tumbuh relatif cukup baik meskipun dalam periode terakhir terjadi sedikit perlambatan pertumbuhan. Pertumbuhan ekonomi sejatinya diharapkan akan meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat secara lebih adil dengan mengurangi sedikit demi sedikit kesenjangan ekonomi. Setiap *stakeholder* yang terlibat pembangunan ekonomi di Kota Banjarbaru menginginkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Konsep pertumbuhan berkualitas lebih menekankan pertumbuhan yang mendorong meningkatnya kesempatan kerja lokal dan mampu menurunkan kemiskinan serta mengurangi kebocoran pertumbuhan ke luar wilayah. Muara dari pertumbuhan berkualitas tentunya adalah kesejahteraan masyarakat yang cukup merata. Namun disadari atau tidak, proses ekonomi merupakan proses dalam masyarakat yang rasional dan bisa jadi lebih menguntungkan pemilik modal.

Mengukur ketimpangan pendapatan suatu wilayah memang tidak sederhana, butuh pemahaman yang lebih mendalam terhadap karakteristik ekonomi regional dan karakteristik penduduk serta struktur tenaga kerjanya agar gambaran ukuran ketimpangan lebih jelas dan mampu menghasilkan solusi praktis untukantisipasi di masa yang akan datang. Mengukur ketimpangan dengan *gini ratio* berarti mengasumsikan bahwa pendapatan masyarakat diproksi dengan variabel pengeluaran. Dalam kurun waktu 2014 - 2018, data *gini ratio* Kota Banjarbaru terlihat cukup fluktuatif.

Tabel 7.1. Gini Ratio dan Pertumbuhan Ekonomi Kota Banjarbaru Tahun 2014 - 2018

Tahun	Gini Rasio	Pertumbuhan Ekonomi
(1)	(2)	(3)
2014	0,365	6,68
2015	0,352	6,91
2016	0,336	6,94
2017	0,365	6,96
2018	0,365	6,90

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Selatan

Pola distribusi pendapatan masyarakat yang didasarkan pada hasil perhitungan *Gini Ratio* baru menggambarkan tingkat pemerataan pendapatan secara global. Sejauh mana atau berapa bagian yang diterima oleh kelompok berpendapatan terendah/miskin belum nampak jelas. Sehubungan dengan ini, ukuran yang dikembangkan oleh Pusat Penelitian Bank Dunia (World Bank) dan Lembaga Studi Pembangunan Universitas Sussex, memberikan gambaran lebih jelas mengenai masalah ketidakadilan (*inequality*) melalui indikator yang disebut *relative inequality* atau biasa disebut dengan kriteria Bank Dunia.

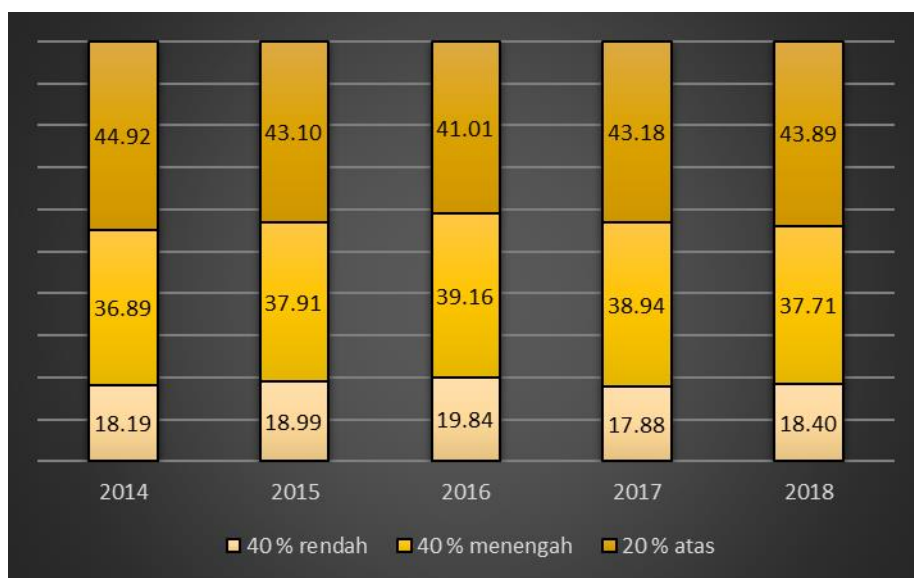
Kriteria Bank Dunia ini, membagi jumlah penduduk ke dalam tiga kelompok, yakni 20 persen penduduk berpendapatan tinggi, 40 persen berpendapatan menengah, dan 40 persen berpendapatan rendah. Kelompok

pertama adalah bagian dari penduduk terkaya, kelompok kedua sering dikatakan sebagai masyarakat kelas menengah, dan kelompok ketiga adalah bagian dari populasi termiskin.

Relative inequality diartikan sebagai ketimpangan dalam distribusi pendapatan yang diterima oleh berbagai golongan masyarakat. Adapun kriteria *relative inequality* adalah :

1. *High inequality* (distribusi pendapatan sangat timpang/tinggi), jika 40 persen penduduk berpendapatan terendah menerima kurang dari 12 persen dari bagian pendapatan nasional atau bagian GNP.
2. *Moderate inequality* (ketimpangan dianggap sedang), jika 40 persen penduduk berpendapatan terendah menerima antara 12 sampai 17 persen dari bagian pendapatan nasional atau GNP.
3. *Low inequality* (distribusi pendapatan tidak terlalu timpang/rendah), jika 40 persen penduduk berpendapatan terendah menerima lebih dari 17 persen dari bagian pendapatan nasional atau bagian GNP.

Gambar 7.2. Distribusi Pendapatan Perkapita Menurut Kriteria World Bank Kota Banjarbaru Tahun 2014 - 2018 (Persen)



Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Selatan



Tingkat kesenjangan distribusi pendapatan di Kota Banjarbaru dari tahun 2014 - 2018 tergolong relatif rendah atau tidak terlalu timpang (*low inequality*). Ini ditunjukkan oleh kelompok 40 persen dari penduduk berpendapatan rendah dapat menikmati pendapatan di atas 17 persen dari total pendapatan regional penduduk Kota Banjarbaru. Ketimpangan pendapatan yang terjadi di Kota Banjarbaru ini masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan ketimpangan pendapatan Provinsi Kalimantan Selatan secara umum.

Namun demikian ketimpangan di Provinsi Kalimantan Selatan dapat dikatakan hampir sama yaitu berada pada level *low inequality* (distribusi pendapatan tidak terlalu timpang/rendah) menurut Kriteria Bank Dunia dan level ketimpangan sedang menurut koefisien *gini ratio*. Ini karena hampir semua Kabupaten/Kota pendukungnya berada pada level yang sama juga. Pada tahun 2018 *gini ratio* Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebesar 0,344. Kelompok 40 persen penduduk berpendapatan rendah secara umum sudah mengecap 19,84 persen pendapatan regional.

Adapun kabupaten/kota dengan ketimpangan paling kecil yang ditandai dengan *gini ratio* terendah di Provinsi Kalimantan Selatan adalah Kabupaten Tanah Laut. Pada tahun 2018, *gini ratio* Kabupaten Tanah Laut adalah sebesar 0,234, serta kelompok 40 persen penduduk berpendapatan rendah sudah dapat menikmati pendapatan sebesar 25,57 persen dari total pendapatan regionalnya.

Tabel 7.2. Distribusi Pendapatan Per Kapita Menurut Kriteria *World Bank* dan Gini Ratio Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan, 2018 (Persen)

Kabupaten/ Kota	Total Pengeluaran			Gini Rasio
	40% Bawah	40% Tengah	20% Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kalimantan Selatan	19,84	37,16	43,00	0,34427
Tanah Laut	25,57	40,31	34,12	0,23360
Kota Baru	19,30	39,57	41,13	0,33652
Banjar	20,64	37,87	41,49	0,32717
Barito Kuala	20,49	37,03	42,48	0,33800
Tapin	22,35	40,51	37,13	0,28070
HSS	21,50	37,28	41,21	0,31661
HST	21,50	37,18	41,31	0,31971
HSU	21,51	36,79	41,70	0,32462
Tabalong	21,77	38,50	39,73	0,30502
Tanah Bumbu	20,40	37,41	42,19	0,33161
Balangan	21,47	38,34	40,19	0,30989
Banjarmasin	17,74	37,48	44,78	0,37691
Banjarbaru	18,40	37,71	43,89	0,36496

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Selatan, data diolah

Tabel 7.3. Gini Ratio Kalimantan Selatan dan Kota Banjarbaru Tahun 2014 - 2018

Gini Ratio	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kalimantan Selatan	0,33	0,35	0,33	0,35	0,34
Banjarbaru	0,37	0,35	0,34	0,37	0,37

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Selatan

Angka Gini dan World Bank yang berfluktuasi setiap tahunnya ini dapat menjadi perhatian bersama untuk meningkatkan kewaspadaan pemerintah daerah agar pada tahun berikutnya ketimpangan tidak semakin meningkat hingga berada pada level yang mengkhawatirkan. Ketimpangan yang terjadi ini bisa saja disebabkan oleh perbedaan aksesibilitas penduduk terhadap sumber daya alam,

serta kualitas sumber daya manusia. Kedua faktor ini saling berkaitan erat dalam menciptakan peluang kerja dan kesempatan kerja sehingga pengelolaan yang baik terhadap kedua faktor ini akan sangat menentukan dalam peningkatan pembangunan suatu daerah yang pada akhirnya juga untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 7.3. Kriteria World Bank Provinsi Kalimantan Selatan dan Kota Banjarbaru Tahun 2014 - 2018

Tahun	Pendapatan yang dinikmati oleh penduduk yang berpendapatan 40% terbawah	
	Kalimantan Selatan	Banjarbaru
(1)	(2)	(3)
2014	20,35	18,19
2015	19,53	18,99
2016	20,04	19,84
2017	19,62	17,88
2018	19,84	18,40

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Selatan

7.4 Upaya Mengurangi Ketimpangan Pendapatan

Dampak sosial yang ditimbulkan akibat meningkatnya ketimpangan pendapatan bisa menjadi cukup serius, seperti meningkatnya angka kriminalitas dan kesenjangan sosial di masyarakat. Dalam mengkaji persoalan dari penyebab terjadinya ketimpangan pendapatan ini, sesungguhnya terdapat dua perspektif, yang pertama persoalan ini bisa saja terjadi terjadi akibat kebijakan pembangunan ekonomi yang dilakukan pemerintah yang kurang tepat dan bersifat struktural dimana seharusnya kebijakan yang diambil tidak hanya menyokong satu sektor saja melainkan pemerataan di seluruh sektor dan kebijakan itu tidak terpusat di wilayah tertentu saja melainkan kesemua wilayah yang ada sehingga ketimpangan pendapatan bisa dikurangi. Pada perspektif ini model pembangunan ekonomi yang



diperlukan adalah model yang secara serentak bisa memajukan semua sektor dengan melibatkan seluruh masyarakat sebagai partisipan.

Perspektif yang kedua, ketimpangan yang terjadi bisa jadi bukan merupakan akibat dari produk kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintah daerah yang memprioritaskan sektor tertentu, melainkan akibat praktek pembagian yang tidak adil antar faktor produksi ekonomi yang dibuat oleh pelaku atau pemilik modal itu sendiri, sebagai contoh sistem "*share cropping*" (bagi hasil) di sektor pertanian, pembagian pendapatan cenderung ditentukan secara sepihak oleh pemilik lahan akibat posisi tawar mereka yang jauh lebih kuat dibandingkan buruh tani akibatnya pembagian pendapatan yang tidak sepadan antara pemilik lahan dan buruh tani.

Kedua perspektif diatas disadari atau tidak memang secara nyata telah banyak terjadi dalam proses pembangunan yang berjalan selama ini tetapi yang perlu kita waspadi adalah ketika kedua perspektif tadi berkolaborasi menjadi satu maka ketimpangan pendapatan itu justru akan semakin menjadi jadi. Ketidaksadaran atas hal ini seolah olah menjadi sebuah pembiaran yang turut mendukung semakin melebarnya jurang pemisah antara kaya dan miskin. Beberapa strategi implikasi kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah daerah guna mengurangi ketimpangan pendapatan, antara lain:

- ✓ Menyediakan pendidikan dan kesehatan terjangkau bagi masyarakat miskin merupakan upaya penting untuk menciptakan mobilitas sosial dan ekonomi dan diharapkan dapat meningkatkan *skill/kemampuan* yang dibutuhkan oleh dunia kerja sehingga terjadi *multiplier effect* yang dapat menekan angka pengangguran.
- ✓ Meminimalkan bertambahnya pekerja di sektor informal. Hal tersebut bisa dilakukan dengan mendorong pertumbuhan sektor produksi (pertanian dan industri) sehingga bisa menyerap lebih banyak tenaga kerja. Untuk sektor pertanian misalnya dengan mendorong petani beralih ke tanaman yang nilai ekonomisnya lebih tinggi misalnya ke tanaman hortikultura. Pembatasan atau



penghapusan sistem alihdaya (*outsourcing*) bisa pula dipertimbangkan agar tidak mudah terjadi PHK yang kemudian mendorong orang bekerja di sektor informal.

- ✓ Untuk mengurangi kesenjangan kemampuan individu, pemerintah memperbanyak pendidikan vokasi. Cara ini bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar mereka mendapatkan keahlian. Melalui kemampuannya upah yang lebih baik akan didapat. Alhasil gap pendapatan diperkecil.



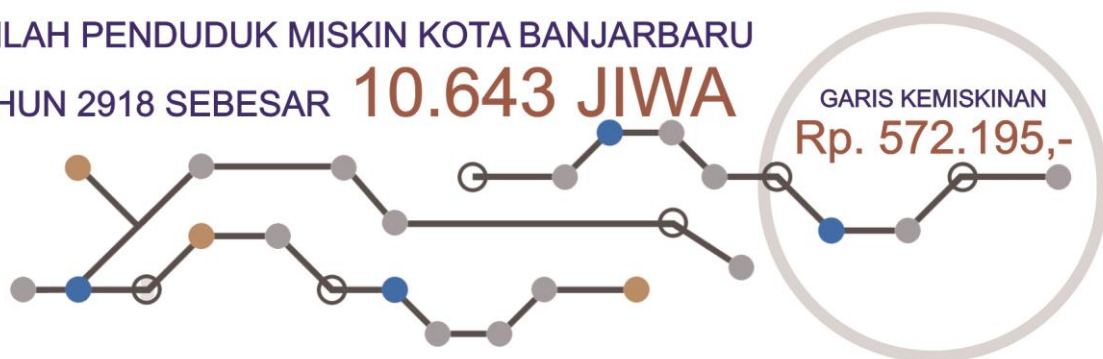
BAB VIII

PERKEMBANGAN

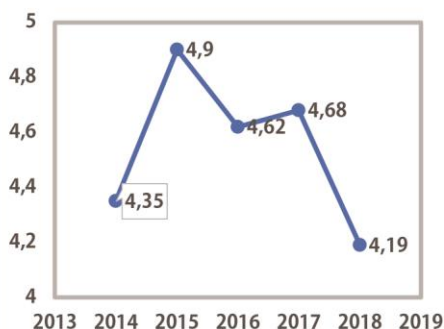
DATA KEMISKINAN

JUMLAH PENDUDUK MISKIN KOTA BANJARBARU

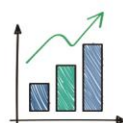
TAHUN 2018 SEBESAR **10.643** JIWA



**PERSENTASE PENDUDUK MISKIN
KOTA BANJARBARU**



TINGKAT KEDALAMAN KEMISKINAN (P1)



0,52 %

TINGKAT KEPARAHAN KEMISKINAN (P2)



0,11 %





PERKEMBANGAN DATA KEMISKINAN

Kemiskinan adalah persoalan sosial ekonomi mendasar yang menjadi fokus dan perhatian utama Pemerintah Indonesia, tak terkecuali di Kota Banjarbaru. Monitoring terhadap hasil-hasil pembangunan mutlak diperlukan untuk melihat sejauh mana pembangunan yang telah dilaksanakan bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat, sehingga program-program pembangunan berikutnya dapat lebih optimal. Salah satu indikator penting yang dapat menggambarkan tentang kesejahteraan rakyat adalah informasi tentang situasi perekonomian masyarakatnya terutama dilihat dari tingkat kemiskinan masyarakat suatu daerah tersebut.

Kemiskinan dapat dibedakan dari dua sisi sudut pandang yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan dapat dipahami sebagai suatu kondisi yang bersifat absolut bila kondisi seseorang atau suatu rumah tangga diperbandingkan dengan suatu standar tertentu tanpa memperhitungkan kondisi masyarakat secara umum. Sedangkan kemiskinan dapat juga dipandang sebagai suatu kondisi yang bersifat relatif bila kondisi seseorang atau suatu rumah tangga diperbandingkan dengan taraf hidup masyarakat sekitarnya.

Masih tingginya angka kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan di sebuah negara tidak terlepas dari strategi pembangunan yang diterapkan. Pembangunan ekonomi dengan strategi pertumbuhan banyak diterapkan oleh negara-negara berkembang, tak terkecuali Indonesia. Strategi pembangunan dilaksanakan dengan mengutamakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi sebagai jalan keluar untuk mengatasi berbagai persoalan. Akan



tetapi pengalaman menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dicapai belum diikuti penurunan tingkat kemiskinan secara signifikan dan ada indikasi melebarnya ketimpangan distribusi pendapatan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa strategi pembangunan yang diambil kurang tepat sasaran, sehingga hasilnya hanya dinikmati oleh kelompok tertentu saja. Oleh karena itu upaya untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi disertai dengan upaya pemerataan dalam distribusi pendapatan perlu terus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan supaya dapat mengurangi tingkat kemiskinan.

Penanggulangan kemiskinan ini menjadi semakin penting mengingat kemiskinan menjadi sebab terciptanya masalah sosial lain di tengah masyarakat. Permasalahan seperti kebodohan, buta huruf, putus sekolah, anak jalanan, pekerja anak, perdagangan manusia maupun masalah sosial lainnya seringkali bermula dari kondisi kemiskinan yang terjadi. Hal-hal seperti ini lebih mungkin terjadi pada anak yang lahir dari keluarga menengah ke bawah. Berbagai masalah sosial lanjutan yang mungkin muncul dari adanya kemiskinan mengharuskan pemerintah baik pusat maupun daerah untuk selalu menjadikan pengentasan kemiskinan menjadi salah satu prioritas utama.

Penanggulangan kemiskinan secara strategis dan sistematis harus dilakukan agar seluruh masyarakat mampu menikmati kehidupan yang layak dan bermartabat. Untuk mendukung program penanggulangan kemiskinan ketersediaan data yang akurat menjadi sesuatu hal yang wajib dimiliki. Data kemiskinan ini dapat diperoleh dari Badan Pusat Statistik yang setiap tahunnya melaksanakan survei yang salah satu tujuannya adalah untuk mengukur kondisi kemiskinan masyarakat. Data kemiskinan yang akurat dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar waktu dan daerah, serta menjadi dasar masukan bagi program pengentasan kemiskinan selanjutnya agar tepat sasaran.



8.1. KEMISKINAN

Kemiskinan adalah kondisi seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat (Bappenas, 2004). Hak-hak dasar antara lain: (a). terpenuhinya kebutuhan pangan, (b). kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, (c). rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindakan kekerasan, (d). hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik.

Pembahasan tentang kemiskinan tidak bisa dilepaskan dari pembahasan ekonomi. Beberapa studi empiris, seperti Deininger dan Squire (1995,1996) menyimpulkan bahwa ada korelasi positif antara pertumbuhan ekonomi suatu negara dengan peningkatan angka kemiskinan. Namun studi yang dilakukan oleh World Bank (1990), Fields dan Jakobson (1989) dan Ravallion (1995), menunjukkan tidak ada korelasi antara pertumbuhan ekonomi dengan tingkat kemiskinan. Kajian-kajian empiris di atas pada hakekatnya adalah menguji hipotesis Kuznets di mana hubungan antara kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi menunjukkan hubungan negatif, sebaliknya hubungan pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesenjangan ekonomi adalah hubungan positif. Hubungan ini sangat terkenal dengan nama kurva U terbalik dari Kuznets. Kuznets menyimpulkan bahwa pola hubungan yang positif kemudian menjadi negatif, menunjukkan terjadi proses evolusi dari distribusi pendapatan dari masa transisi suatu ekonomi pedesaan (rural) ke suatu ekonomi perkotaan (urban) atau ekonomi industri.

Meski demikian variabel pertumbuhan ekonomi bukan satu-satunya variabel yang berpengaruh terhadap kemiskinan, terdapat beberapa variabel dominan lainnya yang berperan dalam mempengaruhi pola kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi dan pendapatan serta variabel lainnya sangat mempengaruhi pola kemiskinan di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan adalah kondisi yang utama (necessary condition) tetapi perlu variabel-



variabel pendukung lainnya (sufficient conditions) untuk menekan angka kemiskinan. Identifikasi terhadap necessary conditions dan sufficient conditions sangat membantu pengambil keputusan untuk membuat kebijakan, membuat analisa, atau peramalan yang dapat menjadi acuan dalam pembuatan kebijakan yang terkait dengan usaha untuk menekan kemiskinan.

Pada banyak kasus, sering pula dijumpai negatifnya hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan. Ada beberapa alasan mengapa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu berdampak pada penurunan kemiskinan. Pertama, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi ditopang oleh sektor-sektor yang memiliki elastisitas lapangan kerja rendah, tidak akan menyelesaikan masalah kemiskinan. Kedua, pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun ditopang oleh keberadaan industri milik negara yang memperoleh sejumlah proteksi tertentu juga tidak menjamin akan dapat menyelesaikan kemiskinan. Ketiga, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan ditopang oleh industri canggih juga berpotensi memperparah masalah kemiskinan dan pengangguran jika struktur tenaga kerja yang ada didominasi oleh tenaga kerja berkemampuan rendah.

8.1.1 Jenis-jenis Kemiskinan

a. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif merupakan kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan. Standar minimum disusun berdasarkan kondisi hidup suatu daerah pada waktu tertentu dan perhatian terfokus pada golongan penduduk “termiskin”, misalnya 40 persen dari total penduduk yang telah diurutkan menurut pendapatan/pengeluaran. Kelompok ini merupakan penduduk relatif miskin. Dengan demikian, ukuran kemiskinan relatif sangat tergantung pada distribusi pendapatan/pengeluaran



penduduk sehingga dengan menggunakan definisi ini berarti “sepanjang masih ada kehidupan, orang miskin akan selalu hadir bersama kita”.

Dalam praktek, negara kaya mempunyai garis kemiskinan relatif yang lebih tinggi dari pada negara miskin seperti pernah dilaporkan oleh Ravallion (1998: 26). Paper tersebut menjelaskan mengapa, misalnya, angka kemiskinan resmi (*official figure*) pada awal tahun 1990-an mendekati 15 persen di Amerika Serikat dan juga mendekati 15 persen di Indonesia (negara yang jauh lebih miskin). Artinya, banyak dari mereka yang dikategorikan miskin di Amerika Serikat akan tetapi dikatakan sejahtera menurut standar Indonesia.

Dalam hal mengidentifikasi dan menentukan sasaran penduduk miskin, maka garis kemiskinan relatif cukup untuk digunakan, dan perlu disesuaikan terhadap tingkat pembangunan negara secara keseluruhan. Garis kemiskinan relatif tidak dapat dipakai untuk membandingkan tingkat kemiskinan antar daerah dan waktu karena tidak mencerminkan tingkat kesejahteraan yang sama.

b. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan secara absolut ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja. Kebutuhan pokok minimum diterjemahkan sebagai ukuran finansial dalam bentuk uang. Nilai kebutuhan minimum dari kebutuhan dasar tersebut dikenal dengan istilah garis kemiskinan. Penduduk yang pendapatannya di bawah garis kemiskinan digolongkan sebagai penduduk miskin.

Garis kemiskinan absolut adalah “tetap/tidak berubah” dalam hal standar hidup. Garis kemiskinan absolut mampu membandingkan kemiskinan secara umum. Garis kemiskinan Amerika Serikat tidak berubah dari tahun ke tahun, sehingga angka kemiskinan sekarang mungkin terbanding dengan angka



kemiskinan satu dekade yang lalu, dengan catatan bahwa definisi kemiskinan tidak berubah.

Garis kemiskinan absolut sangat penting jika seseorang akan mencoba menilai efek dari kebijakan anti kemiskinan antar waktu, atau memperkirakan dampak dari suatu proyek terhadap kemiskinan (misalnya, pemberian kredit skala kecil). Angka kemiskinan akan terbanding antara satu negara dengan negara lain hanya dan jika garis kemiskinan absolut yang sama digunakan di kedua negara tersebut. Bank Dunia memerlukan garis kemiskinan absolut agar dapat membandingkan angka kemiskinan antar negara. Hal ini bermanfaat dalam menentukan kemana menyalurkan sumber daya finansial (dana) yang ada, juga dalam menganalisis kemajuan dalam memerangi kemiskinan. Pada umumnya ada dua ukuran yang digunakan oleh Bank Dunia, yaitu : a) US \$ 1 per hari, dengan batasan ini diperkirakan ada sekitar 1,2 miliar penduduk dunia yang hidup dibawah ukuran tersebut; b) US \$ 2 per hari yang diperkirakan lebih dari 2 miliar penduduk yang hidup kurang dari batas tersebut. Kedua batas ini adalah garis kemiskinan absolut.

c. Terminologi Kemiskinan

Terminologi lain yang juga pernah dikemukakan sebagai wacana adalah kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural. Soetandyo Wignjosoebroto dalam “Kemiskinan Struktural: Masalah dan Kebijakan” yang dirangkum oleh Suyanto (1995:59) mendefinisikan “Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang ditengarai atau didalihkan bersebab dari kondisi struktur atau tatanan kehidupan yang tak menguntungkan”. Dikatakan tak menguntungkan karena tatanan itu tak hanya menerbitkan akan tetapi (lebih lanjut dari itu) juga melanggengkan kemiskinan di dalam masyarakat. Di dalam kondisi struktur yang demikian itu kemiskinan menggejala bukan oleh sebab-sebab yang alami atau oleh sebab-sebab yang pribadi, melainkan oleh sebab tatanan sosial yang tidak adil. Tatanan yang



tidak adil ini menyebabkan banyak warga masyarakat gagal memperoleh peluang dan/atau akses untuk mengembangkan dirinya serta meningkatkan kualitas hidupnya. Hal tersebut menyebabkan mereka yang malang dan terperangkap ke dalam perlakuan yang tidak adil ini menjadi serba berkekurangan, tak setara dengan tuntutan untuk hidup yang layak dan bermartabat sebagai manusia. Salah satu contoh adalah kemiskinan karena lokasi tempat tinggal yang terisolasi, misalnya, orang Mentawai di Kepulauan Mentawai, orang Melayu di Pulau Christmas, Suku Tengger di Pegunungan Tengger Provinsi Jawa Timur, dan sebagainya.

Sedangkan kemiskinan kultural diakibatkan oleh faktor-faktor adat dan budaya dari suatu daerah tertentu yang membelenggu seseorang tetap melekat dengan indikator kemiskinan. Padahal indikator kemiskinan tersebut seyogyanya bisa dikurangi atau bahkan secara bertahap bisa dihilangkan dengan mengabaikan faktor-faktor adat dan budaya tertentu yang menghalangi seseorang melakukan perubahan-perubahan ke arah tingkat kehidupan yang lebih baik. Kemiskinan karena tradisi sosio-kultural terjadi pada suku-suku terasing, seperti halnya Suku Badui di Cibeo Banten Selatan, Suku Dayak di pedalaman Pulau Kalimantan, dan suku Kubu di Provinsi Jambi.

Soetandyo Wignjosebroto dalam “Kemiskinan, Kebudayaan, dan Gerakan Membudayakan Keberdayaan” yang dirangkum oleh Suyanto (1995:59) mendefinisikan “Kemiskinan adalah suatu ketidakberdayaan”. Keberdayaan itu sesungguhnya merupakan fungsi kebudayaan. Artinya, berdaya tidaknya seseorang dalam kehidupan bermasyarakatnya itu dalam kenyataan akan banyak ditentukan dan dipengaruhi oleh determinan-determinan sosial-budayanya (seperti misalnya posisi, status, dan wawasan yang dipunyainya). Sebaliknya, semua fasilitas sosial yang dicapai dan dapat didayagunakan olehnya itu akan ikut pula menentukan keberdayaannya kelak di dalam pengembangan dirinya di tengah masyarakat. Acapkali timbul suatu rasa pesimis di kalangan orang miskin dengan



merasionalisasi keadaannya bahwa hal itu “sudah takdir”, dan bahwa setiap orang itu sesungguhnya sudah mempunyai suratan nasibnya sendiri-sendiri, yang mestinya malah harus disyukuri. Oleh karena itu, Soetandyo menyarankan ditingkatkannya “Gerakan Membudayakan Keberdayaan” pada lapisan masyarakat bawah. Melek huruf, melek bahasa, melek fasilitas, melek ilmu, melek informasi, melek hak, dan melek-melek lainnya adalah suatu keberdayaan yang harus terus dimungkinkan kepada lapisan-lapisan masyarakat bawah agar tidak terjebak ke dalam kemiskinan kultural.

8.1.2 Pendekatan Pendapatan/Pengeluaran

Strategi kebutuhan dasar (*basic needs*), sebagaimana dikutip oleh Thee Kian Wie (1981: 29), dipromosikan dan dipopulerkan oleh International Labor Organisation (ILO) pada tahun 1976 dengan judul “Kesempatan Kerja, Pertumbuhan Ekonomi, dan Kebutuhan Dasar: Suatu Masalah bagi Satu Dunia”. Strategi kebutuhan dasar memang memberi tekanan pada pendekatan langsung dan bukan cara tidak langsung seperti melalui efek menetes ke bawah (*trickle-down effect*) dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Kesulitan umum dalam penentuan indikator kebutuhan dasar adalah standar atau kriteria yang subjektif karena dipengaruhi oleh adat, budaya, daerah, dan kelompok sosial. Demikian pula kesulitan penentuan secara kuantitatif dari masing-masing komponen kebutuhan dasar karena dipengaruhi oleh sifat yang dimiliki oleh komponen itu sendiri, seperti misalnya selera konsumen terhadap suatu jenis makanan atau komoditi lainnya.

Beberapa kelompok atau ahli telah mencoba merumuskan mengenai konsep kebutuhan dasar ini termasuk alat ukurnya. Konsep kebutuhan dasar yang dicakup adalah komponen kebutuhan dasar dan karakteristik kebutuhan dasar serta hubungan keduanya dengan garis kemiskinan. Rumusan komponen kebutuhan dasar menurut beberapa ahli adalah:

- 
1. Menurut United Nations (1961), sebagaimana dikutip oleh Hendra Esmara (1986: 289), komponen kebutuhan dasar terdiri atas: kesehatan, bahan makanan dan gizi, pendidikan, kesempatan kerja dan kondisi pekerjaan, perumahan, sandang, rekreasi, jaminan sosial, dan kebebasan manusia.
 2. Menurut UNSRID (1966), sebagaimana dikutip oleh Hendra Esmara (1986: 289), komponen kebutuhan dasar terdiri atas: (i) kebutuhan fisik primer yang mencakup kebutuhan gizi, perumahan, dan kesehatan; (ii) kebutuhan kultural yang mencakup pendidikan, rekreasi dan ketenangan hidup; dan (iii) kebutuhan atas kelebihan pendapatan.
 3. Menurut Ganguli dan Gupta (1976), sebagaimana dikutip oleh Hendra Esmara (1986: 289), komponen kebutuhan dasar terdiri atas: gizi, perumahan, pelayanan kesehatan pengobatan, pendidikan, dan sandang.
 4. Menurut Green (1978), sebagaimana dikutip oleh Thee Kian Wie (1981:31), komponen kebutuhan dasar terdiri atas: (i) *personal consumption items* yang mencakup pangan, sandang, dan pemukiman; (ii) *basic public services* yang mencakup fasilitas kesehatan, pendidikan, saluran air minum, pengangkutan, dan kebudayaan.
 5. Menurut Hendra Esmara (1986: 320-321), komponen kebutuhan dasar primer untuk bangsa Indonesia mencakup pangan, sandang, perumahan, pendidikan, dan kesehatan.
 6. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), komponen kebutuhan dasar terdiri dari pangan dan bukan pangan yang disusun menurut daerah perkotaan dan perdesaan berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS).

Pengukuran kemiskinan secara umum memakai standar dari Bank Dunia. BPS dalam menghitung kemiskinan menggunakan konsep dan definisi baku tentang kemiskinan. Menurut BPS, kemiskinan dikaitkan dengan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic need approach*). Dengan pendekatan ini,



kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan kata lain, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan makanan maupun non makanan yang bersifat mendasar.

Berdasarkan pendekatan kebutuhan dasar, ada 3 indikator kemiskinan yang digunakan yaitu:

- **Pertama**, *Head Count Index* (HCI- P_0), yaitu persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.
- **Kedua**, Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index*- P_1) yang merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan.
- **Ketiga**, Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index*- P_2) yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan (GK) terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GNKM). GKM merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kkalori per kapita per hari. Patokan ini mengacu pada hasil Widyakarya Pangan dan Gizi 1978. GKNM adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Dengan kata lain, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan makanan maupun non makanan yang bersifat mendasar. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Kemiskinan di Kota Banjarbaru dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren yang menurun. Berdasarkan data kemiskinan yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin di Kota Banjarbaru dalam lima tahun terakhir mengalami penurunan setelah sempat mengalami kenaikan di tahun 2015. Pada tahun 2018, sebanyak 4,19 persen penduduk Kota Banjarbaru termasuk dalam kategori miskin, menurun 0,49 poin dibandingkan tahun 2017. Meskipun secara persentase menurun, namun angka tersebut diperkirakan setara dengan 10.643 jiwa.

Persentase persentase penduduk miskin pada tahun 2018 ini merupakan angka terendah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Tentu sebuah pencapaian yang menggembirakan, adapun jika dibandingkan dengan angka kemiskinan Provinsi Kalimantan Selatan, persentase penduduk miskin Kota Banjarbaru selalu tercatat di bawah angka provinsi, tren penurunan kemiskinan memberi indikasi yang baik akan adanya keberhasilan pembangunan di bidang kesejahteraan rakyat.

Tabel 8.1. Indikator Kemiskinan Kota Banjarbaru Tahun 2014-2018

Keterangan	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
Penduduk Miskin (jiwa)	9.965	11.460	11.060	11.539	10.643
Persentase Penduduk Miskin (persen)	4,35	4,90	4,62	4,68	4,19
Garis Kemiskinan	436.795	463.579	505.380	539.608	572.195
P1 (Tingkat Kedalaman)	0,36	0,52	0,66	0,66	0,52
P2 (Tingkat Keparahan)	0,048	0,10	0,15	0,14	0,11
Gini Ratio	0,365	0,352	0,336	0,365	0,365

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Selatan



8.2 Garis Kemiskinan

Garis kemiskinan adalah nilai rupiah yang harus dikeluarkan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup minimumnya, baik itu kebutuhan dasar makanan maupun non makanan. Seseorang dikatakan miskin bila berada dibawah garis kemiskinan. Metode penghitungan jumlah penduduk miskin yang digunakan oleh BPS dilakukan dengan pendekatan *benchmark* garis kemiskinan. Garis Kemiskinan (GK) terdiri dari dua komponen, yaitu garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan non makanan.

Pendekatan GK makanan digunakan standar kebutuhan hidup minimum 2100 Kilo kalori didasarkan pada konsumsi makanan, sedangkan GK non makanan untuk memenuhi kebutuhan dasar non makanan seperti perumahan, pendidikan, kesehatan, pakaian, serta aneka barang dan jasa. Garis kemiskinan Kota Banjarbaru tahun 2018 sebesar 572.195 rupiah/kapita/bulan. Dibanding tahun 2017, garis kemiskinan Kota Banjarbaru 2018 mengalami kenaikan sebesar 6,04 persen.

8.3 Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan

Indeks Kedalaman Kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Selama lima tahun terakhir Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) Kota Banjarbaru cenderung mengalami peningkatan. Indeks kedalaman kemiskinan Kota Banjarbaru mengalami penurunan dari 0,66 pada tahun 2017 menjadi 0,52 di tahun 2018 dan Indeks Keparahan Kemiskinan



juga mengalami penurunan dari 0,14 pada tahun 2017 menjadi 0,11 di tahun 2018. hal ini berarti tidak terlalu jauh dari Garis Kemiskinan. Dengan Kedalaman dan Keparahan yang rendah maka akan semakin mudah bagi pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan.

Pada Tabel 8.2 memperlihatkan bahwa Garis Kemiskinan antar Kabupaten/Kota berbeda, angka terendah ada di Barito Kuala (291.285) dan tertinggi di Banjarbaru (539.608). Perbedaan ini menunjukkan bahwa pengeluaran rata-rata penduduk terhadap keranjang komoditas kebutuhan dasar (*basic needs approach*) makanan dan non makanan antar daerah berbeda, demikian juga dengan harga masing-masing komoditas tersebut. Jika dilihat dari perbedaan GK tersebut dapat dikatakan bahwa seseorang yang hidup di kota yaitu Banjarmasin dan Banjarbaru harus lebih berupaya keras mengumpulkan rupiah untuk dapat bertahan hidup di atas garis kemiskinan, karena GKnya yang tinggi di banding dengan daerah lainnya. Ini berarti standar hidup di kota besar lebih tinggi dibanding hidup di daerah pinggiran lainnya.

**Tabel 8.2. Perbandingan Indikator Kemiskinan Kabupaten/Kota
Di Kalimantan Selatan Tahun 2018**

Kab/Kota	Garis Kemiskinan (Rp)*	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin (Po)*	Tingkat Kedalaman (P1)*	Tingkat Keparahan (P2)*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tanah Laut	447.212	14.870	4,40	0,55	0,14
Kota Baru	401.300	15.167	4,52	0,51	0,14
Banjar	400.081	15.615	2,70	0,39	0,10
Barito Kuala	297.199	14.085	4,56	0,57	0,15
Tapin	405.591	6.979	3,70	0,35	0,06
HSS	444.455	12.224	5,21	0,71	0,18
HST	354.214	16.140	6,01	0,67	0,12
HSU	420.783	14.919	6,38	1,14	0,27
Tabalong	446.765	14.874	5,95	1,17	0,34
Tanah Bumbu	451.714	17.063	4,88	0,63	0,14
Balangan	382.835	7.214	5,59	1,04	0,25
Banjarmasin	477.210	29.240	4,18	0,81	0,21
Banjarbaru	572.195	10.643	4,19	0,52	0,11
Kal-Sel	427.774	189.033	4.54	0,69	0,16

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Selatan

Tabel di atas memperlihatkan bahwa Garis Kemiskinan antar Kabupaten/Kota berbeda beda, yang terendah ada di Barito Kuala (297.199) dan tertinggi di Banjarbaru (572.195). Perbedaan ini menunjukkan bahwa pengeluaran rata-rata penduduk terhadap keranjang komoditas kebutuhan dasar (*basic needs approach*) makanan dan non makanan antar daerah berbeda beda, demikian juga dengan harga masing-masing komoditas tersebut. Jika dilihat dari perbedaan GK tersebut dapat dikatakan bahwa seseorang yang hidup dengan GK tertinggi harus lebih berupaya keras untuk dapat bertahan hidup di atas garis kemiskinan, seperti halnya Kota Banjarbaru dan Banjarmasin karena Nilai GK nya yang lebih tinggi di banding dengan daerah lainnya. Ini berarti standar hidup di kota besar lebih tinggi dibanding hidup di daerah pedesaan/pinggiran lainnya.



Jika kesejahteraan penduduk di suatu daerah dilihat dari jumlah penduduk miskinnya maka daerah dengan P_o kecil dapat dikatakan lebih sejahtera dari daerah lain yang P_o nya lebih tinggi. Tapi jika dilihat dari upaya yang harus dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan maka yang terberat dalam melakukan pengentasan ini adalah yang terbanyak jumlah absolut penduduk miskinnya.

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar jumlah dan persentase penduduk miskin saja, ada dimensi lain yang perlu diperhatikan yaitu tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Selain menekan jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan seharusnya juga dapat mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan.

Kabupaten Banjar memiliki P_o terkecil (2,70 persen) atau dapat dikatakan lebih sejahtera dibandingkan daerah lainnya di Kalimantan Selatan, tetapi bila dilihat dari jumlah penduduk miskin Kota Banjarmasin memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak yang menjadi beban pekerjaan pemerintah yang harus dituntaskan.

Sementara keparahan kemiskinan sendiri adalah untuk memperlihatkan penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin tersebut, dimana kesenjangan yang terparah antar penduduk miskin adalah di Kota Banjarbaru dengan indeks 0,11. Kesenjangan rendah mendekati 0 adalah Kabupaten Tapin dengan indeks 0,06 artinya kemiskinan yang ada di Kabupaten Tapin hampir merata tidak ada yang terlalu miskin, hal ini sebanding dengan indeks kedalamannya, yang tidak terlalu jauh dari Garis Kemiskinan. Dengan kedalaman dan keparahan yang rendah maka akan semakin mudah bagi pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan.

8.4 Kemiskinan Relatif

Dalam upaya pengentasan kemiskinan, kita perlu mengetahui siapa sajakah penduduk-penduduk yang dikategorikan miskin tersebut. Dimana letak atau kantong kemiskinan dari penduduk-penduduk tersebutlah yang kemudian

mengharuskan kita meninjau kemiskinan ini dari sisi relatifitasnya atau kemiskinan relatif. Kemiskinan relatif menjadi dasar dalam penyusunan Basis Data Terpadu yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) untuk tingkat nasional dan Tim Koordinasi penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) untuk Tingkat daerah Kabupaten Kota. Hasil *database* inilah yang kemudian dikelola untuk menjadi Rumah Tangga Sasaran (RTS) bagi pengentasan kemiskinan di kabupaten kota. Hasil pendataan PBDT hanya dilaksanakan pada tahun 2015 sehingga data RTS yang terbaru hanya tersedia pada tahun 2015.

Berdasarkan hasil pendataan PBDT pada tahun 2015 di Kota Banjarbaru telah mendata sebanyak 10.781 rumah tangga sasaran (RTS). Melalui hasil Sensus Penduduk 2010, dilakukan proyeksi penduduk tahun 2015 adalah 234.371 jiwa dengan total jumlah rumah tangga sebanyak 66.744 rta, dimana dari jumlah tersebut sebesar 10.781 rta (16,15 persen) merupakan RTS yang terdata oleh BPS dalam PBDT atau setara dengan 37.863 jiwa yang berhasil dicacah. Setelah dilakukan pendataan oleh BPS melalui PBDT tahun 2015, data RTS sejumlah 10.781 RTS tersebut lalu diserahkan kepada TNP2K Pusat (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan). Dari 10.781 RTS tersebut oleh TNP2K pusat kemudian terbagi kedalam empat desil sebagai berikut:

Tabel 8.3 Jumlah Rumah Tangga dan Individu Menurut Status Kesejahteraan Di Kota Banjarbaru Tahun 2018

TNP2K 2015	Ruta Sasaran (RTS)	Individu (jiwa)
Desil 1	3.524	14.828
Desil 2	5.720	18.519
Desil 3	1.079	3.137
Desil 4	458	1.379
Total	10.781	37.863

Sumber: TNP2K

Berbekal data dari TNP2K ini yang menjadi cikal bakal bagi pemerintah pusat maupun daerah nantinya dalam merealisasikan program-program penanggulangan kemiskinan dan untuk tahun-tahun berikutnya pemutakhiran data dilakukan oleh TNP2K daerah dengan mekanisme tertentu yang telah diatur.

**Tabel 8.4 Jumlah Rumah Tangga dan Individu Menurut Kecamatan
Di Kota Banjarbaru Tahun 2018**

Kecamatan	Ruta Sasaran (RTS)	Individu (jiwa)
Landasan Ulin	2.894	10.213
Liang Anggang	1.895	6.729
Cempaka	3.555	12.644
Banjarbaru Utara	1.031	3.517
Banjarbaru Selatan	1.406	4.760
Total	10.781	37.863

Sumber: TNP2K

8.5 PENGELUARAN PER KAPITA

Tingkat kesejahteraan rumah tangga secara nyata dapat diukur dari tingkat pendapatan yang dibandingkan dengan kebutuhan minimum untuk hidup layak. Perubahan tingkat kesejahteraan dilakukan dengan melihat pola pengeluaran rumah tangga berdasarkan pengeluaran. Pengeluaran rumah tangga dibedakan menjadi dua yaitu pengeluaran untuk makanan dan untuk bukan makanan. Di negara berkembang, umumnya pengeluaran untuk makanan masih merupakan bagian terbesar dari keseluruhan pengeluaran konsumsi rumah tangga. Perubahan angka persentase tersebut setiap tahunnya dapat menunjukkan perkembangan taraf kehidupan rumah tangga.

Secara umum pengeluaran rumah tangga terbagi menjadi konsumsi/pengeluaran untuk makanan dan bukan makanan. Pola konsumsi

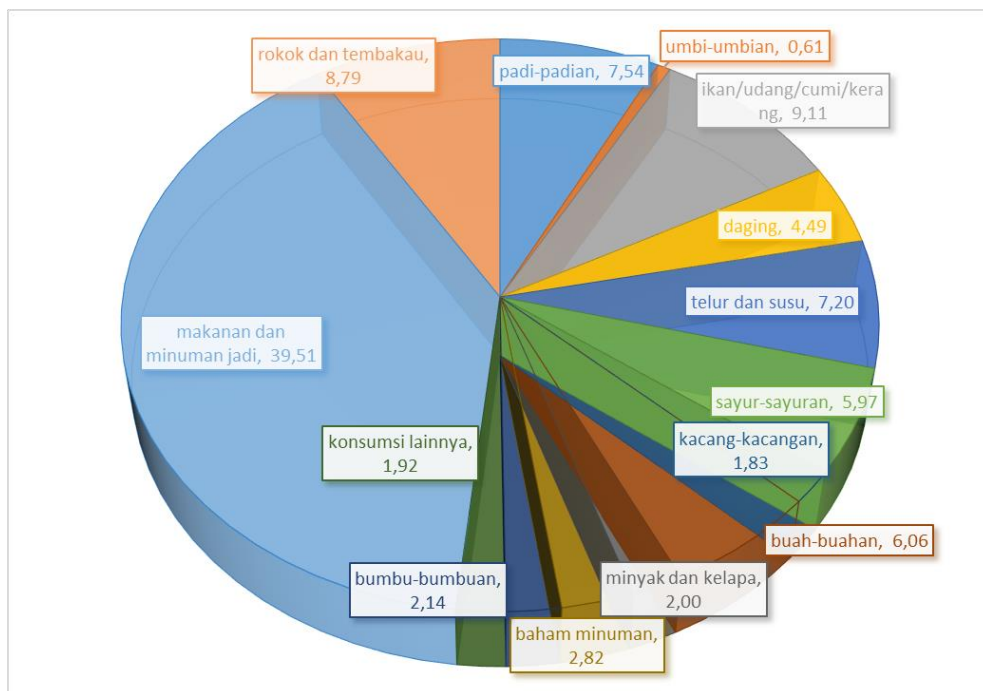


masyarakat dapat digambarkan melalui kedua pengeluaran tersebut. Permintaan (demand) terhadap kedua kelompok tersebut berbeda sesuai dengan tingkat pendapatannya. Kelompok masyarakat yang memiliki pendapatan terbatas akan mendahulukan pemenuhan kebutuhan makanan dibandingkan kebutuhan non makanan. Pada kelompok masyarakat dengan pendapatan rendah akan terlihat bahwa sebagian besar pengeluarannya berupa makanan, semakin besar tingkat pendapatan porsi pengeluaran untuk makanan akan berkurang dan pengeluaran non makanan akan menjadi lebih banyak.

Dari uraian tersebut dapat diartikan bahwa pola pengeluaran dapat dipakai sebagai salah satu alat untuk menilai tingkat kesejahteraan (ekonomi) penduduk, dan perubahan komposisinya sebagai indikasi perubahan tingkat kesejahteraan. Di negara-negara berkembang seperti Indonesia, pengeluaran untuk makanan masih merupakan bagian terbesar dari pengeluaran rumah tangga. Sebaliknya di negara-negara maju, pengeluaran untuk aneka barang dan jasa, merupakan bagian terbesar dari pengeluaran rumah tangga. Pengeluaran tersebut tidak bersifat primer lagi, antara lain pengeluaran untuk perawatan kesehatan, perawatan kecantikan, peningkatan pendidikan, rekreasi, olah raga dan sebagainya.

Pengeluaran pada kelompok makanan dan minuman jadi yang paling besar dalam pengeluaran untuk kebutuhan makanan, disusul pengeluaran untuk ikan/udang/cumi dan rokok/tembakau. Porsi pengeluarannya berturut-turut sebesar 39,51 persen, 9,11 persen dan 8,79 persen dari total pengeluaran makanan sebulan. Sementara pengeluaran untuk padi-padian mencapai sekitar 7,54 persen dari total pengeluaran makanan sebulan, lebih kecil dibanding pengeluaran untuk ikan dan rokok. Masyarakat sekarang ini termasuk di Kota Banjarbaru terutama yang kondisi perekonomian rumah tangganya cukup baik cenderung menyukai kepraktisan dan kecepatan. Hal ini menjadikan makanan jadi menjadi favorit dan menjadi kelompok makanan yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Gaya hidup yang semakin berkembang menjadikan masyarakat memiliki beragam aktivitas sehingga waktu menjadi sangat berharga

Gambar 5.4. Persentase Pengeluaran Penduduk menurut Kelompok Makanan Kota Banjarbaru Tahun 2018



Sumber : BPS, Susenas Maret 2018

Komoditas rokok meskipun jika dilihat dari sisi kesehatan sangat buruk pada kenyataannya masih tetap sebagai salah satu komoditas paling menonjol dalam pengeluaran makanan penduduk Kota Banjarbaru. Hal ini sungguh sangat ironis mengingat tembakau merupakan salah satu penyebab utama kematian di dunia dan berbagai macam penyakit dapat muncul akibat mengkonsumsi rokok. Porsi pengeluaran rokok dan tembakau dari total pengeluaran makanan mencapai 8,79 persen, lebih besar dibandingkan dengan porsi untuk pengeluaran padi-padian/beras yang sebesar 7,54persen. Porsi pengeluaran untuk rokok ini juga jauh lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran rumah tangga untuk membeli telur, susu maupun daging.

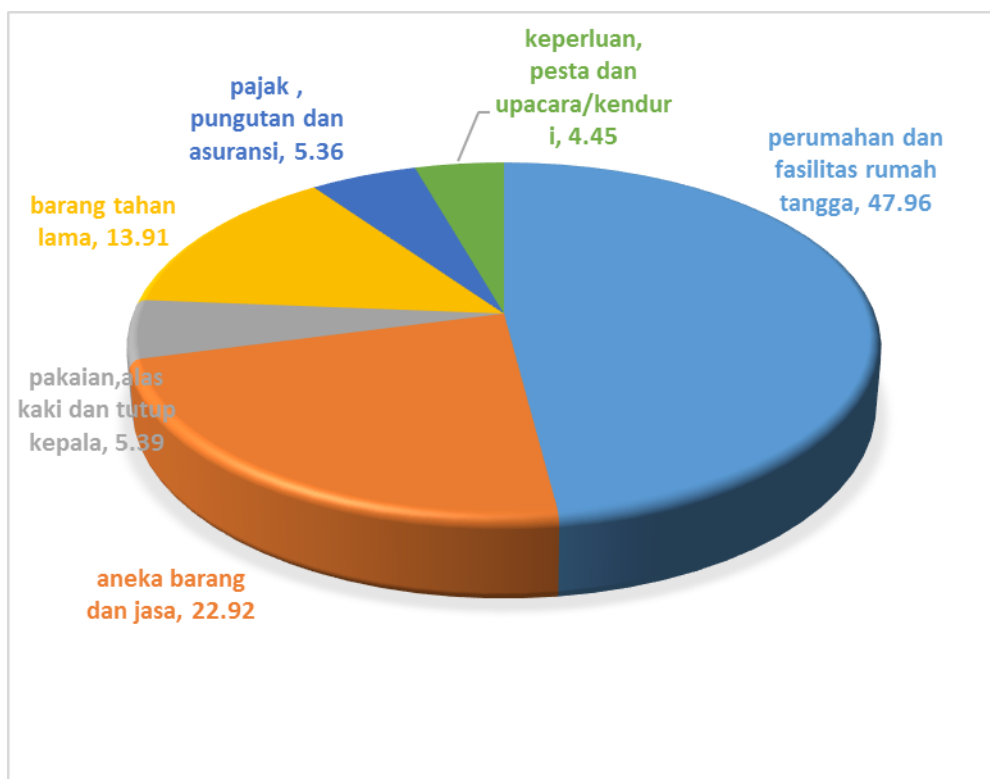
Apabila porsi untuk pengeluaran rokok ini jika dialihkan untuk peningkatan gizi keluarga tentu akan sangat lebih bermanfaat terlebih pada kelompok berpendapatan rendah mengingat konsumsi rokok juga banyak terdapat pada



kelompok pendapatan menengah ke bawah. Dengan gizi yang baik tentu akan meningkatkan tingkat kecerdasan anak dan selanjutnya akan berpeluang meningkatkan kesuksesan anak dalam menempuh pendidikan. Bagi anak yang hidup dari keluarga menengah ke bawah, dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi harapan untuk lepas atau terhindar dari kemiskinan maupun meningkatkan kesejahteraan pada generasi selanjutnya akan lebih mudah tercapai. Pengeluaran rokok bisa juga dialihkan untuk kebutuhan non makanan yang lebih penting seperti perbaikan rumah, sarana internet untuk peningkatan pengetahuan, dan sebagainya.

Untuk pengeluaran kelompok non makanan, jenis pengeluaran yang terbesar adalah perumahan dan fasilitas rumah tangga. Pengeluaran tersebut mencakup pengeluaran untuk sewa rumah, biaya listrik/air/telepon, dan pengeluaran telekomunikasi seperti pulsa telepon. Kelompok pengeluaran ini mempunyai porsi sekitar 47,96 persen dari total pengeluaran non makanan penduduk Kota Banjarbaru. Sedangkan sub kelompok aneka barang dan jasa menjadi kelompok dengan porsi pengeluaran terbesar kedua sebesar 22,92 persen untuk kelompok pengeluaran non makanan. Sub kelompok aneka barang dan jasa mencakup pengeluaran untuk perawatan sehari-hari (sabun, barang-barang kecantikan, surat kabar, dan lain-lain), biaya untuk kesehatan/pelayanan pengobatan, biaya pendidikan, pengeluaran untuk transportasi, biaya akomodasi, dan jasa-jasa lainnya di luar dari pengeluaran untuk perumahan, pakaian, barang tahan lama, pajak/asuransi maupun biaya keperluan pesta.

Gambar 5.5. Persentase Pengeluaran Penduduk menurut Kelompok Non Makanan Kota Banjarbaru Tahun 2018



Sumber : BPS, Susenas Maret 2018

BAB IX

KETENAGAKERJAAN



TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA
TAHUN 2018 SEBESAR 5,20%

BUKAN ANGKATAN KERJA
SEBESAR 36,49%



TPAK

SEBESAR 63,51%

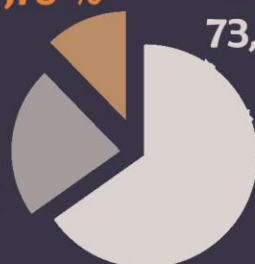


PENYERAPAN TENAGA KERJA

SEKTOR
PRIMER
9,78 %

SEKTOR
TERSIER
73,80 %

SEKTOR
SEKUNDER
16,42 %





PERKEMBANGAN KETENAGAKERJAAN

Perkembangan perekonomian sangat ditentukan oleh kualitas tenaga kerja yang tersedia. Jumlah angkatan kerja besar yang didukung dengan SDM yang berkualitas handal dan berdaya saing tinggi tentu akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian suatu daerah. Namun perlu menjadi perhatian apabila kualitas yang disediakan oleh penduduk asli suatu daerah tidak memenuhi kualitas spesifikasi yang dibutuhkan berbagai sektor yang terlibat dalam pembangunan maka penduduk sekitar wilayah tersebutlah yang akan mensupply kebutuhan tenaga kerja yang diperlukan. Apalagi di era globalisasi ini sekat ruang dan waktu tidak menjadi penghalang.

Di Indonesia masalah ketenagakerjaan disebabkan oleh banyak faktor. Faktor utama yang menjadi penyebabnya adalah adanya kesenjangan yang begitu besar antara ketersediaan kesempatan atau lapangan pekerjaan dengan jumlah angkatan kerja yang ada. Masalah ketenagakerjaan merupakan masalah pokok yang harus dihadapi oleh negara dan masyarakat Indonesia dan harus mendapatkan perhatian yang serius dari berbagai pihak baik pemerintah maupun swasta. Masalah yang paling pelik dan paling utama berkaitan dengan ketenagakerjaan adalah tingginya angka pengangguran. Adanya hubungan yang erat antara pengangguran, kemiskinan dan distribusi pendapatan, memaksa pemerintah berpikir keras mencari kebijakan-kebijakan yang mampu mengurangi angka pengangguran. Memperluas kesempatan kerja merupakan salah satu usaha yang dilakukan pemerintah untuk dapat mengatasi masalah ketenagakerjaan. Namun demikian, yang tidak kalah pentingnya adalah perlunya menumbuhkan kreativitas masyarakat untuk menciptakan lapangan kerja sendiri.



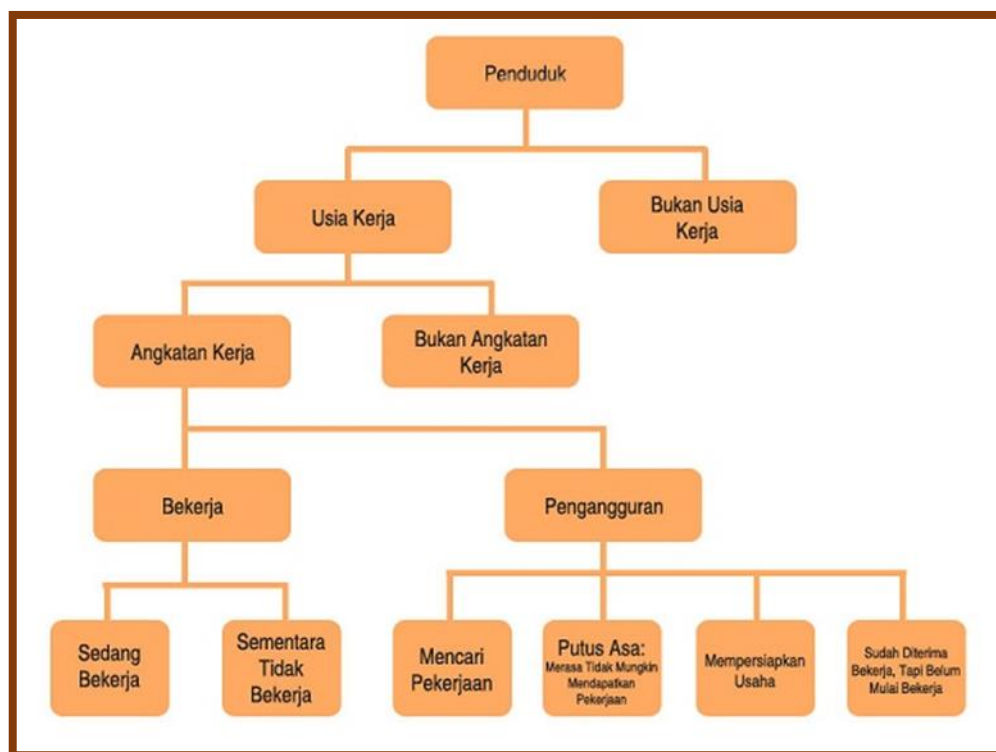
Pemerintah harus merangkul swasta untuk bersama-sama mengurangi dan menuntaskan masalah ketenagakerjaan di Indonesia ini. Banyak hal yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan diantaranya dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan ketenagakerjaan. Kebijakan-kebijakan tersebut diwujudkan dalam usaha konkret, yaitu memperluas kesempatan kerja dan lapangan kerja serta meningkatkan mutu tenaga kerja. Minimnya lapangan/kesempatan kerja ini mengakibatkan semakin tingginya jumlah pengangguran dan angka kemiskinan di Indonesia. Pengangguran berdampak sangat negatif terhadap proses pembangunan perekonomian negara.

Konsep/definisi ketenagakerjaan yang digunakan BPS merujuk pada rekomendasi International Labour Organization (ILO) sebagaimana tercantum dalam buku “Surveys of Economically Active Population, Employment, Un-employment and Underemployment” An ILO Manual on Concepts and Methods, ILO 1992. Hal ini dimaksudkan terutama agar data ketenagakerjaan yang dihasilkan dari berbagai survei di Indonesia dapat dibandingkan secara internasional, tanpa mengesampingkan kondisi ketenagakerjaan spesifik Indonesia. Menurut konsep Labour Force Framework, penduduk dibagi dalam beberapa kelompok. Kelompok-kelompok tersebut dapat digambarkan dalam Diagram Ketenagakerjaan sebagai berikut.

Penduduk usia kerja dibedakan menjadi angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Penduduk yang dikelompokkan sebagai bukan angkatan kerja adalah penduduk yang beraktivitas sekolah, mengurus rumah tangga, dan penduduk yang sudah tidak mampu bekerja, baik karena alasan kesehatan atau usia (misalnya pensiunan dan penerima pendapatan). Sedangkan angkatan kerja terdiri atas penduduk yang bekerja dan penduduk yang aktif berusaha mencari pekerjaan (pengangguran). Besarnya angkatan kerja mencerminkan besarnya penawaran tenaga kerja. Namun besarnya penawaran belum tentu sebanding dengan besarnya permintaan terhadap tenaga kerja. Akibatnya, akan ada angkatan

kerja yang tidak/belum terserap oleh lapangan pekerjaan yang tersedia atau yang disebut dengan pengangguran. Meskipun pengangguran tidak selalu berkorelasi positif dengan kemiskinan, namun penanganan terhadap tenaga kerja yang belum terserap oleh lapangan pekerjaan ini tetap perlu mendapat perhatian khusus. Tanpanya, tidak menutup kemungkinan hal itu akan menimbulkan berbagai masalah seperti kerawanan sosial.

Gambar 9.1. Bagan Ketenagakerjaan



9.1. Gambaran Ketenagakerjaan Di Kota Banjarbaru

Suatu daerah dengan perekonomian yang berkembang dengan pesat belum tentu menjadi jaminan yang paling baik untuk menyebabkan suatu daerah menjadi makmur. Pertumbuhan ekonomi yang pesat dengan memberikan perluasan kesempatan kerja adalah yang paling baik guna meningkatkan



kesejahteraan penduduk suatu wilayah. Disisi lain pertumbuhan penduduk yang didalamnya terdapat angkatan kerja juga menentukan perkembangan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Dengan kata lain terjadi hubungan kausalistis antara angkatan kerja dan pertumbuhan ekonomi yang merupakan penggerak perekonomian. Pertumbuhan penduduk dan hal-hal yang berhubungan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja secara tradisional dianggap sebagai faktor yang positif dan merangsang pertumbuhan ekonomi artinya semakin banyak penduduk akan meningkatkan potensi pasar domestik, dengan catatan mereka mempunyai daya beli, sehingga permintaan akan meningkat (Todaro, 1997:63).

Penduduk usia kerja didefinisikan sebagai penduduk usia 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja dapat dikelompokkan menjadi penduduk angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Penduduk angkatan kerja ini yang disebut sebagai penduduk yang aktif secara ekonomi, memasuki pasar tenaga kerja dan menjadi komponen supply tenaga kerja, serta termasuk dalam kategori faktor produksi dalam dimensi ekonomi. Penduduk angkatan kerja terdiri dari penduduk yang bekerja dan penduduk yang termasuk kategori pengangguran. Sementara penduduk bukan angkatan kerja adalah penduduk yang secara ekonomi tidak aktif meliputi penduduk bersekolah, mengurus rumah tangga atau melakukan kegiatan lainnya.

Peningkatan jumlah penduduk angkatan kerja selain meningkatkan perekonomian suatu daerah, tetapi juga akan menimbulkan berbagai macam tantangan yang harus dihadapi. Jumlah penduduk angkatan kerja diperkirakan akan terus berkembang seiring dengan laju pertumbuhan penduduk dan struktur dari penduduk itu sendiri yang kebanyakan adalah penduduk usia muda. Penduduk usia muda inilah yang kedepannya berpotensi masuk ke dalam angkatan kerja. Selain itu jumlah angkatan kerja juga dipengaruhi oleh migrasi penduduk yang masuk mengingat Kota Banjarbaru sejak awal berdirinya dikenal sebagai kota administratif yang memiliki banyak pendatang dikarenakan potensi ekonominya yang cukup tinggi.



Tantangan utama terkait tenaga kerja adalah bagaimana menciptakan lapangan kerja yang mampu mengimbangi peningkatan permintaan akan lapangan pekerjaan. Selain itu lapangan kerja yang tersedia diharapkan juga dapat memberikan pekerjaan yang layak baik dari segi upah maupun aspek yang lain. Ketidakmampuan menciptakan lapangan kerja yang bisa mengimbangi pertumbuhan angkatan kerja dapat berakibat pada meningkatnya pengangguran terutama di kelompok penduduk muda usia 15-29 tahun. Pembangunan yang utamanya mengejar pertumbuhan ekonomi harus mampu dibarengi dengan penciptaan lapangan kerja yang dapat menyerap angkatan kerja yang tersedia. Jika hal ini tidak dapat dilakukan maka dampak pertumbuhan ekonomi tidak akan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilaksanakan oleh BPS, pada tahun 2018 menunjukkan bahwa kegiatan utama dari keseluruhan penduduk usia kerja adalah bekerja yaitu sebesar 60,21 persen, diikuti mengurus rumah tangga sebesar 18,55 persen. Jika dilihat menurut jenis kelamin penduduk usia kerja laki-laki 71,18 persen diantaranya memiliki kegiatan utama bekerja, jauh dibandingkan penduduk usia perempuan yang hanya 48,60 persen yang memiliki kegiatan utama bekerja. Umumnya laki-laki adalah penanggung jawab ekonomi di dalam rumah tangga, sementara perempuan yang sudah berkeluarga umumnya lebih berkewajiban mengurus rumah tangga. Dalam proses pembangunan partisipasi penduduk perempuan juga penting untuk meningkatkan perekonomian. Dengan semakin banyaknya penduduk perempuan ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi menunjukkan terjadinya kesetaraan gender yang pada akhirnya diharapkan berkontribusi positif dalam peningkatan kondisi perekonomian.

Tabel 9.1 Persentase Penduduk Kota Banjarbaru 15 Tahun Keatas Menurut Kegiatan Utama Tahun 2018

Kegiatan utama	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
a. Bekerja	71,18	48,60	60,21
b. Pengangguran	4,34	2,20	3,30
c. Sekolah	12,40	11,47	11,95
d. Mengurus Rumah Tangga	3,47	34,52	18,55
c. Lainnya	8,61	3,22	5,99
Penduduk usia 15+	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS, Sakernas 2018

Angkatan kerja terdiri dari penduduk yang bekerja (untuk mendapatkan penghasilan atau keuntungan) dan pengangguran. Sedangkan bukan angkatan kerja terdiri dari penduduk yang pada periode rujukan tidak bekerja maupun menganggur. Pengukurannya didasarkan pada periode rujukan (time reference), yaitu kegiatan yang dilakukan selama seminggu yang lalu. Perbandingan jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas didefinisikan sebagai Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Indikator ini dapat mengindikasikan besaran ukuran relatif penawaran tenaga kerja (supply) yang dapat terlibat dalam produksi barang dan jasa. Rincian menurut jenis kelamin dan kelompok umur dapat memberikan gambaran mengenai distribusi penduduk yang aktif secara ekonomi (*economically active population*) di suatu negara atau wilayah.

Berdasarkan hasil Sakernas, pada tahun 2018 jumlah penduduk usia kerja di Kota Banjarbaru diperkirakan berjumlah 186.734 orang. Dari jumlah tersebut penduduk yang merupakan angkatan kerja diperkirakan sebanyak 118.594 orang.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Banjarbaru jika dilihat dalam kurun waktu lima tahun terakhir memiliki nilai berkisar antara 61 persen sampai 63 persen. Tahun 2014 menjadi tahun dimana TPAK mencapai titik terendah. Sedangkan tahun 2015 mencapai puncaknya dengan persentase TPAK adalah sebesar 64,86 persen. Pada tahun 2018 TPAK Kota Banjarbaru sebesar 63,51 persen. Dengan kondisi TPAK laki-laki adalah sebesar 75,52 persen dan TPAK perempuan 50,80 persen. Kondisi berdasarkan jenis kelamin ini menunjukkan masih dominannya sumbangan partisipasi laki-laki pada pasar kerja di Kota Banjarbaru.

Pada Tabel 9.2 terlihat bahwa 48,60 persen wanita usia 15 tahun ke atas di Kota Banjarbaru adalah melakukan kegiatan bekerja. Kondisi di Kota Banjarbaru masih mempunyai potensi yang cukup besar bagi wanitanya dalam memberikan sumbangsih yang lebih banyak lagi dalam perekonomian di Kota Banjarbaru hal ini dapat dilihat masih terdapat kesempatan lagi sumbangsih dari para perempuan di Kota Banjarbaru untuk berperan dalam perekonomian di Kota Banjarbaru yang pada akhirnya bisa membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga mereka.

Tabel 9.2. Kondisi Ketenagakerjaan Kota Banjarbaru Tahun 2013-2018

Uraian		Tahun				
		2013	2014	2015	2017	2018
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	61,27	60,18	64,86	60,98	63,51
	- Tingkat Kesempatan Kerja	97,41	94,65	96,33	94,49	94,80
	- Tingkat Pengangguran Terbuka	2,59	5,35	3,67	5,51	5,20
2.	Persentase Bukan Angkatan Kerja	38,79	39,82	35,14	39,02	36,49

Sumber: BPS, Sakernas 2018

*) tahun 2016 tidak dilaksanakan sakernas



TPAK berguna untuk melihat potensi tenaga kerja di suatu daerah sebagai sumber daya produksi yang jika dapat diserap pada sektor usaha, dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Indikator ini merupakan rasio antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja (usia produktif 15 tahun ke atas).

TPAK Kota 63,51 persen penduduk usia 15 tahun ke atas termasuk golongan penduduk **Angkatan Kerja**, sedangkan 36,49 persen lainnya adalah golongan penduduk **Bukan Angkatan Kerja**. Kemudian dari total angkatan kerja tersebut 94,80 persen kegiatannya adalah bekerja dan 5,20 persen kegiatannya mencari pekerjaan.

Jika dilihat berdasarkan gender, maka secara kodrati bahwa laki-laki adalah pemberi nafkah keluarga diperlihatkan dimana di Kota Banjarbaru pada tahun 2018; Jumlah laki laki yang bekerja lebih banyak dibandingkan perempuan, akan tetapi jumlah penganggurannya juga lebih banyak dibandingkan perempuan. Sebaliknya untuk penduduk bukan usia kerja lebih didominasi perempuan dengan persentase tertinggi pada kegiatan mengurus rumah tangga.

Pertumbuhan jumlah tenaga kerja secara alamiah dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk baik karena kelahiran dan kematian maupun karena migrasi. Pada tahun 2018 jumlah penduduk Kota Banjarbaru mencapai 248.423 orang, dan sekitar 75,17 persennya merupakan penduduk usia kerja. Jumlah penduduk Kota Banjarbaru selalu mengalami peningkatan tiap tahun, namun peningkatan ini tidak selamanya diikuti oleh peningkatan jumlah tenaga kerja.

Tabel 9.3. Distribusi Penduduk Kota Banjarbaru dan Provinsi Kalimantan Selatan menurut Status Angkatan Kerja Tahun 2018

Kegiatan	Laki-laki		Perempuan		Total	
	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kota Banjarbaru						
Angkatan Kerja						
Bekerja	68.349	71,18	112.431	48,60	112.431	60,21
Mencari Kerja	4.165	4,34	6.163	2,20	6.163	3,30
Bukan Angkatan Kerja						
Sekolah	11.909	12,40	22.313	11,47	22.313	11,95
Mengurus rumah tangga	3.336	3,47	34.646	34,52	34.646	18,55
Lainnya	8.264	8,61	11.181	3,32	11.181	5,99
Jumlah	96.023	100,00	90.711	100,00	186.734	100,00
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerjas (TPAK)		75,52		50,80		63,51
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)		3,11		2,16		5,20
Provinsi Kalimantan Selatan						
Angkatan Kerja						
Bekerja	1.226.395	80,46	795.271	53,44	2.021.666	67,11
Mencari Kerja	64.277	4,22	31.001	2,08	95.278	3,16
Bukan Angkatan Kerja						
Sekolah	112.891	7,41	113.127	7,60	226.018	7,50
Mengurus rumah tangga	57.401	3,77	513.293	34,49	570.694	18,94
Lainnya	63.245	4,15	35.496	2,39	98.741	3,28
Jumlah	1.524.209	100,00	1.488.188	100,00	3.012.397	100,00
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerjas (TPAK)		84,68		55,52		70,27
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)		4,98		3,75		4,50

Sumber: BPS, Sakernas 2018



Tabel 9.3. menunjukkan TPAK Kota Banjarbaru yang sempat mengalami penurunan di tahun 2014 tapi kemudian di tahun 2018 kembali meningkat, TKK menurun dari tahun 2013 yaitu sebesar 97,41 sekarang di tahun 2018 menjadi 94,80 dengan TPT pada tahun 2013 mencapai 2,39 menjadi 5,20 pada tahun 2018 yang cenderung meningkat. Artinya bahwa lapangan kerja di Kota Banjarbaru telah berkurang dimana dapat dilihat penganggurannya juga cenderung meningkat. Jika penduduk bekerja dan mendapatkan penghasilan yang layak secara merata, maka paradoks pertumbuhan ekonomi dapat disingkirkan. Pada akhirnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitaspun akan dapat dicapai.

9.2. Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Kesempatan Kerja

Pengangguran merupakan salah satu isu ketenagakerjaan di Indonesia, terlebih lagi situasi perekonomian Indonesia saat ini yang masih tertatih bangkit sebagai dampak dari perlambatan ekonomi global, menjadikan isu ini menjadi sangat relevan untuk diangkat. Beruntung bagi perekonomian Kalimantan Selatan, yang perlahan mulai bangkit dari keterpurukan akibat lesunya sektor pertambangan yang selama ini menjadi penyokong struktur perekonomian. Namun demikian imbas dari lesunya ekonomi global, sedikit banyak terlihat dari kondisi pengangguran di Kota Banjarbaru. Angka TPT Kota Banjarbaru dalam lima tahun terakhir menunjukkan selama kurun waktu tersebut tingkat pengangguran terbuka yaitu dari 2,59 persen tahun 2014 menjadi 5,20 persen pada tahun 2018.

Tabel 9.3 Jumlah Penduduk Berumur 15 tahun Ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan dan Kegiatan Utama Selama Seminggu Yang Lalu di Kota Banjarbaru Tahun 2018

Pendidikan Tertinggi Yang di Tamatkan	Angkatan Kerja			Bukan Angkatan Kerja
	Bekerja	Pengangguran	Jumlah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tidak/belum pernah sekolah	7.167	0	7.167	7.759
Sekolah dasar	18.529	212	18.741	8.132
Sekolah Menengah Pertama	19.316	1.418	20.734	23..244
Sekolah Menengah Atas	44.204	3.280	47.484	22.958
Diploma I/II/III/Akademi	3.798	831	4.629	1.498
Universitas	19.417	422	19.839	4.549
Jumlah	112.431	6.163	118.594	68.140

Sumber: BPS, Sakernas 2018

Pada tahun 2018 tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kota Banjarbaru sebagian besarnya adalah sekolah menengah atas. Tingkat pengangguran terbuka terutama di perkotaan, hanya menyebabkan aspek-aspek yang kompleks dari masalah kesempatan kerja dan merupakan penampakan gunung es dari kejadian pengangguran. Angka tingkat pengangguran terbuka ini belum mencerminkan ketersediaan lapangan pekerjaan yang memadai karena angka tingkat pengangguran hanya memperhitungkan aspek pencari kerja saja. Sementara penduduk yang setengah menganggur (*under employment*), pengangguran tak kentara (*disguised unemployment*), dan pengangguran tersembunyi (*hidden unemployment*) tidak kelihatan dari angka pengangguran terbuka.

Tabel 9.4. Penduduk Usia 15-24 tahun yang tidak bekerja, tidak sedang sekolah, dan tidak sedang mengikuti pelatihan (*Not in employment, education, and training/NEET*) Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2018

No	Kab/Kota	Jumlah NEET	Persentase NEET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tanah Laut	15.265	29,04
2	Kotabaru	12.282	23,66
3	Banjar	25.208	25,41
4	Barito Kuala	8.774	18,06
5	Tapin	8.967	30,39
6	HSS	8.894	25,13
7	HST	8.089	19,91
8	HSU	8.831	22,50
9	Tabalong	5.500	12,94
10	Tanah Bumbu	17.699	30,46
11	Balangan	3.358	16,17
12	Banjarmasin	24.898	20,75
13	Banjarbaru	8.966	19,11
Kalsel		156.731	22,87

Sumber : BPS, Sakernas 2018

Dari angkatan kerja di Kota Banjarbaru masih didominasi oleh penduduk usia 25 tahun ke atas. Namun perlu dicermati masih besarnya penduduk usia 15-24 tahun yang tidak sekolah, tidak bekerja, tidak sedang pelatihan (*Not in employment, education, and training/NEET*). Pada tahun 2018 terdapat 19,11 persen penduduk usia 15-24 tahun yang NEET. Bisa dibayangkan peluang tindakan yang kearah tidak produktif atau malah berpeluang menjadi tindak kejahatan akan semakin membesar pada mereka yang NEET ini.



9.3. Daya Serap Tenaga Kerja

Daya serap menunjukkan sebaran tenaga kerja pada berbagai lapangan usaha. Secara umum, sampai sejauh ini lapangan usaha pertanian masih menjadi tumpuan dalam penyerapan tenaga kerja di Kalimantan Selatan. Ini menunjukkan bahwa sektor pertanian memiliki peran sentral dalam menggerakkan roda perekonomian sekaligus menyokong pembangunan di bidang lainnya, seperti sosial, terutama penanganan pengangguran dan kemiskinan.

Upaya pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran diantaranya dengan melakukan perluasan lapangan kerja, baik dengan menyediakan lapangan kerja baru atau memperbesar lapangan kerja yang ada di setiap lapangan usaha. Ditinjau dari sisi lapangan usaha, maka pilihan bekerja di sektor tersier dan sekunder masih mendominasi pasar kerja di Kota Banjarbaru, bahkan persentasenya mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya sementara sektor primer paling sedikit dalam menyerap angkatan kerja. Ini seiring dengan struktur perekonomian Kota Banjarbaru yang lebih di dominasi oleh kelompok sektor tersier dan sekunder. Oleh karena itu penyerapan tenaga kerja menurut lapangan usaha ini juga dapat dijadikan salah satu ukuran untuk melihat potensi sektor perekonomian dalam menyerap tenaga kerja.

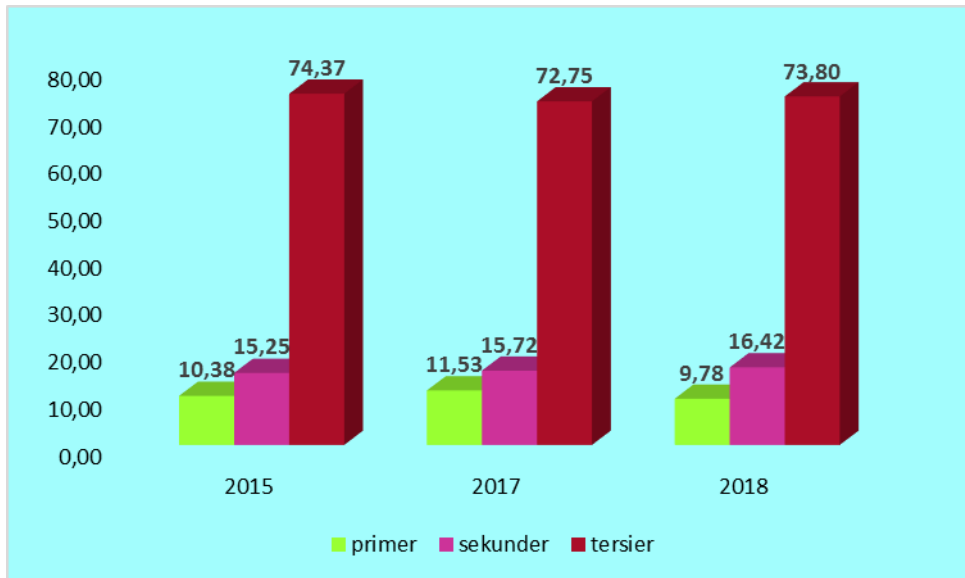
Selain berdasarkan tujuh belas kategori lapangan usaha, analisis struktur ekonomi dapat pula disimpulkan menjadi tiga sektor ekonomi yaitu sektor primer, sektor sekunder dan sektor tersier. Pengelompokan kategori ke dalam tiga sektor tersebut adalah sebagai berikut:



Primer	Sekunder	Tersier
•Pertanian, Kehutanan dan Perikanan •Pertambangan dan Penggalian	•Industri Pengolahan •Pengadaan Listrik dan Gas •Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang •Konstruksi	•Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor •Transportasi dan Perdagangan •Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum •Informasi dan Komunikasi •Jasa Keuangan •Real Estate •Jasa Perusahaan •Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib •Jasa Pendidikan •Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial •Jasa Lainnya

Selama kurun waktu tahun 2015-2018 daya serap ketiga kelompok sektor ini nampak berfluktuasi, namun demikian kelompok sektor tersier dan sekunder masih merupakan kelompok dengan daya serap tenaga kerja terbesar. Pada tahun 2018 kelompok sektor tersier menyerap 73,80 persen angkatan kerja, sedangkan pada sektor sekunder dan primer masing-masing sebesar 16,42 persen dan 9,78 persen. Keadaan ini menunjukkan kesesuaian dengan pola yang terdapat di daerah perkotaan, dimana sebagian besar penduduknya mempunyai mata pencaharian di sektor tersier.

**Grafik 9.3. Penyerapan Tenaga Kerja Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2015-2018**



Sumber: BPS, Sakernas 2018

9.4. Produktivitas Tenaga Kerja

Tingkat produktivitas tenaga kerja harus ditingkatkan dengan cara memperbaiki diri untuk menerapkan prinsip-prinsip efektifitas, efisiensi, kualitas, dan ramah lingkungan dalam berpikir, bertindak, dan berkarya. Penting untuk memacu efektifitas, efisiensi, kualitas dan ramah lingkungan dalam berproduksi. Bahkan jika memungkinkan harus digerakkan secara nasional untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta untuk mensejajarkan Indonesia dengan negara-negara lainnya. Kita perlu terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar kompetensi kerja terus meningkat dan pada akhirnya mendukung produktivitas. Upaya peningkatan kualitas SDM bisa dilakukan dengan pelatihan kerja di Balai Latihan kerja dan program pemagangan. Selain kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan

teknologi, dan perbaikan manajemen, inovasi merupakan salah satu faktor paling penting untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing bangsa.

Tabel 9.5. Produktivitas Tenaga Kerja Menurut Lapangan Usaha di Kota Banjarbaru Tahun 2015- 2018

Lapangan Usaha	2015		2017		2018	
	Tenaga Kerja (%)	Produktivitas Tenaga Kerja (000 Rp)	Tenaga Kerja (%)	Produktivitas Tenaga Kerja (000 Rp)	Tenaga Kerja (%)	Produktivitas Tenaga Kerja (000 Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Primer	10,38	37.278,51	11,53	38.808,96	9,78	46.180,22
Sekunder	15,25	95.537,56	15,72	112.607,99	16,42	109.706,07
Tersier	74,37	59.232,49	72,75	73.969,96	73,80	74.777,84
Total	100,00	62.490,93	100,00	75.992,55	100,00	77.715,72

Sumber: BPS, Sakernas 2018

*) tahun 2016 tidak dilaksanakan sakernas

Besaran tingkat produktivitas pekerja diestimasikan dengan menggunakan rasio PDRB atas dasar harga berlaku terhadap jumlah pekerja, sehingga secara langsung dapat menggambarkan kemampuan tenaga kerja dalam menghasilkan nilai tambah. Secara tidak langsung tingkat produktivitas pekerja di suatu daerah dapat menggambarkan efisiensi proses produksi akibat pemakaian teknologi, modal dan sumber daya lainnya.

Produktivitas tenaga kerja Kelompok sektor sekunder merupakan kelompok sektor dengan tingkat produktivitas terbesar. Pada tahun 2018 tenaga kerja kelompok sektor ini mempunyai tingkat produktivitas sebesar 109,71 juta rupiah per tenaga kerja per tahun. Tingkat produktivitas tenaga kerja kelompok



sektor tersier merupakan tingkat produktivitas tertinggi kedua pada perekonomian Kota Banjarbaru. Pada tahun 2018 rata-rata tenaga kerja kelompok sektor tersier mampu menciptakan nilai tambah sekitar 74,78 juta rupiah per tenaga kerja per tahun. Sedangkan untuk tenaga kerja pada kelompok sektor primer merupakan tenaga kerja dengan produktivitas paling rendah. Pada tahun 2018 tenaga kerja kelompok sektor ini menciptakan nilai tambah sekitar 46,18 juta rupiah per tenaga kerja per tahun.

BAB X

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

ANGKA HARAPAN HIDUP

71,67 TAHUN

PENGELUARAN PERKAPITA
Rp. 13.590.000

HARAPAN LAMA SEKOLAH
14,79 TAHUN

RATA-RATA LAMA SEKOLAH

10,93 TAHUN

IPM KOTA BANJARBARU
TAHUN 2018 MENDUDUKI
PERINGKAT PERTAMA SE-KALSEL **IPM 78,83**





INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

Manusia menempati peran vital dalam pembangunan. Dalam berbagai literatur ekonomi pembangunan, manusia (baik dalam konsep human capital atau human development) selalu dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi.

Pemahaman ini didasarkan pada argumen bahwa sumberdaya manusia yang berkualitas, dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi level Pembangunan Manusia, dapat memengaruhi ekonomi melalui peningkatan kapabilitas, kreativitas dan produktivitas.

Konsep Pembangunan Manusia dikembangkan oleh Mahbub ul Haq bersama dengan teman kuliahnya, Amartya Sen, yang sedang mencari tolok ukur alternatif dari PDB per kapita, sebagai acuan ukuran kemiskinan dari aspek multidimensi yang memengaruhi kualitas kehidupan manusia. Konsep yang kemudian menjadi sebuah perhitungan dalam bentuk indeks ini lalu digunakan dan dipublikasikan oleh United National Development Programme (UNDP).

Indeks Pembangunan Manusia bermanfaat untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup manusia, mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk), menilai tingkat perkembangan sosial dan ekonomi negara, dan menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara.

Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).



Dari tahun ke tahun perhatian pemerintah khususnya para elit kekuasaan, politisi termasuk para pengamat, akademis dan peneliti tertuju pada laporan *Human Development Index* (HDI) yang dipublikasikan setiap tahun oleh *United Nation Development Programme* (UNDP) yaitu lembaga dunia yang bernaung di bawah Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Laporan penyajian pembangunan sumber daya manusia (SDM) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) seringkali memunculkan polemik dan pro-kontra, namun semuanya sepakat bahwa pembangunan SDM sangat penting dan menjadi kunci keberhasilan pembangunan Daerah maupun Nasional pada berbagai bidang terutama terkait dengan kesejahteraan rakyat. Dengan kata lain, Indeks Pembangunan Manusia merupakan tolok ukur keberhasilan pembangunan sosial, ekonomi dan bidang-bidang lain.

Untuk itu peningkatan mutu sumber daya manusia adalah suatu keharusan yang tidak saja bertumpu pada tanggung jawab pemerintah (negara) namun semua pihak baik keluarga dan masyarakat secara kelompok berkepentingan lainnya (*stakeholders*). Peningkatan kualitas SDM ini perlu upaya sistematis sehingga harus terintegrasikan dalam semua aspek kehidupan; ekonomi, pendidikan, kesehatan, politik, budaya dan kehidupan sosial lainnya. Pembangunan manusia juga mementingkan apa yang bisa dilakukan oleh manusia dengan kemampuan yang dimilikinya, untuk menikmati kehidupan, melakukan kegiatan produktif, atau ikut serta dalam berbagai kegiatan budaya, dan sosial politik. Terdapat beberapa premis penting seputar pembangunan manusia yang menjadi fokus dalam diskusi-diskusi di UNDP, beberapa diantaranya adalah:

1. Pembangunan harus mengutamakan penduduk sebagai fokus pembangunan (*People Centered Development*);
2. Pembangunan dimaksudkan untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi penduduk (*a process of enlarging people's choices*), tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan mereka.

- 
3. Pembangunan manusia memperhatikan bukan hanya pada upaya meningkatkan kemampuan (kapabilitas) manusia tetapi juga pada upaya-upaya memanfaatkan kemampuan manusia tersebut secara optimal;
 4. Pembangunan manusia didukung empat pilar pokok, yaitu: produktifitas, pemerataan, kesinambungan, dan pemberdayaan;
 5. Pembangunan manusia menjadi dasar dalam penentuan tujuan pembangunan dan dalam menganalisis pilihan-pilihan untuk mencapainya.

10.1. Teori dan Konsep Pembangunan Manusia

Menurut UNDP, pembangunan manusia adalah suatu proses untuk mempebesar pilihan-pilihan bagi manusia (*"a process of enlarging people's choices"*). Dari definisi ini dapat ditarik kesimpulan bahwa fokus pembangunan suatu negara adalah penduduk karena penduduk adalah kekayaan nyata suatu negara. Konsep atau definisi pembangunan manusia tersebut pada dasarnya mencakup dimensi pembangunan yang sangat luas. Definisi ini lebih luas dari definisi pembangunan yang hanya menekankan pada pertumbuhan ekonomi. Dalam konsep pembangunan manusia, pembangunan seharusnya dianalisis serta dipahami dari sudut manusianya, bukan hanya dari pertumbuhan ekonominya.

Sebagaimana dikutip dari UNDP, sejumlah premis penting dalam pembangunan manusia diantaranya adalah: Pembangunan harus mengutamakan penduduk sebagai pusat perhatian; Pembangunan dimaksudkan untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi penduduk, tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan mereka; oleh karena itu, konsep pembangunan manusia harus terpusat pada penduduk secara keseluruhan, dan bukan hanya pada aspek ekonomi saja; Pembangunan manusia memperhatikan bukan hanya pada upaya meningkatkan kemampuan (kapabilitas) manusia tetapi juga pada upaya-upaya



memanfaatkan kemampuan manusia tersebut secara optimal. Pembangunan manusia didukung empat pilar pokok, yaitu:

- a. **Produktivitas.** Manusia harus berkemampuan untuk meningkatkan produktifitasnya dan berpartisipasi penuh dalam mencari penghasilan dan lapangan kerja. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi merupakan bagian dari pembangunan manusia.
- b. **Pemerataan.** Setiap orang harus memiliki kesempatan yang sama. Semua hambatan terhadap peluang ekonomi dan politik harus dihapuskan. Sehingga semua orang dapat berpartisipasi dan mendapat keuntungan dari peluang yang sama.
- c. **Keberlanjutan.** Akses terhadap peluang/kesempatan harus tersedia bukan hanya untuk generasi sekarang tetapi juga untuk generasi yang akan datang. Semua sumber daya harus dapat diperbaharui.
- d. **Pemberdayaan.** Semua orang diharapkan berpartisipasi penuh dalam pengambilan keputusan dalam proses aktifitasnya.

Sejak tahun 1990, Badan Dunia UNDP (*United Nations Development Programme*) mengadopsi suatu paradigma baru mengenai pembangunan yang disebut Paradigma Pembangunan Manusia (PPM), paradigma ini melihat manusia dari sisi yang lebih kompleks dan komprehensif karena disamping memperhitungkan keberhasilan pembangunan manusia dari aspek ekonomi, juga memperhitungkan keberhasilan pembangunan manusia dari aspek non-ekonomi.

Berdasarkan konsep di atas, pembangunan manusia berarti meningkatkan sumber daya manusia (SDM) dalam arti yang luas meliputi aspek jasmani dan rohani, material dan spiritual dalam skala individu maupun sosial yang pada akhirnya harus mampu menjadi sumber daya pembangunan secara komprehensif.

Seperti halnya pembangunan ekonomi, pembangunan manusia memerlukan ketersediaan analisis data guna perencanaan dan pengambilan kebijakan agar tepat sasaran serta perlu dievaluasi sejauh mana pembangunan



yang dilaksanakan mampu meningkatkan kualitas hidup manusia sebagai obyek pembangunan.

Salah satu alat ukur yang dianggap dapat merefleksikan status pembangunan manusia adalah *Human Development Index* (HDI) atau IPM. IPM merupakan suatu indeks komposit yang mencakup tiga bidang pembangunan manusia yang dianggap sangat mendasar, yaitu usia hidup (*longevity*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent living*).

Pada tahun 2016 Badan Pusat Statistik mempergunakan perhitungan IPM dengan metode baru. Alasan mengapa dilakukan perubahan IPM ini adalah sebagai berikut :

1. UNDP sudah merubah metodologi perhitungan IPM sejak tahun 2010 dan revisi metodologi perhitungan pada tahun 2011.
2. Negara-negara lain, seperti India dan Filipina telah memulai mengaplikasikan perhitungan IPM dengan metode baru ini, bahkan India telah memulainya sejak tahun 2011.
3. Tersedianya data Angka Harapan Hidup saat lahir (e_0) hasil proyeksi SP2010.
4. Perubahan *weight* dalam susenas yaitu MYS dan EYS.
5. Perubahan proksi indikator daya beli.

Tabel 10.1. Dimensi Penghitungan IPM Metode Lama dan Baru

DIMENSI	METODE BARU	
	UNDP	BPS
Kesehatan	Angka Harapan Hidup (e_0)	Angka Harapan Hidup (e_0)
Pengetahuan	1. Expected Years of Schooling (EYS)	1. Expected Years of Schooling (EYS)
	2. Mean Years of Schooling (MYS)	2. Mean Years of Schooling (MYS)
Standar Hidup Layak	PNB per kapita (PPP US\$)	Pengeluaran per kapita disesuaikan

Nilai maksimum dan minimum untuk setiap indikator pada perhitungan IPM dapat dilihat pada tabel berikut :

Keunggulan metode baru dalam perhitungan IPM ini dibandingkan dengan metode sebelumnya antara lain :

1. Perhitungan IPM dengan metode baru menggunakan indikator yang lebih tepat dan dapat membedakan dengan lebih baik (diskriminatif)
 - a. PNB menggantikan PDB karena lebih menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah.
 - b. Melek huruf tidak digunakan lagi karena tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antar daerah dengan baik (angka melek huruf sebagian daerah sudah tinggi).
2. Capaian yang rendah pada salah satu komponen tidak dapat ditutupi oleh komponen lain yang capaiannya lebih tinggi (*Arithmetic mean* $\Rightarrow$ *Geometric mean*).

Nilai maksimum dan minimum untuk setiap indikator pada perhitungan IPM dengan metode baru dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 10.2. Nilai Maksimum dan Minimum Indikator IPM Metode Baru

Indikator	MINIMUM		MAKSIMUM	
	UNDP	BPS	UNDP	BPS
Angka Harapan Hidup (e ₀)(Tahun)	20	20	85	85
<i>Expected Years of Schooling /EYS (Tahun)</i>	0	0	18	18
<i>Mean Years of Schooling/MYS(Tahun)</i>	0	0	13,1	15
Pengeluaran per kapita disesuaikan	100 (PPP US\$)	1.007.436 (IDR)	107.721 (PPP US\$)	26.572.352 (IDR)

IPM merupakan angka agregat yang dapat diartikan sebagai jarak yang harus ditempuh (*shortfall*) suatu wilayah untuk mencapai nilai maksimum 100 yang berarti bahwa pembangunan manusia secara keseluruhan tersebut telah tercapai. Bagi suatu wilayah angka IPM yang diperoleh menggambarkan kemajuan pembangunan manusia di daerah tersebut.

Dengan diterapkannya penghitungan IPM metode baru, maka angka-angka IPM sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang sudah direvisi menggunakan metode baru. Sehingga angka IPM tahun 2011 s/d 2014 metode lama tidak digunakan lagi, atau tidak dapat digunakan sebagai pembandingan dengan tahun 2016 metode baru.

Berikut merupakan komponen dalam penghitungan IPM :

a. Angka Harapan Hidup saat Lahir

Pembangunan manusia harus lebih mengupayakan agar penduduk dapat mencapai “usia hidup” yang panjang dan sehat. Sebenarnya banyak indikator yang dapat digunakan untuk mengukur usia hidup tetapi dengan mempertimbangkan ketersediaan data secara global, UNDP memilih indikator angka harapan hidup



waktu lahir (*life expectancy at birth*) yang biasa dinotasikan dengan e_0 . Angka harapan hidup saat lahir merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seorang anak baru lahir. Angka harapan hidup (AHH) mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat, yang dihitung dengan cara tidak langsung dengan paket program *Micro Computer Program for Demographic Analysis* (MCPDA) atau *Mortpack*. AHH negara berkembang lebih rendah dibandingkan AHH negara maju karena AHH dipengaruhi oleh tingkat kematian bayi yang tinggi. Sumber data yang digunakan adalah Susenas.

b. Indikator Pendidikan

Selain usia hidup, indikator pendidikan juga diakui secara luas sebagai unsur mendasar dari pembangunan manusia. Melalui perhitungan metode terbaru, indikator pendidikan diukur dengan dua indikator, yaitu rata-rata lama sekolah (MYS) dan rata-rata harapan lama sekolah (EYS).

Indikator rata-rata lama sekolah (MYS) merupakan jumlah tahun yang digunakan penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir dan asumsi dalam keadaan normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Sumber data yang digunakan dalam perhitungan MYS ini adalah Susenas KOR.

Rata-rata harapan lama sekolah (EYS) dihitung dari penduduk usia 7 tahun ke atas yang disesuaikan dengan program wajib belajar 9 tahun yang dimulai pada usia 7 tahun. Kelemahan tidak meng-cover anak sekolah yang masuk SD pada usia 5 atau 6 tahun. Penghitungan EYS dilakukan dengan empat langkah, yaitu menghitung jumlah penduduk menurut umur (7th ke atas); menghitung jumlah penduduk yang masih sekolah menurut umur (7th ke atas); menghitung rasio penduduk masih sekolah menurut umur; dan menghitung harapan lama sekolah.

EYS dihitung dengan menggunakan dua variabel secara simultan, yaitu : tingkat/kelas yang sedang/pernah dijalani, dan jenjang pendidikan tertinggi yang

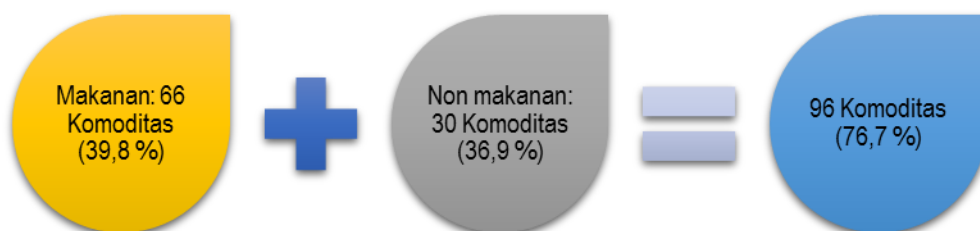


ditamatkan. Dari penghitungan dengan menggunakan pola hubungan antar variabel-variabel tersebut akan diperoleh data lama sekolah masing-masing individu yang kemudian digunakan sub program MEANS dalam paket SPSS untuk menghitung rata-rata lama sekolah agregat.

c. Standar Hidup Layak

Selain usia hidup dan pendidikan, unsur dasar pembangunan manusia yang diakui secara luas adalah standar hidup layak. Banyak indikator alternatif yang dapat digunakan untuk mengukur unsur ini. Dengan mempertimbangkan ketersediaan data secara internasional UNDP, memilih GDP per kapita riil yang telah disesuaikan (*adjusted real GDP per capita*) sebagai indikator hidup layak. Berbeda dengan indikator untuk kedua unsur IPM lainnya, indikator standar hidup layak diakui sebagai indikator input, bukan indikator dampak, sehingga sebenarnya kurang sesuai sebagai unsur IPM. Walaupun demikian UNDP tetap mempertahankannya karena indikator lain yang sesuai tidak tersedia secara global. Selain itu, dipertahankannya indikator input juga merupakan argumen bahwa selain usia hidup dan pengetahuan masih banyak variabel input yang pantas diperhitungkan dalam perhitungan IPM. Dilemanya, memasukkan banyak variabel atau indikator akan menyebabkan indikator komposit menjadi tidak sederhana. Dengan alasan itu maka GDP riil per kapita yang telah disesuaikan dianggap mewakili indikator input IPM lainnya. Untuk keperluan perhitungan IPM data dasar PDRB per kapita tidak dapat digunakan untuk mengukur standar hidup layak karena bukan ukuran yang peka untuk mengukur daya beli penduduk (yang merupakan fokus IPM). Sebagai penggantinya digunakan konsumsi per kapita riil yang telah disesuaikan untuk keperluan yang sama. Untuk menghitung konsumsi per kapita riil yang disesuaikan pertama dihitung terlebih dahulu daya beli untuk tiap unit barang atau *Purchasing Power Parity* (PPP/unit).

Pada perhitungan IPM, terpilih 96 komoditas dalam penghitungan PPP, dengan pertimbangan share 27 komoditas (metode lama) terus menurun dari 37,52 persen pada th 1996 menjadi 24,66 persen pada tahun 2012.

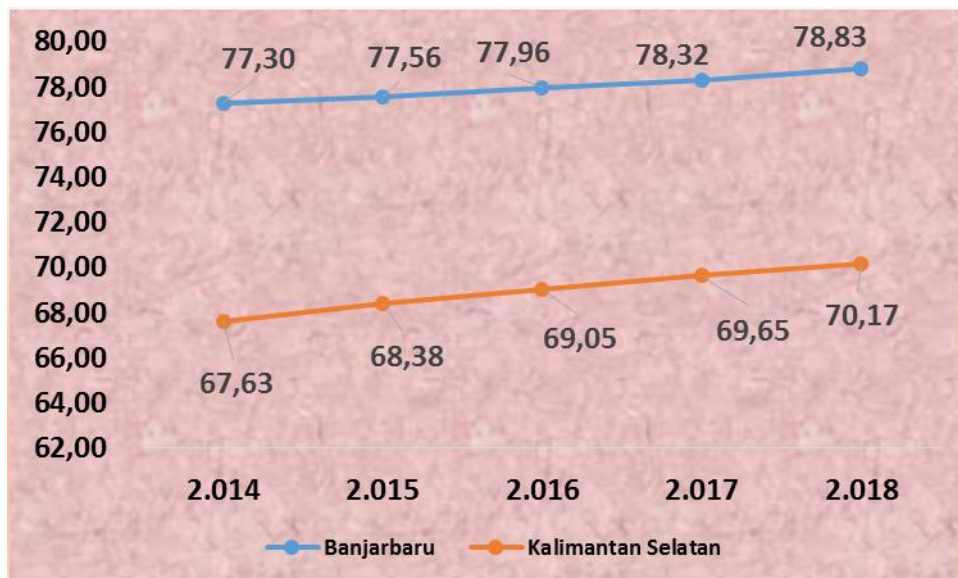


10.2 Perkembangan IPM Kota Banjarbaru

Sejak tahun 2015, BPS merilis angka IPM yang dihitung dengan menggunakan metode baru. Penghitungan IPM tersebut masih mencakup dimensi yang sama, akan tetapi dilakukan beberapa penyesuaian didalamnya, yaitu mengubah indikator Angka Melek Huruf menjadi indikator Rata-rata Lama Sekolah, mengubah cakupan penghitungan Rata-rata Lama Sekolah menjadi penduduk usia 25 tahun keatas, dan menambah komoditas dalam pengukuran indikator Pengeluaran Perkapita menjadi 96 komoditas.

Dengan menggunakan metode baru tersebut dihasilkan angka IPM Kota Banjarbaru pada tahun 2018 sebesar 78,83. Angka ini termasuk kategori tinggi (diantara 70 hingga 80) dan jauh diatas IPM Provinsi Kalimantan Selatan secara keseluruhan yang sebesar 70,17. Bahkan jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Kalimantan Selatan, Kota Banjarbaru menduduki peringkat pertama. Dilihat dari angka IPM-nya, maka dapat dikatakan bahwa pembangunan di kota Banjarbaru termasuk cukup berhasil. IPM Kota Banjarbaru selalu menduduki peringkat pertama di Provinsi Kalimantan Selatan setiap tahunnya seperti pada grafik 10.1.

Grafik 10.1 Perkembangan IPM Kota Banjarbaru dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014 – 2018



Sumber : BPS Prov Kalimantan Selatan

Berdasarkan kriteria dengan capaian IPM menurut Konsep Pembangunan Manusia yang dikembangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui UNDP, selama kurun waktu 2014-2018 Kota Banjarbaru masuk dalam tingkatan status atau kategori kinerja pembangunan manusia **Tinggi** yaitu dengan capaian IPM di antara 70,00 – 79,99.

Tabel 10.3. Kriteria dan Tingkatan Status Pembangunan Manusia Menurut UNDP

Tingkatan Status	Kriteria (Persen)
(1)	(2)
1. Rendah	IPM < 60
2. Sedang	$60 \leq \text{IPM} < 70$
3. Tinggi	$70 \leq \text{IPM} < 80$
4. Sangat Tinggi	$\text{IPM} \geq 80$

Sumber : BPS Provinsi Kalsel

Perkembangan tiga dimensi dasar pembentuk IPM Kota Banjarbaru ditunjukkan oleh tabel 10.4.

Tabel 10.4. Perkembangan Komponen IPM Kota Banjarbaru Tahun 2014 -2018

Tahun	Harapan Hidup		EYS		MYS		Pengeluaran (000)	
	Bjb	Kalsel	Bjb	Kalsel	Bjb	Kalsel	Bjb	Kalsel
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2014	71,06	67,47	14,73	11,96	10,74	7,60	12.376	10.748
2015	71,36	67,80	14,75	12,21	10,75	7,76	12.467	10.891
2016	71,43	67,92	14,77	12,29	10,76	7,89	12.879	11.307
2017	71,50	68,02	14,78	12,46	10,77	7,99	13.279	11.600
2018	71,67	68,23	14,79	12,50	10,93	8,00	13.590	12.062

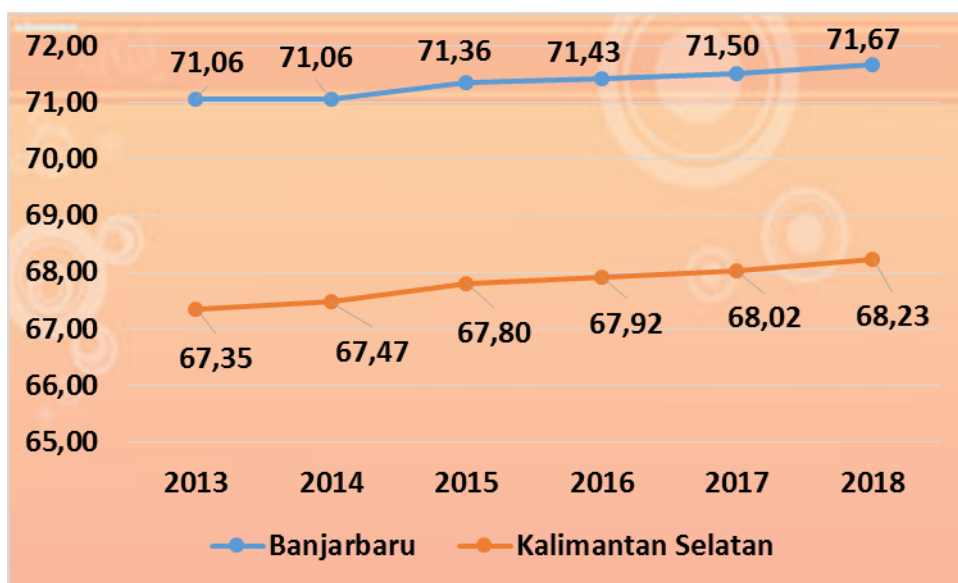
Sumber : BPS Prov Kalimantan Selatan

10.3. Angka Harapan Hidup (AHH)

Angka harapan hidup adalah rata-rata jumlah tahun kehidupan yang masih dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur tertentu. Misalnya, angka harapan hidup umur sepuluh tahun, berarti rata-rata tahun kehidupan yang akan datang dijalani oleh mereka yang telah mencapai usia

sepuluh tahun. Manfaat mengetahui angka harapan hidup adalah untuk menentukan tingkat kemakmuran penduduk dalam suatu daerah atau negara.

Grafik 10.2. Perkembangan Angka Harapan Hidup Kota Banjarbaru dan Kalimantan Selatan Tahun 2014-2018



Sumber : BPS Prov Kalimantan Selatan

Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

Usia harapan hidup juga menjadi salah satu indikator dalam mengukur indeks pembangunan manusia. Adanya perbaikan pada pelayanan kesehatan melalui keberhasilan pembangunan pada sektor kesehatan dapat diindikasikan dengan adanya peningkatan umur harapan hidup waktu lahir. Meningkatnya umur



harapan hidup waktu lahir memberikan gambaran tentang perbaikan tingkat kesehatan dan tingkat sosial ekonomi masyarakat.

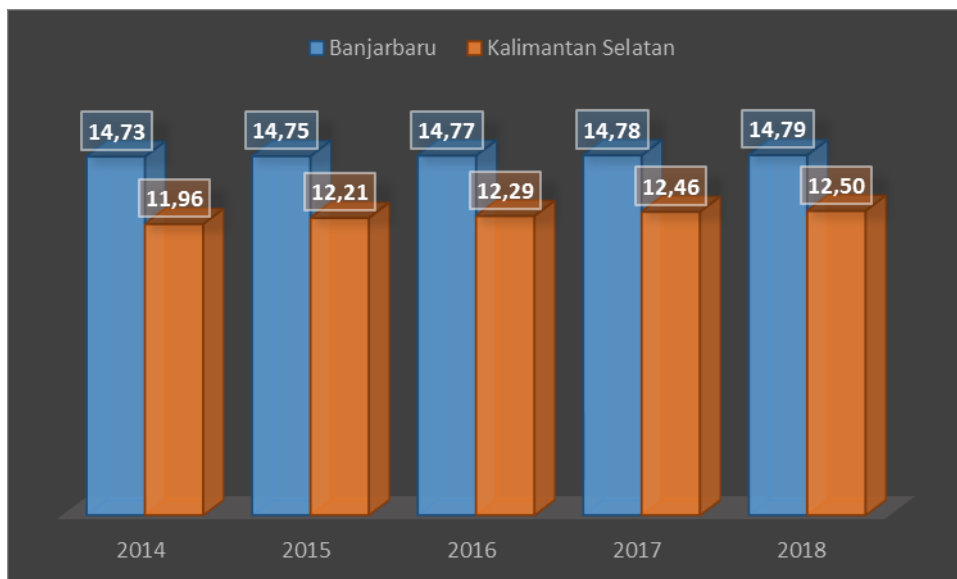
AHH Kota Banjarbaru selalu mengalami peningkatan hingga tahun 2018, capaian AHH berada pada usia 71,67 tahun yang artinya rata-rata penduduk Kota Banjarbaru akan hidup sampai usianya 71 tahun. Angka harapan hidup penduduk Kota Banjarbaru ini lebih tinggi dibanding rata-rata penduduk Provinsi Kalimantan Selatan yang hanya mencapai usia 67-68 tahun, dimana AHH nya adalah sebesar 68,23 tahun.

10.4. Harapan Lama Sekolah (*Expected Year Schooling*) dan Rata-Rata Lama Sekolah (*Mean Year Schooling*).

Upaya memperbaiki profil pendidikan penduduk sudah merupakan suatu kewajiban suatu negara. Pesatnya perbaikan profil pendidikan tidak dapat dipungkiri sebagai komitmen yang kuat dari pemerintah dan masyarakat dalam bidang pendidikan. Komitmen pemerintah didasarkan pada dua alasan yaitu **pertama**, pemerintah memiliki kewajiban konstitusional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa (UUD 1945 alinea ke empat), dan **kedua**, anggapan bahwa pendidikan adalah kunci mencapai keunggulan bangsa.

Melalui perhitungan metode terbaru, indikator pendidikan diukur dengan dua indikator, yaitu rata-rata lama sekolah (MYS) dan rata-rata harapan lama sekolah (EYS). Indikator rata-rata lama sekolah (MYS) merupakan jumlah tahun yang digunakan penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir dan asumsi dalam keadaan normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Sumber data yang digunakan dalam perhitungan MYS ini adalah Susenas KOR.

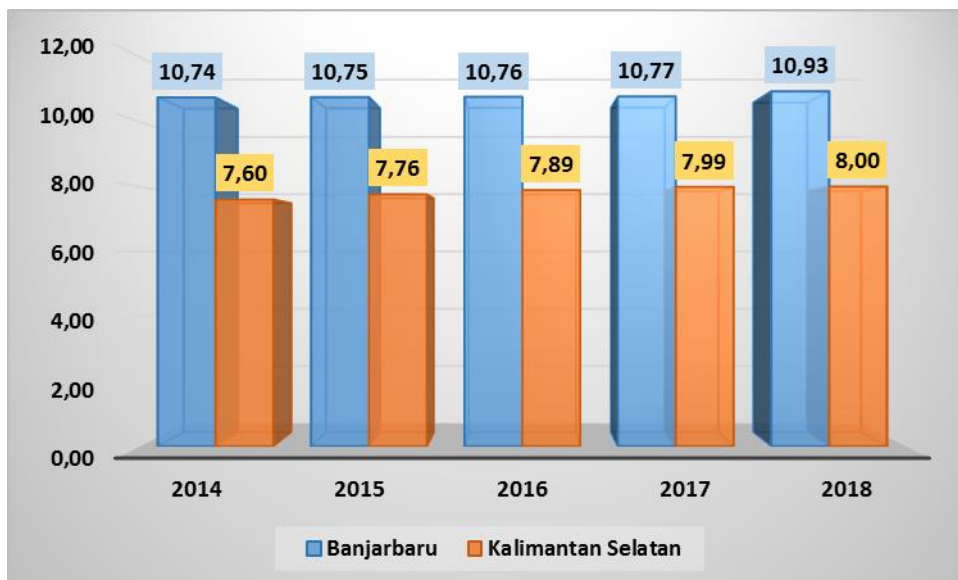
**Grafik 10.3. Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah
Provinsi Kalimantan Selatan dan Kota Banjarbaru Tahun 2014-2018**



Sumber : BPS Prov Kalimantan Selatan

Angka Harapan Lama Sekolah (EYS) merupakan indikator yang menggambarkan lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Dari sini dapat diketahui perkembangan pembangunan yang terjadi pada berbagai jenjang pendidikan. Perhitungan EYS melibatkan penduduk usia 7 tahun keatas, Secara rata-rata penduduk usia 7 tahun yang mulai bersekolah di Kota Banjarbaru diharapkan dapat mengenyam pendidikan hingga usia 14,79 tahun. Angka ini terus meningkat dari tahun ke tahun sejak 2014, begitu pula halnya dengan wilayah Provinsi Kalimantan Selatan secara umum. Angka Harapan Lama Sekolah meningkat dari 11,96 di tahun 2014 menjadi 12,50 di tahun 2017.

**Grafik 10.4. Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah
Provinsi Kalimantan Selatan dan Kota Banjarbaru Tahun 2014-2018**



Sumber : BPS Prov Kalimantan Selatan

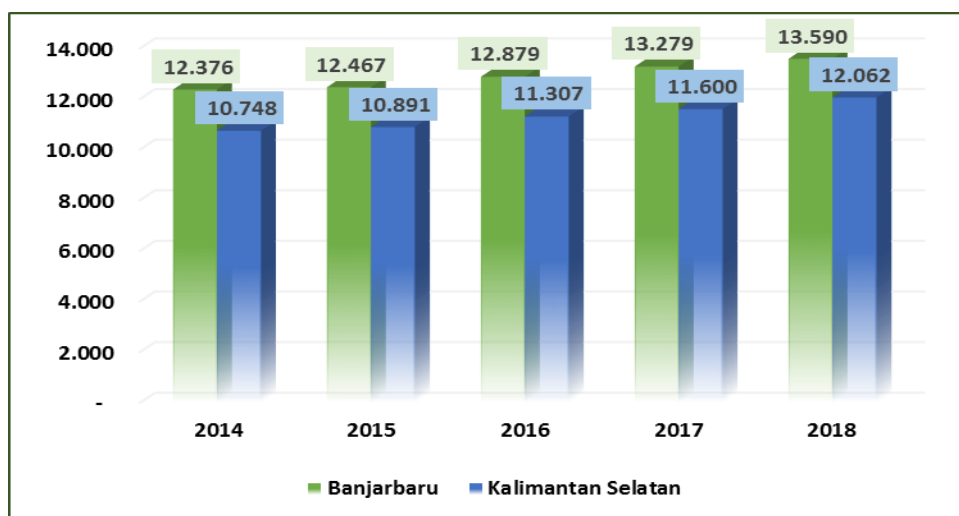
Indikator Rata-rata Lama Sekolah (*Mean Years of Schooling/MYS*) menunjukkan seberapa tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk, yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia secara agregat. Seperti telah disebutkan sebelumnya, Rata-rata Lama Sekolah dengan metode baru dihitung dari penduduk usia 25 tahun ke atas. Rata-rata Lama Sekolah penduduk Provinsi Kalimantan Selatan secara umum pada tahun 2018 mencapai 8,00 tahun, sedangkan secara khusus penduduk di wilayah Kota Banjarbaru sudah mencapai 10,93 tahun. Hal ini berarti bahwa secara rata-rata penduduk Kota Banjarbaru sudah bersekolah sampai dengan jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA).

10.5. *Purchasing Power Parity*/Pengeluaran Per Kapita disesuaikan (PPP)

Dimensi ekonomi diwakili oleh indikator Pengeluaran Perkapita yang Disesuaikan yang mencerminkan daya beli atau standar layak hidup. Penghitungannya sendiri melibatkan 96 komoditas, yang terdiri dari 66 komoditas makanan dan 30 non makanan.

Pada tahun 2018 pengeluaran perkapita untuk Kota Banjarbaru secara rata-rata mencapai 13.590.000 rupiah per kapita per tahun. Besaran ini meningkat secara terus menerus sejak tahun 2014, menunjukkan adanya peningkatan positif pada daya beli masyarakat. Disamping itu nilai tersebut juga lebih tinggi dari daya beli penduduk Kalimantan Selatan secara keseluruhan, dimana pada tahun yang sama adalah sebesar 12.062.000 rupiah.

Grafik 10.5. Perkembangan PPP Penduduk Kota Banjarbaru dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014-2018 (000 Rupiah)

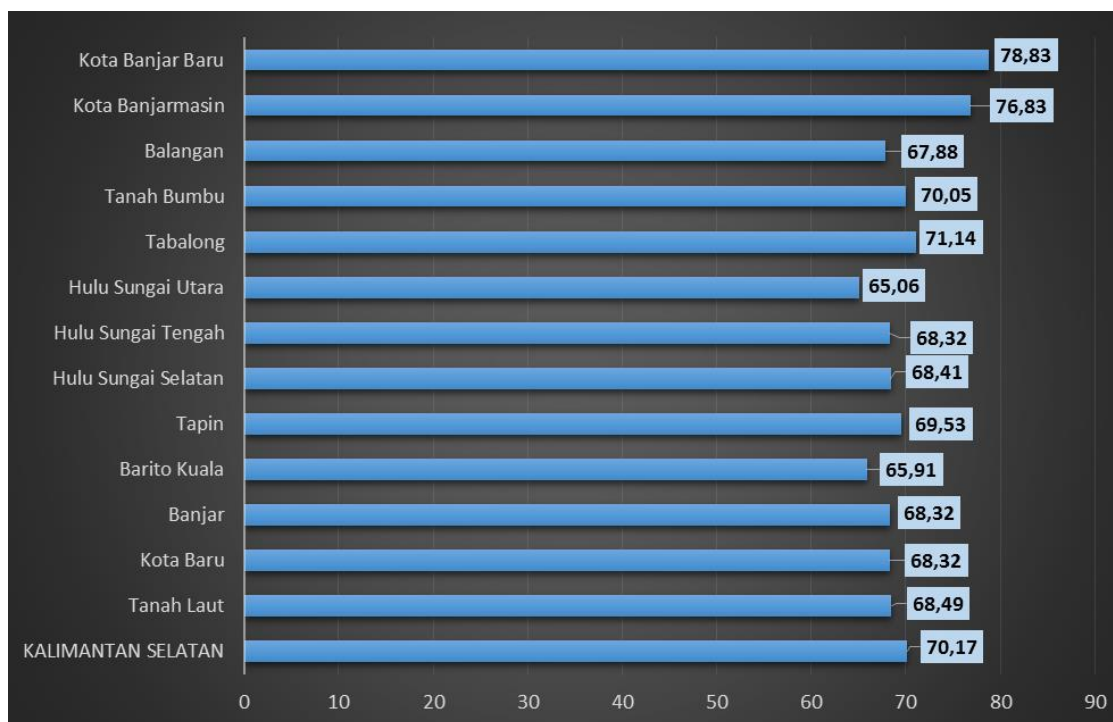


Sumber : BPS Prov Kalimantan Selatan

Ketiga komponen pembentuk IPM Kota Banjarbaru seperti dijelaskan tersebut di atas menunjukkan angka yang selalu berada di atas angka komponen

IPM penduduk Kalimantan Selatan, hal ini karena pembentuk IPM Kalimantan Selatan adalah seluruh komponen IPM yang ada di Kabupaten/kota pendukungnya. Sementara dari 13 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan hanya ada hanya ada tiga kabupaten/kota yang tingkatan status angka IPM-nya tergolong Tinggi yaitu Kota Banjarbaru, Kota Banjarmasin, dan Kabupaten Tabalong. Sedangkan 10 kabupaten lainnya berada pada tingkatan status IPM Sedang dengan nilai indeks berkisar antara 60 -70.

Grafik 10.6 Nilai IPM Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan Tahun 2017



Sumber : BPS Prov Kalimantan Selatan

Dari sisi pembangunan manusia yang diukur dengan dimensi kesehatan, pendidikan, dan ekonomi, Kota Banjarbaru menduduki peringkat pertama dengan angka sebesar 78,83. Angka ini bahkan jauh lebih tinggi dibandingkan IPM Provinsi Kalimantan Selatan secara keseluruhan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kualitas

pembangunan manusia di Kota Banjarbaru sudah terbilang baik. Hal ini sejalan apabila ditinjau dari sisi perekonomian, persentase penduduk miskin di Kota Banjarbaru tahun 2018 adalah sebesar 4,19 persen, masih lebih rendah jika dibandingkan persentase Provinsi Kalimantan Selatan secara keseluruhan. Disamping itu pertumbuhan ekonominya merupakan yang tertinggi yakni sebesar 6,90 persen didorong oleh kinerja lapangan usaha yang semakin baik. Laju pertumbuhan ini merupakan yang paling cepat jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kalimantan Selatan.

**Tabel 10.5. Peringkat IPM Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan
Tahun 2014-2018**

Kabupaten/Kota	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
KALSEL	22	22	22	22	22
Tanah Laut	6	6	7	6	6
Kota Baru	7	7	8	8	8
Banjar	8	9	10	10	8
Barito Kuala	12	12	12	12	12
Tapin	4	4	5	5	5
Hulu Sungai Selatan	10	10	6	7	7
Hulu Sungai Tengah	9	8	9	9	8
Hulu Sungai Utara	13	13	13	13	13
Tabalong	3	3	3	3	3
Tanah Bumbu	5	5	4	4	4
Balangan	11	11	11	11	11
Banjarmasin	2	2	2	2	2
Banjarbaru	1	1	1	1	1

Sumber : BPS Prov Kalimantan Selatan



LAMPIRAN



LAMPIRAN

Tabel 1. PDRB Kota Banjarbaru Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014 – 2018 (Miliar Rupiah)

Kat	Uraian	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	125,43	138,74	151,44	163,03	175,08
B	Pertambangan dan Penggalian	232,81	263,72	277,49	304,00	332,67
C	Industri Pengolahan	450,37	508,22	565,30	624,62	665,80
D	Pengadaan Listrik, Gas	7,73	12,18	15,12	17,62	20,48
E	Pengadaan Air	33,74	38,31	41,41	45,92	51,06
F	Konstruksi	818,46	957,08	1 055,50	1 160,41	1 287,73
G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	588,78	677,25	766,43	864,73	969,83
H	Transportasi dan Pergudangan	1 227,71	1 425,94	1 583,44	1 777,31	1 974,93
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	151,88	169,01	185,82	206,20	230,53
J	Informasi dan Komunikasi	272,76	301,27	333,11	377,87	410,25
K	Jasa Keuangan	102,22	112,51	123,91	137,47	156,48
L	Real Estate	127,64	141,96	156,15	169,91	182,69
M,N	Jasa Perusahaan	24,54	27,79	30,99	34,60	38,63
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	731,28	865,79	905,35	947,13	1 021,08
P	Jasa Pendidikan	481,90	551,75	630,32	710,91	787,54
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	169,86	200,06	225,33	251,78	278,34
R,S,T,U	Jasa lainnya	94,86	109,86	124,72	139,97	154,56
PDRB		5 641,96	6 501,43	7 171,82	7 933,47	8 737,66

* angka sementara

** angka sangat sementara

Tabel 2. PDRB Kota Banjarbaru Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014 – 2018 (Miliar Rupiah)

Kat	Uraian	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	103,57	105,41	110,27	116,74	121,89
B	Pertambangan dan Penggalian	194,04	200,64	204,38	220,75	236,62
C	Industri Pengolahan	371,88	387,92	411,84	433,19	456,52
D	Pengadaan Listrik, Gas	8,69	11,55	11,90	12,04	13,12
E	Pengadaan Air	27,56	29,50	31,79	34,22	36,53
F	Konstruksi	685,08	735,93	787,14	846,83	905,70
G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	478,11	511,92	553,79	598,23	645,85
H	Transportasi dan Pergudangan	846,17	912,99	998,96	1 078,91	1 164,44
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	123,85	131,80	141,51	153,45	165,64
J	Informasi dan Komunikasi	236,75	256,38	279,31	303,70	324,67
K	Jasa Keuangan	81,38	85,37	91,32	96,81	101,08
L	Real Estate	106,82	113,33	122,15	130,75	138,16
M,N	Jasa Perusahaan	19,10	20,09	21,80	23,46	25,23
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	557,60	605,77	618,09	630,50	654,67
P	Jasa Pendidikan	405,77	431,07	465,43	504,02	548,52
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	139,62	149,49	163,26	177,44	191,44
R,S,T,U	Jasa lainnya	76,85	81,92	89,01	95,82	103,43
PDRB		4 462,83	4 771,07	5 101,95	5 456,87	5 833,51

* angka sementara

** angka sangat sementara

**Tabel 3. Struktur Perekonomian Kota Banjarbaru
Tahun 2014 – 2018 (Persen)**

Kat	Uraian	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,22	2,13	2,11	2,05	2,00
B	Pertambangan dan Penggalian	4,13	4,06	3,87	3,83	3,81
C	Industri Pengolahan	7,98	7,82	7,88	7,87	7,62
D	Pengadaan Listrik, Gas	0,14	0,19	0,21	0,22	0,23
E	Pengadaan Air	0,60	0,59	0,58	0,58	0,58
F	Konstruksi	14,51	14,72	14,72	14,63	14,74
G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,44	10,42	10,69	10,90	11,10
H	Transportasi dan Pergudangan	21,76	21,93	22,08	22,40	22,60
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,69	2,60	2,59	2,60	2,64
J	Informasi dan Komunikasi	4,83	4,63	4,64	4,76	4,70
K	Jasa Keuangan	1,81	1,73	1,73	1,73	1,79
L	Real Estate	2,26	2,18	2,18	2,14	2,09
M,N	Jasa Perusahaan	0,43	0,43	0,43	0,44	0,44
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	12,96	13,32	12,62	11,94	11,69
P	Jasa Pendidikan	8,54	8,49	8,79	8,96	9,01
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,01	3,08	3,14	3,17	3,19
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,68	1,69	1,74	1,76	1,77
PDRB		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

* angka sementara

** angka sangat sementara

**Tabel 4. Pertumbuhan Ekonomi Kota Banjarbaru
Tahun 2014 - 2018 (Persen)**

Kat	Uraian	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,14	1,77	4,61	5,87	4,41
B	Pertambangan dan Penggalian	4,08	3,40	1,87	8,01	7,19
C	Industri Pengolahan	3,62	4,31	6,16	5,18	5,39
D	Pengadaan Listrik, Gas	26,22	32,88	3,08	1,13	9,01
E	Pengadaan Air	7,54	7,01	7,76	7,67	6,74
F	Konstruksi	7,68	7,42	6,96	7,58	6,95
G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,32	7,07	8,18	8,03	7,96
H	Transportasi dan Pergudangan	7,10	7,90	9,42	8,00	7,93
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,05	6,42	7,37	8,44	7,95
J	Informasi dan Komunikasi	8,02	8,29	8,94	8,73	6,90
K	Jasa Keuangan	4,92	4,91	6,97	6,01	4,41
L	Real Estate	6,98	6,10	7,78	7,04	5,67
M,N	Jasa Perusahaan	7,02	5,18	8,49	7,64	7,53
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,93	8,64	2,03	2,01	3,83
P	Jasa Pendidikan	7,42	6,24	7,97	8,29	8,83
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,22	7,07	9,21	8,69	7,89
R,S,T,U	Jasa lainnya	8,64	6,59	8,66	7,65	7,94
PDRB		6,68	6,91	6,94	6,96	6,90

* angka sementara

** angka sangat sementara

**Tabel 5. Statistik Ketenagakerjaan Kota Banjarbaru
Tahun 2014, 2015, 2017, dan 2018**

Uraian	2014	2015	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
TPAK (%)	60,18	64,86	60,98	63,51
Tingkat Pengangguran (%)	5,35	3,67	5,51	5,20
Bukan Angkatan Kerja (%)	39,82	35,14	39,02	36,49
Bekerja (%)	94,65	96,33	94,49	94,80
Bekerja di Sektor Primer	14,30	10,38	11,53	9,78
Bekerja di Sektor Sekunder	17,37	15,25	15,72	16,42
Bekerja di Sektor Tersier	68,33	74,37	72,75	73,80

Sumber: Data Sakernas 2014, 2015, 2017, dan 2018 (diolah)

**) Tahun 2016 tidak diadakan SAKERNAS sehingga data tidak tersedia*

**Tabel 6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Banjarbaru
Tahun 2014 - 2018**

Uraian	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	77,30	77,56	77,96	78,32	78,83
Angka Harapan Hidup (AHH) (tahun)	71,06	71,36	71,43	71,50	71,67
Harapan Lama Sekolah (EYS) (tahun)	14,73	14,75	14,77	14,78	14,79
Rata-rata Lama Sekolah (MYS) (tahun)	10,74	10,75	10,76	10,77	10,93
Pengeluaran Perkapita (Ribu Rupiah)	12.376	12.467	12.879	13.279	13.590
Peringkat IPM	1	1	1	1	1

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan

D A T A

MENCERDASKAN BANGSA

